



UNIVERSITAS INDONESIA

**DARI MANIPULASI DATA SAMPAI AKSI PROTES :
Studi Tentang Respon Warga Petani di Dusun Bantarawi
Terhadap Pembangunan Bendungan Jatigede Sumedang**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Sosial**

**M. Wulan Puspitasari
0706165324**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI SOSIAL
DEPOK
DESEMBER 2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : M. Wulan Puspitasari

NPM : 0706165324

Program Studi : Antropologi Sosial

Judul Skripsi : **DARI MANIPULASI DATA SAMPAI AKSI PROTES :
Studi Tentang Respon Warga Petani di Dusun Bantarawi
Terhadap Pembangunan Bendungan Jatigede Sumedang**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Iwan Tjitradjaja

(*Wan Tjitradjaja*)

Penguji : Dr. Prihandoko Sanjatmiko

(*Prihandoko Sanjatmiko*)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 30 Desember 2011

**HALAMAN PERNYATAAN
JUDUL KARYA AKHIR UNTUK KEAKURATAN DATA**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Wulan Puspitasari
NPM : 0706165324
Program Studi : S1
Departemen : Antropologi
Jenis Karya Akhir : Skripsi

Demi keakuratan data informasi akademik Universitas Indonesia, dengan ini saya menyampaikan dan menyatakan judul karya akhir saya dalam 2 Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai dengan *Hard Cover* terakhir yang diserahkan ke Program/Perpustakaan dan sudah selesai dengan data yang dimasukkan dalam SIAK NG sebagai berikut:

Kolom Judul Karya Akhir dalam Bahasa Indonesia:

DARI MANIPULASI DATA SAMPAI AKSI PROTES: Studi Tentang Respon Warga Petani di Dusun Bantarawi Terhadap Pembangunan Bendungan Jatigede Sumedang

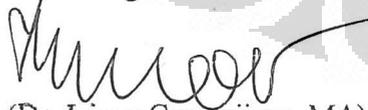
Kolom Judul Karya Akhir dalam Bahasa Inggris:

FROM DATA MANIPULATION TO THE PROTEST ACTION : Study of Peasant's Response to The Construction of Jatigede Dam Sumedang

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 30 Desember 2011
Mengetahui,

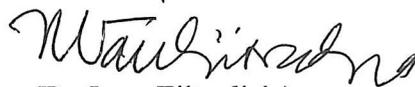
Ketua Program


(Dr. Jajang Gunawijaya, MA)

Yang Menyatakan


(M. Wulan Puspitasari)

Pembimbing Penulisan Karya Akhir


(Dr. Iwan Tjitradjaja)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kuasa. Tempat segala pengharapan dan pemsarahan diri, yang Maha memiliki segala ketentuan. Atas izin, berkah, dan keridhoan dalam kasihNya akhirnya skripsi ini dapat dituntaskan. Cinta dan kebaikanNya seraya membimbing diri ini. Layaknya tangan yang tak terlihat senantiasa mengarahkan hidup dan penghidupan dalam cara yang mudah. Salam teriring kepada sang penyempurna iman dan penerang jalan, Rasul semua umat.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial dari Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulisan skripsi ini berdasarkan *life history* masyarakat lokal dengan disertai pengamatan dan kepekaan penulis tentang respon masyarakat terkena dampak proyek pembangunan bendungan Jatigede terhadap ketidakpastian kondisi akibat pembangunannya yang tertunda-tunda. Juga ditambah dengan pengalaman hidup dan memori masa kecil penulis yang mana merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Sehingga terlihat adanya pengaruh-pengaruh yang berbeda dalam kehidupan mereka sebagai akibat tertunda-tundanya proyek pembangunan bendungan Jatigede tersebut.

Penulis menyadari betul skripsi ini tidak akan pernah rampung, tanpa adanya bantuan dari banyak pihak. Di sini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara moriil maupun materiil :

1. Dr. Iwan Tjitradjaja, dosen pembimbing yang selalu baik mengarahkan, memberikan saran, kritik, dan pemikirannya hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Endang, pembimbing akademik. Terimakasih saya sampaikan juga untuk semua dosen-dosen Antropologi Universitas Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan, khususnya Prof. Yasmin, Prof. Afid, Prof. Muthia, Prof. Yunita, Bpk. Emmed, Bpk. Prihandoko, Bpk. Djadjang, Bpk. Yanto, Bpk. Semiarto Aji, dan segenap pihak Departemen Antropologi. Melalui antropologi saya memahami hakikat sebagai manusia.

3. Ibu saya dan keluarga besar, yang tidak pernah kehabisan kesabaran dan dukungan menunggu kelulusan sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada beliau.
4. Keluarga besar dan kerabat-kerabat di dusun Bantarawi, Sumedang atas segala pengalaman dan keterbukaan untuk berbagi cerita. Pihak PU Bendungan Jatigede.
5. Teman-teman di Mahalum FISIP UI, atas bantuan yang tulus.
6. Teman-teman seperjuangan, Antropologi angkatan 2007. Khususnya, Riva Nur Insania yang dari awal masuk PMDK selalu saling menyemangati. Jaman dan Intan, teman satu bimbingan. Fahru, Salmah, dan Nurul yang selalu ceria dan *update* info beasiswa. Manda, teman *hunting customer* bareng yang selalu gantian buat jagain 'lilin' (semangat) biar tetep nyala. Juga kepada para senior yang selalu memotivasi dan memberi masukan Irfan Nugraha dan Rendra Reonardo.
7. Karya Salemba Empat (KSE) atas arahan dan motivasi hidup yang sangat berarti. Bpk. Hengky dkk, terimakasih telah memberikan saya banyak pelajaran, mengantarkan saya ke jalan yang tepat dan mempertemukan saya dengan orang-orang besar.
8. Mien R. Uno Foundation (MRUF), Ibu Mien *is the most inspiring woman* bagi saya, Bpk.Sandiaga Uno, Mas Nanang, bertemu kalian adalah motivasi terbesar saya mencapai kesuksesan. Terimakasih banyak atas bimbingannya.
9. Rekan-rekan bisnis yang juga memberikan kontribusi, Bpk. Daniel, The Cakris, Pramudita Aulia, Ibu Thoha, Pak Rohalih dkk di BMT Kayu Manis, Pak Ferdy dkk (LF Asia), sahabat-sahabat tercinta dan *all crew MG corp.*

Jakarta, 30 Desember 2011



M. Wulan Puspitasari

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Wulan Puspitasari
NPM : 0706165324
Program Studi: Antropologi Sosial
Departemen : Antropologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

DARI MANIPULASI DATA SAMPAI AKSI PROTES :

**Studi Tentang Respon Warga Petani di Dusun Bantarawi Terhadap
Pembangunan Bendungan Jatigede Sumedang**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 30 Desember 2011

Yang menyatakan



(M. Wulan Puspitasari)

ABSTRAK

Nama : M. Wulan Puspitasari
Program Studi : Antropologi Sosial
Judul : **DARI MANIPULASI DATA SAMPAI AKSI PROTES :
Studi Tentang Respon Warga Petani di Dusun Bantarawi
Terhadap Pembangunan Bendungan Jatigede Sumedang**

Fokus dari kajian ini mendeskripsikan bagaimana respon dan pengalaman hidup warga masyarakat petani lokal yang terkena dampak pembangunan bendungan Jatigede yang pelaksanaannya tertunda-tunda. Respon-respon mereka mencerminkan bagaimana proyek pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda selama kurang lebih 27 tahun membawa pengaruh berbeda pada mereka. Kajian ini membahas respon dan pengalaman warga petani Bantarawi dengan merujuk pada konsep petani dari Scott dan Wolf. Selain itu, kajian ini juga merujuk pada pandangan Vayda dan beberapa ahli lain mengenai pengetahuan, memori, dan pengalaman hidup. Data dari kajian ini diperoleh melalui penelitian etnografi. Kajian ini menunjukkan bahwa bendungan Jatigede menjadi dilema tersendiri saat proyek telah berjalan dan tertunda karena masalah sosial, ekologis dan dana. Sebagai akibatnya, kehidupan sosial ekonomi warga lokal mengalami perubahan seiring dengan bagaimana mereka merespon keberadaan dan pelaksanaan proyek pembangunan bendungan yang tertunda itu.

Kata Kunci :
Bendungan, Petani, Pengalaman, dan Respon

ABSTRACT

Nama : M. Wulan Puspitasari
Program Studi : Antropologi Sosial
Judul : **DARI MANIPULASI DATA SAMPAI AKSI PROTES :
Studi Tentang Respon Warga Petani di Dusun Bantarawi
Terhadap Pembangunan Bendungan Jatigede Sumedang**

This study focus to describes how the response and life experience community of local farmers that affected by delayed Jatigede dam construction. Their responses reflect how Jatigede dam construction projects delayed for more than 27 years have different effects on them. This study discusses the experience of residents and Bantarawi farmers' response with reference to the concept of farmers by Scott and Wolf. In addition, this study also refers to the views from Vayda and several other experts on knowledge, memory, and life experiences. Data from this study was obtained through ethnographic research. This study indicates that Jatigede dam is a dilemma when the project has been running and delayed caused by social, ecological and funding issues. As a result, social and economic life of local residents had been through the change considerably as to how they respond to the existence and implementation of dam construction projects are delayed.

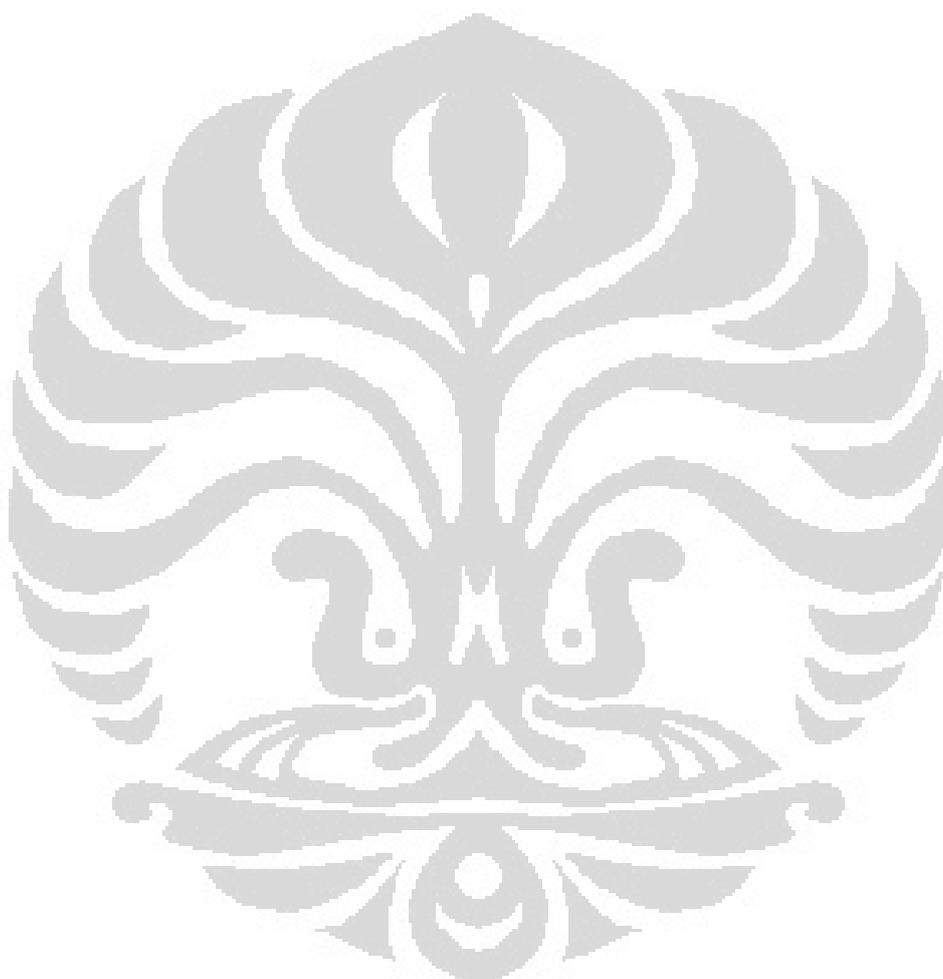
Keyword:

Dams, Farmer, Experience, and Response

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Signifikansi Penelitian	8
1.5 Kerangka Pemikiran	9
1.6 Metode Penelitian	20
- Imersi	22
- Inskripsi	25
1.7 Sistematika Penulisan	27
BAB 2. BANTARAWI : Dusun Terpasung, Masyarakat Terkurung	28
2.1 Sekilas Desa Padajaya	28
2.2 Dusun Bantarawi	31
2.2.1 Karakteristik Lingkungan	
- Lingkungan Geografis	32
- Fasilitas	34
2.2.2 Karakteristik Sosial	
- Organisasi Sosial	38
- Bahasa	39
- Pengetahuan/ pendidikan	40
- Teknologi	41
- Mata pencaharian	43
- Religi	44
- Kesenian	46
2.3 Bendungan : Sejarah dan Progres	46
BAB 3. LEMBUR KAPAHUNG TAGIWUR KU JATIGEDE.....	57
3.1 Manipulasi Pendataan	58
3.2 Migrasi yang Menyedihkan	77
3.3 Lumbung Petani	85
3.4 'Rumah Hantu'	91
3.5 Aksi Protes	98

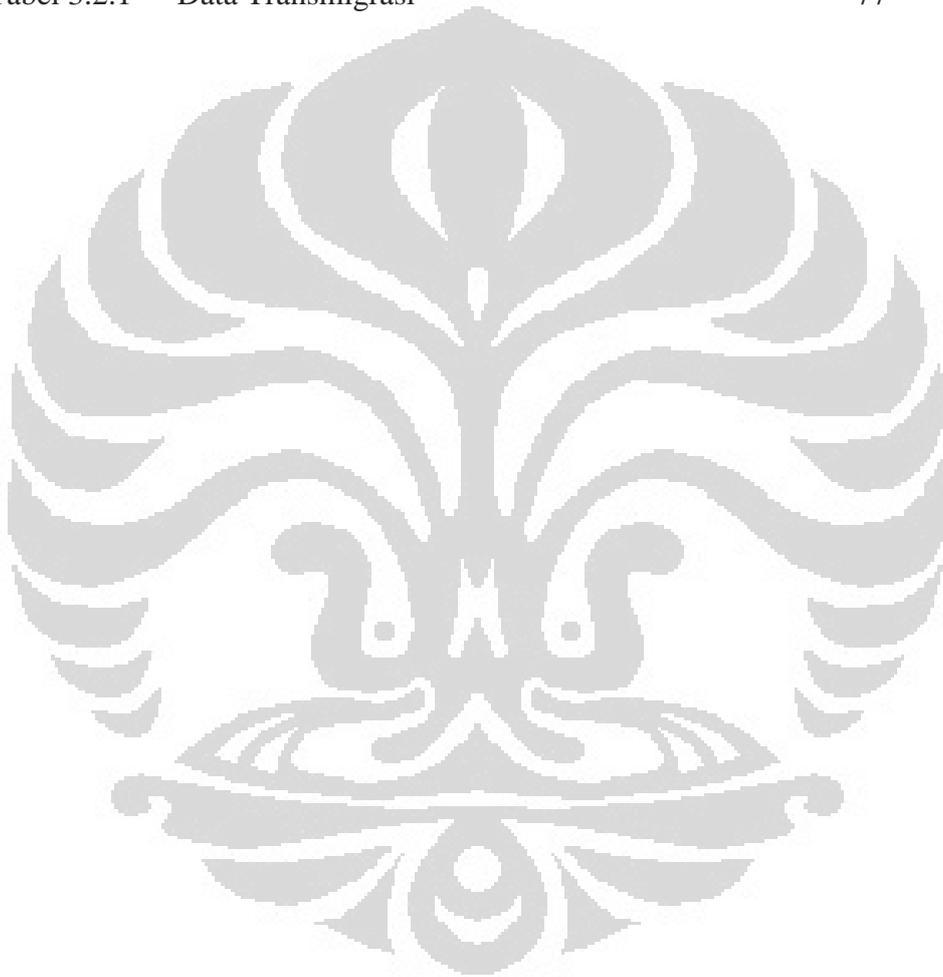
BAB 4. BERDAMAI DENGAN KETIDAKPASTIAN	112
4.1 Lain Dulu, Lain Sekarang	112
4.2 Jatigede : Kegagalan Sosialisasi, Arena Manipulasi	122
4.3 Berdamai dengan Ketidakpastian	134
BAB 5. PENUTUP	139
Kesimpulan	139
DAFTAR REFERENSI	140



DAFTAR TABEL

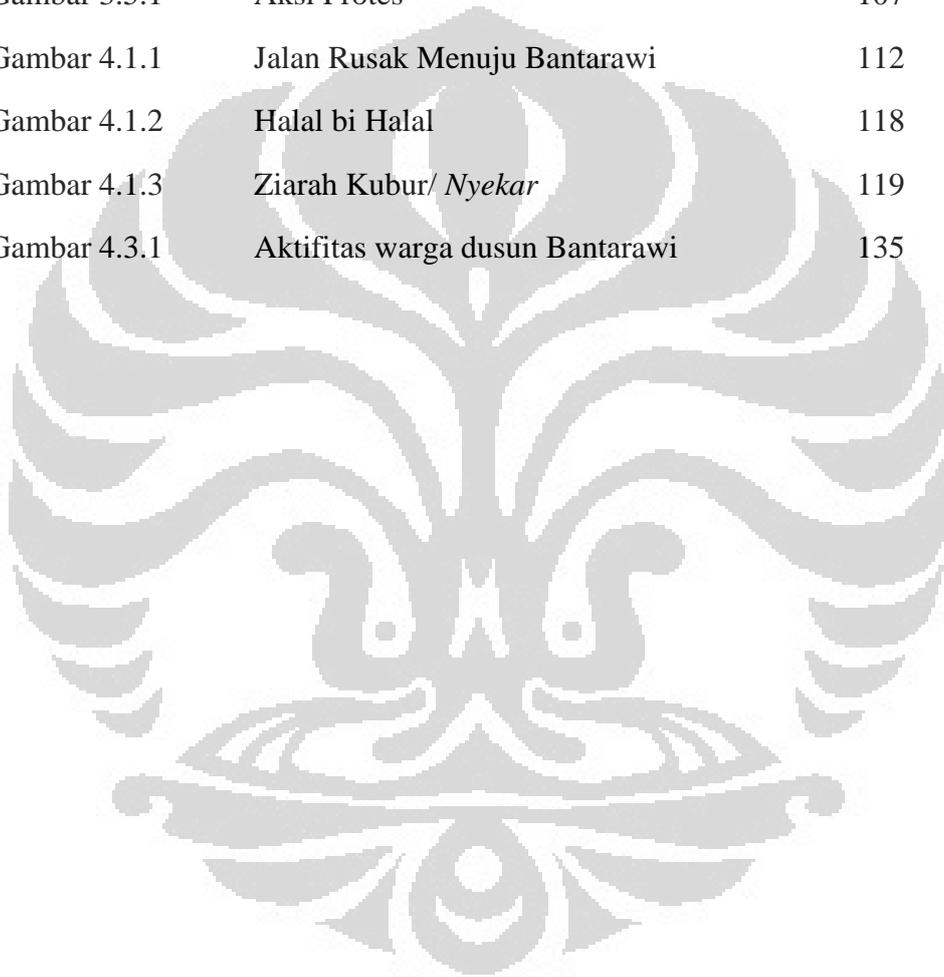
Tabel 2.1 Manfaat dan resiko lingkungan bendungan dan waduk yang terbentuk oleh bendungan 47

Tabel 3.2.1 Data Transmigrasi 77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.1	Lima Titik Wilayah Calon Genangan Bendungan Jatigede, Sumedang	51
Gambar 3.4.1	“Rumah Hantu”	91
Gambar 3.5.1	Aksi Protes	107
Gambar 4.1.1	Jalan Rusak Menuju Bantarawi	112
Gambar 4.1.2	Halal bi Halal	118
Gambar 4.1.3	Ziarah Kubur/ <i>Nyekar</i>	119
Gambar 4.3.1	Aktifitas warga dusun Bantarawi	135



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan, atau lembaga-lembaga internasional, nasional atau lokal yang terwujud dalam bentuk kebijaksanaan, program, atau proyek, yang secara terencana merubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari sesuatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut (Suparlan dalam Koentjaraningrat, 1997:61). Namun, pada kenyataannya upaya pencapaian tujuan dari pembangunan seringkali tidak menemukan jalan yang mulus, karena pelaksanaannya kadang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Tentunya hal ini terkait dengan begitu banyak pihak dan aspek-aspek penting yang secara signifikan turut menentukan arah pembangunan itu sendiri.

Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat benturan-benturan antara kepentingan pemerintah/swasta dan masyarakat lokal yang hendak 'dibangun'. Benturan ini disebabkan oleh adanya perbedaan antara bagaimana pembangunan (nasional) yang dipikirkan dan dirancang oleh pemerintah untuk dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan pembangunan (sistem ekonomi) masyarakat lokal sendiri yang sudah merupakan nilai budaya setempat sebagai warisan yang turun temurun dari nenek moyangnya (Hindom:1997).

Demi merealisasikan proyek pembangunan, pemerintah seringkali menyajikan segi manfaat secara berlebihan dengan mengesampingkan resiko yang mungkin akan terjadi. Resiko yang paling serius adalah sulitnya merubah cara-cara hidup dan kebudayaan masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan, sehingga seringkali dipaksakan dan tidak sesuai. Kekeliruan yang seringkali mendasari gagalnya pembangunan nasional pada masyarakat lokal adalah karena pemerintah acapkali mengabaikan pengetahuan dan

kekayaan berupa budaya dari masyarakat lokal yang dianggapnya “bejana kosong”.

Indonesia, sebagai negara agraris berkembang senantiasa menjadikan pertanian sebagai titik tolak pembangunan. Salah satu upaya yang pemerintah lakukan untuk mendorong kapabilitas pertanian agar mumpuni adalah dengan memfasilitasi penyediaan saluran irigasi/ pengairan. Program ini direalisasikan diantaranya melalui pembangunan *dam* atau bendungan.

Pada kenyataannya, fenomena pembangunan bendungan tidak hanya populer pada peradaban baru-baru ini. Sejak mulainya zaman sejarah, manusia telah membangun bendungan.¹ Goldsmith dan Hildyard (1993) menerangkan bahwa sejak peradaban kuno beberapa negara seperti Sumeria, Babilonia, Mesir, Sri Lanka, dan Kamboja merupakan negara yang terkenal dengan jaringan irigasinya. Tanggul-tanggul dan tanki-tanki yang terhitung masih sederhana namun mengandung kecakapan teknik yang bisa dikatakan canggih di zamannya, dewasa ini telah maju dan berkembang - dengan teknik beton dibantu alat-alat/ mesin berat - menjadi bendungan yang amat besar dan rumit. Salah satu bendungan dengan tingkat ambisius yang cukup tinggi adalah bendungan Sanxia di sungai Yangste di Cina. Begitu selesai, bendungan ini menghasilkan 40 % dari seluruh jumlah tenaga listrik yang dihasilkan di Cina dewasa ini – menyediakan 25.000 megawatt, hasil yang sepadan dengan 25 stasiun tenaga nuklir besar.²

Rumor pembangunan bendungan dan signifikansinya sebenarnya merupakan rencana global sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bank Dunia dan berbagai perwakilan internasional bahkan menjadi penyokong dana sehingga pembangunan bendungan pun bisa maju relatif sangat cepat sejak Perang Dunia II. Pada tahun 1990, jumlah semua bendungan yang tingginya

¹ Goldsmith, Edward & Nicholas Hildyard.1993.*Dampak Sosial dan Lingkungan Bendungan Raksasa*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, hlm.3

² Ibid, hlm.4

lebih dari 150 m di seluruh dunia, diharapkan mencapai 113 buah, yang 49 buah di antaranya akan selesai dibangun dalam tahun 1980-an.³

Berdasarkan data di atas kita dapat melihat bahwasanya pembangunan bendungan di Indonesia bukan hanya rencana pembangunan nasional, tapi juga merupakan program pembangunan dunia. Bendungan Jatigede merupakan bendungan yang direncanakan sejak tahun 1950-an dan sampai saat ini pelaksanaannya masih belum selesai. Ini bertepatan dengan program internasional yang mencanangkan pembangunan bendungan, khususnya di negara berkembang, seperti apa yang diulas oleh Goldsmith dan Hildyard. Rencana dan pelaksanaan bendungan Jatigede ini didukung pula oleh ambisi pemerintah yang hendak menjadikan bendungan Jatigede sebagai bendungan terbesar se-Asia Tenggara.

Sejak tahun 1900 sampai sekarang, di Indonesia telah dibangun lebih dari 100 buah bendungan mulai dari waduk lapangan sampai bendungan besar baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.⁴ Fungsi pembangunan bendungan ini sendiri telah meluas tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, tetapi juga sebagai pembangkit tenaga listrik, penyediaan air bersih dan pengendali banjir. Bendungan besar yang pertama kali dibangun di Indonesia adalah bendungan Nglangon di Jawa Tengah (1910-1916), disusul bendungan Prijetan di Jawa Timur (1911-1917), bendungan Tempuran di Jawa Tengah (1914-1916), serta bendungan dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cileunca di Jawa Barat (1922), yang pada umumnya adalah bendungan tipe urugan baik urugan batu maupun urugan tanah.⁵ Konon, selanjutnya adalah bendungan Jatigede di Sumedang ini.

Gagasan pembangunan bendungan Jatigede diajukan pertama kali pada tahun 1963, kemudian ditindaklanjuti dengan *detail design* pada tahun 1986 oleh konsultan SMEC, Australia. Kemudian direview kembali pada tahun 2004 oleh konsultan PT Indra Karya-JO-PT Wiratman dan telah

³ Ibid, hlm.4

⁴ Dirjen Pengairan PU, Bendungan Besar di Indonesia

⁵ Sinarno, Radhi dkk.2006.*Seri Sejarah Konstruksi Indonesia : Menyimak Bendungan di Indonesia (1961-2006)*.Jakarta: Bentara Adhi Cipta Indocamp, Abstraksi

mendapatkan sertifikasi desain dari Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 23 Februari 2005. Saat ini pembangunan bendungan Jatigede dikelola oleh kontraktor dari Cina, Synohidro, yang berpengalaman membangun bendungan Tiga Ngarai (*Three Gorges Dam*) di negaranya.

Fungsi utama bendungan Jatigede ini sebagai sumber irigasi di wilayah pantai utara Jawa Barat, diantaranya adalah kabupaten Majalengka, Cirebon dan Indramayu. Bendungan ini juga akan difungsikan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik untuk mendukung program percepatan penyediaan listrik oleh pemerintah. Untuk mengatasi kekurangan air bersih di daerah pantura, bendungan ini nantinya akan dijadikan sumber air baku. Pemerintah kabupaten Sumedang juga merencanakan kawasan bendungan sebagai kawasan wisata air untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.⁶

Berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan pemerintah, pembangunan bendungan Jatigede justru mengalami banyak hambatan dan pelaksanaannya masih belum rampung hingga saat ini. Tertundanya pelaksanaan pembangunan bendungan Jatigede selama 27 tahun ini telah menimbulkan banyak permasalahan. Di sisi fungsinya yang sangat besar, pembangunan bendungan ini justru menyisakan permasalahan yang lebih pelik dalam ruang lingkup kemasyarakatan, sosial dan budaya, khususnya pada masyarakat yang terkena dampak pembangunan ini secara langsung.

Sebagaimana yang terjadi di warga dusun Bantarawi desa Padajaya kec.Wado kab.Sumedang Jawa Barat. Sejak tahun 1984 program pembangunan bendungan Jatigede ini mulai direalisasikan dengan proses pendataan dan ganti rugi secara tidak transparan. Sudah 27 tahun hingga saat ini kondisi pembangunan bendungan Jatigede terhambat dan tertunda-tunda. Selama itu pula warga petani di dusun Bantarawi hidup dalam keadaan yang terkatung-katung dan terus melakukan *dealing* dengan mengekspresikan berbagai respon sebagai implikasinya.

⁶ http://www.wika.co.id/ina/invesrel/index.php?act=detailnews&p_id=260

Bendungan ini membendung sungai dengan kriteria yang strategis se-Jawa Barat yaitu sungai Cimanuk dan akan menenggelamkan lahan seluas 6.252 Ha yang terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kec.Jatigede, Kec.Wado, Kec.Situraja, Kec.Darmaraja, dan Kec.Jatinunggal dan termasuk di dalamnya ada 34 desa yang terkena dampak pembangunan bendungan ini. Diantara 5 kecamatan yang terkena dampak tersebut, kecamatan Wado adalah wilayah yang paling tertinggal diantara kecamatan yang lainnya.

Dusun Bantarawi adalah salah satu dusun di desa Padajaya di kecamatan Wado ini, yang kian terpasung akibat tertundanya pembangunan bendungan Jatigede ini. Sejak bendungan ini mulai digarap akses jalan utama menuju dusun ini jadi sangat rusak, LMD (Listrik Masuk Desa) yang tidak memadai bahkan tidak ada penerangan jalan, dan fasilitas umum yang tidak lagi mendukung aktifitas kehidupan masyarakat. Penurunan kondisi ini disebabkan oleh dihentikannya pembangunan fisik secara otomatis oleh pemerintah sejak tahun 1990-an. Pemerintah mempertimbangkan bahwa mengadakan perbaikan di daerah calon genangan hanya akan sia-sia, karena cepat atau lambat daerah tersebut akan tergenang oleh bendungan.

Dalam kondisi lingkungan dusun Bantarawi yang semakin memprihatinkan akibat tertundanya pembangunan bendungan Jatigede tersebut, masih ada kehidupan yang berlangsung di sana. Warga masyarakat masih bersikukuh menempati rumah dan mengolah lahan mereka. Meskipun mereka sudah sempat mendapat kompensasi ganti rugi pada tahun 1986 dan tanah-tanah mereka sudah dipatok dengan plang Milik Negara, mereka tetap tinggal dan menjalani aktifitas sebagaimana adanya. Tentu ini bukanlah hal yang mudah mengingat mereka berada dalam kondisi pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda selama puluhan tahun.

Sebelum adanya rencana pembangunan bendungan Jatigede, warga dusun Bantarawi hidup dengan tatanan tradisional yang dimilikinya sebagai petani pedesaan. Rapatnya solidaritas terjalin dalam kehidupan petani yang sederhana. Sampai akhirnya, pada tahun 1980-an rencana proyek pembangunan bendungan Jatigede hadir sebagai sebuah bentuk modernisasi

yang secara langsung ataupun tidak langsung masuk dan membawa pengaruh ke dalam berbagai aspek kehidupan warga dusun Bantarawi.

Pendataan pertama kali pada tahun 1984 adalah awal mula dari sebuah perubahan yang dirasakan secara nyata oleh warga masyarakat terkena dampak pembangunan bendungan Jatigede di dusun Bantarawi. Kesadaran akan kepemilikan/ hak akan lahan, *melek* harga, dan terjalinnya relasi dengan agen-agen di luar dusun menumbuhkan bibit-bibit individualistik dan orientasi ekonomi/materialistik. Pada saat pelaksanaan pembangunan bendungan Jatigede ini tertunda, maka kehidupan mereka pun ikut terkatung-katung. Alhasil, mereka mengupayakan berbagai macam respon untuk menyiasati keadaan yang semakin tidak pasti ini. Diantaranya adalah dengan menemukan alternatif mata pencaharian, urbanisasi ke kota, atau ikut program migrasi dan transmigrasi dari pemerintah.

Masalah sosial di masyarakat yang terkena dampak pembangunan ini, terutama mengenai belum usainya penuntasan ganti rugi, menjadi hambatan utama pembangunan bendungan Jatigede hingga akhirnya tertunda selama berpuluh-puluh tahun sampai saat ini. Selama itu pula perlahan mereka mulai menemukan peluang-peluang yang menguntungkan mereka untuk ‘melawan balik’ pemerintah. Diantaranya dengan cara berlomba-lomba untuk berinvestasi pada pembangunan ‘rumah hantu’ (harapan tunai). Dari waktu ke waktu keberadaan ‘rumah hantu’ ini menjamur di hampir seluruh wilayah calon genangan, termasuk dusun Bantarawi. Sangat mudah bagi petani yang memiliki modal untuk membangun bangunan-bangunan ilegal ini, dan tidak sulit juga bagi yang mengalami keterbatasan modal karena bisa menyewakan lahannya kepada investor dari luar dusun.

Aktifitas, tindakan, dan interaksi diantara mereka menjadi pertunjukkan penting dalam kajian mengenai respon keberadaan dan pelaksanaan pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda ini. Pengalaman dan cerita mereka menjadi sumber kepekaan saya tentang apa sebenarnya warga petani dusun Bantarawi ini hadapi. Bagaimana akhirnya respon-respon yang teraktualisasikan dalam pengalaman dan cerita warga

petani di dusun Bantarawi ini menjadi menarik untuk diteliti sebagai gambaran bahwa proyek pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda ini telah memberikan pengaruh berbeda pada mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan demikian permasalahan yang perlu diperhatikan disini yaitu berkenaan dengan posisi warga petani sebagai subjek yang tidak lain adalah agen-agen dengan latar belakang, pengalaman, dan cerita kehidupan yang berbeda-beda. Pengalaman keluarga warga petani ini akan diulas dalam berbagai segi dan berkaitan dengan pengaruh yang dirasakan dari tertunda-tundanya pembangunan bendungan Jatigede ini. Pengaruh yang dirasakan akan berbeda antara satu warga dengan warga yang lain, dan hal tersebut dapat terlihat dari upaya tindakan-tindakan mereka yang bermacam-macam bentuknya. Hal ini yang dikatakan sebagai bentuk dari manipulasi tindakan atas suatu realitas sosial.⁷ Setiap individu mempunyai kapasitas untuk merespon lingkungan berupa suatu bentuk tindakan sosial tertentu.⁸

Maka, melalui fenomena ini, pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu :

1. Seperti apakah pengetahuan dan praktik lokal yang dimiliki warga petani Bantarawi mengenai pembangunan bendungan Jatigede?
2. Bagaimanakah warga petani Bantarawi merespon pengaruh yang dirasakan dari adanya pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda selama puluhan tahun ini?
3. Apa yang melatarbelakangi mereka untuk tetap bertahan di dusun Bantarawi dengan kondisi lingkungan yang semakin terbatas akibat tertunda-tundanya pembangunan bendungan Jatigede tersebut?

⁷ Guntara, Dasril.2009. Ideologisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan di Dalam Interaksi Antar Penghuni Asrama:Studi Kasus Asrama Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS) Nurul Fikri Regional I Jakarta. Skripsi Sarjana tidak diterbitkan.Depok: Universitas Indonesia, hlm.6

⁸ Ibid,hlm.6

1.3 Tujuan Penelitian

Secara antropologis, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan respon warga petani dusun Bantarawi terhadap realitas yang muncul dari adanya pembangunan bendungan Jatigede ini. Bagaimana kemudian respon-respon itu diaktualisasikan melalui tindakan-tindakan dan relasi yang diciptakan untuk mendukung upaya mereka memposisikan diri di tengah kondisi yang tidak stabil akibat tertundanya pembangunan bendungan Jatigede.

Penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan pengaruh-pengaruh yang berbeda pada warga petani dusun Bantarawi melalui respon-respon mereka terhadap tertundanya proyek pembangunan bendungan Jatigede ini. Seperti apa pengaruh yang dirasakan dan respon yang mereka lakukan terpapar dalam rangkaian cerita pengalaman hidup mereka. Selain itu, respon-respon tersebut juga ditemukan dalam situasi dan kondisi lapangan yang nyata diamati dan dirasakan oleh peneliti.

1.4 Signifikansi Penelitian

Secara teoritis skripsi ini dapat memberikan sumbangan akademis, yakni menambah literatur di bidang Antropologi khususnya area pembangunan dan terapan yang sangat aplikatif dalam kinerja pemerintah dan kehidupan masyarakat sebagai sesama subjek pembangunan. Penelitian ini lebih jauh diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif terkait dengan pengaruh pembangunan pada masyarakat yang dibangunnya, khususnya dalam konteks fenomena yang disajikan.

Secara praktis skripsi ini diharapkan membantu memfasilitasi keluhan dan cerita warga petani dusun Bantarawi yang terkena dampak dengan harapan tersampaikan ke tingkat yang berwenang. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi masukan bagi PEMDA Sumedang dan PU proyek bendungan Jatigede dalam mengatasi masalah sosial budaya yang menjadi kendala terhambatnya pembangunan bendungan Jatigede ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian mengenai dampak proyek pembangunan bendungan telah banyak dilakukan. Seperti bendungan Mohale di Selatan Afrika yang menuai masalah relokasi,⁹ dan bendungan Baliraja di India yang sarat akan perjuangan masyarakatnya yang menuntut keadilan terhadap adanya bangunan bendungan tersebut untuk pertanian mereka¹⁰. Selain itu ada D'Souza dkk (1996) yang menyajikan proyek bendungan Bargi di India. Pembangunan bendungan ini mengisahkan adanya pengusiran paksa yang dilakukan pihak kepolisian (dengan *backing* pemerintah) pada masyarakat terkena dampak proyek ini, yang mencakup petani dan buruh tani. Adapun komunitas yang mewakili masyarakat ini, yaitu Satyagraha, ditangkap secara brutal karena hasutannya pada masyarakat bahwa jika belum ada program rehabilitasi yang pantas maka mereka mengancam akan menenggelamkan diri ke bendungan tersebut.¹¹

⁹ Di dalam artikel ini Thabane mencoba menyampaikan pengalaman-pengalaman sebuah komunitas, Molika-liko, yang terkena imbas konstruksi bendungan Mohale dan berhubungan secara infrastruktur, melalui testimoni dari beberapa anggota komunitas ini. Paper ini merupakan hasil dari pemahaman mengenai pembangunan bendungan Mohale yang mempengaruhi lingkungan yang mana lingkungan ini bukan hanya tanaman dan binatang tapi juga komunitas di dataran tinggi, beberapa dari mereka yang dipaksa untuk meninggalkan wilayahnya. Testimoni yang diungkapkan disini dimaksudkan untuk menciptakan gambaran bagaimana komunitas ini dipengaruhi oleh mulainya program perpindahan tempat tinggal dalam pembangunan bendungan ini.

¹⁰ Anant Phadke bercerita tentang bagaimana para petani, buruh, dan aktifis bersatu dalam sebuah pergerakan yang meminta keadilan untuk mempercepat proses pengaliran air dari bendungan ke ladang mereka. Sebagai orang yang berada dalam area kekeringan ini, Mukti Sangharsa terus memperjuangkan keinginan mereka sampai pada level politik yang tertinggi. Sampai pada akhirnya mereka meloby para kontraktor yang diundang tender penggalian pasir yang akan melibatkan warga desa lain dan hasil bumi berupa kuningin. Kontraktor pun berpihak pada Mukti. Ada persaingan sumber daya yang dalam hal ini adalah pasir, antara warga setempat (Mukti) dan kelompok elit. Menggandeng relasi dari para ahli dan aktifis juga merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan suara penentangan ini. Terutama kepada para politikan pada saat akan mencalonkan diri di pemilihan. Tidak akan ada alasan mereka untuk mengacuhkan suara-suara ini. Maka pihak-pihak yang berwenang pun akan melibatkan diri dengan sendirinya, dengan melakukan penilaian kembali dan mencoba metode alternatif dari pembangunan yang sama dengan pertahanan. Secara luas, tertundanya proyek-proyek besar adalah hasil dari pemberlakuan ini. Sebuah upaya untuk lebih bermanfaat dan meningkatkan efisiensi dari fasilitas yang sudah ada.

¹¹ Permasalahan mengapa kemudian para komite tidak bisa menaruh pertimbangan dasar untuk rehabilitasi ini antara lain disebabkan oleh tertundanya administrasi, kesulitan keuangan, dan perbedaan pendapat dalam tataran normatif. Bendungan tersebut kini telah menghasilkan tenaga

Masih di India, bendungan Narmada juga menuai masalah. Kelas menengah di Gujarat menjadikan simbol-simbol keagamaan sebagai alat untuk memenuhi kerakusan mereka terhadap kekuasaan (Mukta:1990). Terlihat pada rapat umum di mana mereka pro terhadap pembangunan bendungan Narmada ini, dan mengesampingkan masyarakat pedesaan yang miskin. Keagamaan dan kealiman yang mereka pegang menjadi sebuah kemunafikan. Para kapitalis Gujarat yang memiliki kepentingan ini menandingi pihak ahli lingkungan dengan saling mendemonstrasikan kekuatan mereka, dan untuk melihat legitimasi moral dari kepentingan kelas mereka dengan cara mempublikasikan keabsahan dari pemimpin religi tertentu.

Bendungan Tiga Ngarai di Cina atau populer disebut *Three Gorges Dam* yang dikelola oleh Synohidro, kontraktor yang juga menggarap bendungan Jatigede, mengimplikasikan masalah proses *resettlement/* pemindahan masyarakat. Dalam artikel ini Heming dkk mengakui bahwa banyak migran yang tidak memiliki pilihan yang realistis untuk pindah, maka dari itu migran ini disebut sebagai migran yang ‘tidak disengaja- *involuntary*’ atau ‘dipaksakan – *forced*’ (Boyle dkk. 1998). Tiga kategori utama yang diidentifikasinya yaitu : pengungsi secara politis, karena lingkungan, dan pemindahan masyarakat yang disebabkan proyek infrastruktur (termasuk bendungan). Pemindahan karena infrastruktur akan memakan waktu yang paling lama untuk peringatan dan agen-agen publik lebih lama untuk memimpin rencana pemaksaan pemindahan. Masyarakat yang dipindahkan karena waduk dan bendungan adalah konsekuensi dari pembangunan (Scudder & Colson:1982; Cernea:1990 dalam Heming dkk. 2001).

Lebih dari sekedar wujud perkembangan teknologi, bendungan besar menyimbolkan kemajuan manusia dari sebuah kehidupan yang tadinya diatur oleh alam dan takhayul kini alam diatur oleh ilmu pengetahuan dan takhayul ditaklukan oleh rasionalitas (P.McCully:1996 dalam Issacman dkk. 2000).

listrik, tapi tidak untuk pengairan yang justru diharuskan. Para petani yang berada di area-area dekat bendungan tersebut seakan menjadi korban-korban yang menderita karena pembangunan.

Di Indonesia sendiri kajian tentang dampak pembangunan bendungan diantaranya adalah yang dilakukan oleh Tjitradjaja (2006) yang menunjukkan bagaimana unit-unit sosial merespon dan mengambil keuntungan dari peluang yang dihasilkan dari penggunaan lahan baru akibat adanya pembangunan bendungan Jatiluhur, Jawa Barat.

Opini banyak berkembang dan ditulis baik oleh orang dalam ataupun luar Sumedang tentang tertunda-tundanya proyek pembangunan bendungan Jatigede ini dan implikasi sensitifnya di masyarakat terkena dampak. Studi beberapa LSM lingkungan yang menilai kurang layaknya pembangunan bendungan ini secara teknis dan ekologisnya pun turut mewarnai ramainya pro-kontra yang timbul karena proyek ini. Penelitian yang saya lakukan ini bermaksud mengangkat realita yang dialami warga petani dusun Bantarawi dalam menghadapi banyaknya perubahan dan kondisi kehidupan yang tidak stabil akibat tertundanya pelaksanaan pembangunan bendungan Jatigede. Studi ini diarahkan untuk melihat bagaimana kehidupan mereka masih berlangsung di bawah ancaman datangnya air yang akan menenggelamkan tanah mereka, dan bagaimana situasi ini menstimulasi warga Bantarawi untuk memunculkan respon-respon khas petani demi mempertahankan haknya.

Ada beberapa konsep yang perlu ditelaah terkait dengan penelitian mengenai respon warga petani dusun Bantarawi terhadap proyek pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda ini. Mengingat proyek ini merupakan pembangunan yang bersifat masiv dari pemerintah, maka keberadaan pembangunan sebagai satu konsep menjadi sangat penting di sini. Sebagai konteks yang memagari penelitian ini dimana posisi petani mendapatkan pengaruh tertentu dengan adanya program pembangunan pemerintah, yang dalam hal ini adalah proyek pembangunan bendungan Jatigede.

Pembangunan adalah suatu proses yang sengaja diadakan untuk mendorong perubahan sosial budaya ke suatu arah tertentu (Koentjaraningrat:1997). Proses perubahan itu (a) menggeser hal-hal yang sudah ada, (b) menggantikannya, (c) mentransformasikannya, dan (d)

menambah yang baru yang kemudian berdampingan dengan hal-hal yang sudah ada.¹² Syafri Sairin menegaskan bahwa secara konseptual program pembangunan yang dicanangkan pemerintah seringkali tidaklah dipahami oleh masyarakat sesuai dengan maksud program itu. Hal ini merupakan kegagalan “sosialisasi” program kepada masyarakat sasaran. Kegagalan ini ditafsirkannya sebagai suatu proses reinterpretasi (atau ‘konstruksi’ menurut peristilahan pascamodernist) yang dipengaruhi oleh tiga jenis orientasi berpikir, (1) budaya paternalistik, (2) budaya proyek, dan (3) budaya target.¹³

Petani adalah subjek pembangunan yang seringkali posisinya termarginalkan oleh adanya pembangunan. Penjelasan mengenai petani telah disajikan oleh banyak ahli antropologi. Salah satunya adalah Eric Wolf (1996) yang memaparkan pengertian tentang petani pedesaan sebagai agen sosial yang tidak melakukan usaha dalam arti ekonomi, tetapi mengelola sebuah rumah tangga bukan sebuah perusahaan bisnis. Petani senantiasa hidup dalam kesederhanaan dimana kebutuhan dasar mereka yang Scott sebut sebagai kebutuhan subsistensi adalah tuntutan yang utama.¹⁴ Keluarga petani merupakan satu unit produksi dan konsumsi sekaligus. Agar bisa bertahan sebagai satu unit, maka keluarga itu pertama-tama harus memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen subsistensi yang boleh dikatakan tidak dapat dikurangi lagi dan tergantung kepada besar kecilnya keluarga itu. Mereka lebih mengutamakan apa yang dianggap aman dan dapat diandalkan daripada keuntungan yang dapat diperoleh dalam jangka panjang (Scott, 1996:19).

Scott (1989:62) melihat petani dari segi moral yang hidup dalam pola subsisten dan enggan beresiko. Dalam menjelaskan mekanisme masyarakat petani, Scott memberikan sebuah model normatif yang menggambarkan kehidupan ekonomi petani yang dekat dengan pola hubungan sosial yang

¹² Koentjaraningrat.1997.*Koentjaraningrat & Antropologi di Indonesia*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm.9

¹³ Ibid , hlm.10

¹⁴ Selain itu permasalahan petani bukan hanya mencakup pemenuhan lumbung padi sebagai kebutuhan dasar. Lebih dari itu, Wolf (1996) memaparkan kebutuhan-kebutuhan lainnya dari petani yaitu selain untuk mempertahankan suatu minimum kalori, juga terdapat suatu dana penggantian, dan dana seremonial.

pantas, wajar, dan adil. Menurut Scott, prinsip “*norm of reciprocity*” dan jaminan subsistensi minimal berada dalam pola hubungan itu. Redfield (1985:88) melukiskannya sebagai suatu “kehidupan yang baik” dari nilai-nilai petani yang berlaku. Menurut George Stuart, seperti dikutip Redfield (1985:90), salah satu pola hubungan itu adalah sikap intim dan hormat terhadap tanah yang menganggap pekerjaan pertanian sebagai pekerjaan yang baik dan kegiatan komersialisasi sebagai pekerjaan yang tidak terlalu baik. Ia menyebutnya sebagai “rasa samar-samar tentang sesuatu yang pantas dihormati di dalam tanah dan kegiatan pertanian”.¹⁵

Bagi petani yang seluruh hidupnya tergantung dari hasil tanah garapan, tanah dianggap sebagai tanah pusaka (*heirloom land*) dan tidak sekadar simbol apalagi mata dagangan (*commodity*). Dilihat dari cara-cara penguasaan dan perlakuan petani atas tanah – dan bukan dari kepemilikan tanah – terlihat adanya kedekatan hubungan petani dengan tanah sebagai aset hidupnya. Pola relasi antara tanah dan kehidupan petani tersebut oleh Redfield digambarkan sebagai suatu dunia yang dipenuhi sikap hidup tipikal.¹⁶ Dalam arti, tanah adalah sumber penghidupan petani yang utama walaupun bukan berarti kepemilikan tanah kemudian menjadi sesuatu yang secara khusus menjadi tuntutan.

Perubahan yang disebabkan oleh adanya intervensi dari luar seperti pembangunan seringkali menimbulkan situasi yang mengancam kestabilan subsistensi mereka. Dengan adanya realitas sosial dari tingkat krisis subsistensi bagi kebanyakan petani-penanam, maka menurut Scott (1996:26) sangat masuk akal apabila mereka menganut apa yang oleh Roumasset disebut prinsip “dahulukan selamat”/ *safety first*. Petani akan mengesampingkan pilihan-pilihan yang meskipun memberikan harapan akan mendatangkan hasil bersih rata-rata yang lebih tinggi, tetapi mengandung resiko-resiko kerugian

¹⁵ Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni. 1997. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung: Yayasan Anatiga, hlm.7

¹⁶ Ibid, hlm.17

yang besar yang dapat membahayakan subsistensinya.¹⁷ Prinsip ini menegaskan bahwa orientasi subsistensi merupakan pola hidup petani. Baik pola-pola pilihan maupun nilai-nilai yang dijadikan dasar untuk petani-petani itu untuk melakukan pilihan menunjukkan bahwa resiko-resiko subsistensi senantiasa merupakan pokok pemikiran yang utama. Tujuan yang paling penting adalah “kepastian” dan “pangan serta uang untuk hidup”(Romana & Frank Lynch dalam Scott 1996:76).

Pendekatan *moral economy* dimulai dalam kajian Thompson, yang terfokus lebih luas pada kelas-kelas miskin di abad 18-an di Inggris – petani dan non-petani (Kurtz,2000). Kurtz memiliki dua definisi: norma dan integritas dalam komunitas, dan kehadiran subordinasi pada kelas-kelas lokal yang dominan. Thompson (dalam Kurtz,2000) berpendapat bahwa kota/wilayah yang kecil mengandung perasaan mereka terhadap “hak-hak tradisional dan adat istiadat” yang mana semua anggota komunitas menyadarinya. Scott berada dalam ranah yang sama, melihat petani sebagai individu-individu yang “hidup dalam desa yang kecil dan secara relatif homogenus dimana kebanyakan kehidupan mereka diatur atau diperintah oleh adat lokal”. Petani, secara langsung dikontraskan dengan pekerja kota, memiliki norma-norma komunal, keyakinan dan sejarah yang membentuk inti dari identitas mereka. Magagna (dalam Kurtz:2000) menambahkan bahwa untuk petani ikatan ruang (desa) membentuk struktur sosial agrarian yang sangat alami dan bermakna. Hal ini merupakan tipe ideal. Meskipun demikian komunitas tradisional mempunyai karakteristik kebudayaan individualistik yang substansial. Kritikanya adalah apakah norma-norma desa cukup penting untuk dilihat sebagai pedoman petani berperilaku.

¹⁷ Scott juga menyertakan adanya anggapan bahwa satu konservatisme yang alami dari petani ini menimbulkan satu sikap yang lebih menyukai apa yang lebih pasti dan lebih dapat diramalkan atas satu alternatif yang mengandung unsur resiko yang lebih besar. (Janus B. Hendry:1964)

Sebagai contoh, dalam hubungan ini, Lucien Hanks menandakan bahwa tujuan operasional petani-petani desa di Muangthai adalah untuk mempunyai pada akhir tahun persediaan padi yang cukup untuk makan sampai panen berikutnya. Prinsip “dahulukan selamat” itu juga terlihat jelas pada pernyataan-pernyataan yang lazim bahwa petani Asia Tenggara enggan berusaha mencari untung, apabila hal itu berarti mengacaukan kegiatan-kegiatan subsistensi yang rutin yang sudah terbukti memadai di waktu yang lampau. (Lihat Scott, 1996:33)

Namun demikian, meskipun petani terkesan mengurung diri dalam lingkup kebutuhan subsistensinya, bukan berarti mereka tidak menjalin hubungan dengan masyarakat di sekitarnya. Redfield (1985) mengajukan konsep *peasant community* yang olehnya didefinisikan sebagai suatu "... masyarakat kecil yang tidak terisolasi, dan tidak memenuhi semua kebutuhan hidup penduduknya, tetapi yang di satu pihak mempunyai hubungan horizontal dengan komuniti-komuniti petani lain di sekitarnya, tetapi di pihak lain juga secara vertikal dengan komuniti-komuniti di daerah perkotaan".

Kita juga tidak bisa melepaskan aspek ekologis dalam menganalisis permasalahan yang menimpa petani. Sebagaimana yang dipaparkan Redfield bahwa hubungan yang terjalin antara petani dan tanah/ lahannya merupakan hubungan dengan kualitas yang intim. Dengan adanya pembangunan yang membawa perubahan dalam lingkungan dan kehidupan petani, akan menuntut petani untuk melakukan upaya-upaya adaptasi yang teraktualisasikan dalam bentuk respon-respon yang terkandung dalam variasi perilaku.

Masalah abadi kaum tani adalah masalah mencari keseimbangan antara tuntutan-tuntutan dari dunia luar dan kebutuhan petani untuk menghidupi keluarganya. Dengan demikian, eksistensi kaum tani tidak sekedar melibatkan suatu hubungan antara petani dan bukan petani, melainkan suatu tipe penyesuaian (adaptasi), satu komunikasi, sikap-sikap dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menopang petani dalam upayanya mempertahankan diri dan sesamanya di dalam satu tatanan sosial yang mengancam kelangsungan hidup mereka (Wolf:1996).

Menurut Bennet (1996) adaptasi adalah sebuah cara mengkonseptualisasikan proses-proses yang merupakan kesatuan beberapa tingkat atau dimensi dari masalah penggunaan dan penyalahgunaan sumber daya. Secara perilaku, adaptasi melibatkan sebuah kontradiksi : toleransi terhadap kondisi (konotasi merubah secara aktif) dan ketidakpuasan (konotasi merubah secara pasif). Dalam beberapa kasus, toleransi terhadap kondisi tidak pernah membentuk sebuah batas yang *absolute* atau *stopping point* berupa

aspirasi: cepat atau lambat pergerakan terhadap kondisi yang lebih baik atau perubahan akan ada, biasanya dalam bentuk pergerakan politik dan ekonomi.

Adaptasi ketika didefinisikan sebagai peniruan (*coping*) perilaku menjadi sebuah nilai positif yang umum dalam keberadaan manusia. Adanya sebuah nilai yang tinggi yang terletak pada peniruan atau penyesuaian dalam semua masyarakat. Ini mungkin satu dari beberapa 'pola universal' yang antropolog telah kaji. Penting untuk membedakan antara tingkat adaptasi individu dan kelompok. Tingkat individu difokuskan pada proses perilaku, dan kata kuncinya adalah *coping*. Sehingga, secara sederhana individu *deal*/setuju dengan keadaan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan/butuhkan (merubah secara aktif) atau untuk menerima situasi tersebut (merubah secara pasif). Ketika dia meniru perilaku yang diambil dari karakter yang terpola dan dicontoh sehingga dapat dikomunikasikan kepada yang lain, bisa disebut strategi atau strategi adaptasi.

Perilaku atau tindakan dalam merespon perubahan akibat pembangunan ini didasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki. Vayda (1983:265-266), memberikan penawaran alternatif pendekatan saat mencermati proses terjadinya perubahan di masyarakat, melalui analisa kontekstualisasi progresifnya.¹⁸ Pendekatan ini melibatkan sebuah fokus pada aktifitas manusia yang signifikan atau interaksi masyarakat-lingkungan dan penjelasan penempatannya secara progresif pada konteks lebih luas dan lebih padat. Dengan pendekatan ini, juga digambarkan bagaimana unit-unit merespon masalah lingkungan dan peluang-peluang yang bisa bergeser dari individu-individu pada bentuk-bentuk tingkatan kelompok dan individu yang bervariasi.

Penjelasan kontekstual yang disajikan oleh Tjitradjaja (2006) merujuk pada pentingnya dua hal dalam menjadikan tindakan sebagai objek analisis.

¹⁸ Kurnianto, Danu.2010. Dinamika Pengetahuan dan Praktik Konservasi Varietas Padi Gunung Pada Komunitas Petani Ladang Desa Ritan Kalimantan Timur. Skripsi Sarjana tidak diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia. hlm.13

Yang pertama, fokus pada tindakan dan memprosesnya dengan mengidentifikasi tindakan-tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian dan kemudian mempertanyakan siapakah aktornya dan apa yang membuat mereka terlibat dalam tindakan tersebut. Sebagaimana Vayda dan McCay diskusikan untuk contoh unit-unit yang merespon masalah lingkungan dan kesempatan yang bisa bergeser/ berubah dari individu-individu pada bentuk-bentuk tingkatan kelompok dan individu yang bervariasi. Dalam keserasiannya dengan besarnya alam dari masalah atau kesempatan tersebut. Jadi, kita dapat melihat cara-cara tertentu manusia, melakukannya bersama-sama atau terpisah dan menggunakan teknologi yang tersedia, organisasi dan makna kebudayaan, merespon perubahan di lingkungan mereka.

Yang kedua, dengan memfokuskan permulaan penelitian kita pada tindakan daripada individunya. Kita bisa memeriksa konteks perubahan sosial dari sudut pandang semua aktor-aktor yang relevan, termasuk mempresentasikan para agen pemerintah pembangunan tersebut. Banyak kajian pembangunan pedesaan dan agrikultural sering menaruh banyak tekanan pada petani-petani desa, menjelaskan konteks-konteks dari aktor-aktor petani pedesaan. Mengapa dan bagaimana mereka menolak program/proyek pembangunan. Jadi, kita dapat melihat cara-cara tertentu manusia, melakukannya bersama-sama atau terpisah dan menggunakan teknologi yang tersedia, organisasi dan makna kebudayaan, merespon perubahan di lingkungan mereka (Tjitradjaja:1987).¹⁹

“Possible theoretical significance of the results of progressive contextualization can be seen thus to derive from the fact that it is suited to studying unstable and transitory phenomena as well as stable and persistent ones” (Vayda, 1983:278)

Vayda menunjukkan bagaimana pendekatan dan teorinya ini cocok untuk kajian tentang fenomena yang tidak stabil dan dan fakta yang

¹⁹ Kajian Tjitradjaja tentang pemindahan lahan pertanian akibat pembangunan Jatiluhur, Jawa Barat menunjukkan bagaimana unit-unit sosial merespon dan mengambil keuntungan dari peluang yang dihasilkan dari penggunaan lahan baru dari eksistensi sebuah bendungan atau *man made lake* dimulai dari petani-petani individual dan kemudian berkembang pada asosiasi petani dan kelompok pegawai-pegawai/pejabat-pejabat tinggi pedesaan (Tjitradjaja,1987).

mengandung ketidakstabilan, seperti kasus masyarakat petani di Bantarawi yang saya sajikan ini dimana mereka senantiasa berada dalam kondisi tidak pasti yang tentunya jauh dari gambaran stabil akibat pembangunan Bendungan Jatigede yang tertunda-tunda.

Menghadapi kondisi yang tidak stabil di lingkungannya tersebut, warga Bantarawi melakukan berbagai praktik berupa respon yang didasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki. Semuanya itu dapat digali melalui pendalaman memori dan pengalaman masyarakat. Jill Ker Conway (dalam Green:2004) menggunakan konsep *script* atau *templates*, dihubungkan dengan konsep psikoanalitik mengenai skema ketidaksadaran mental. Banyak cara manusia untuk membangun dan memperluas memorinya. Menurut Conway, banyaknya '*sites of memory*' membawa ahli sejarah untuk berpikir tentang tempat lain untuk memori dan transmisi identitas yang beroperasi secara simultan dan kompetitif dengan sejarah, yang disebut '*collective memory*'.

Alon Confino mendefinisikan memori kolektif secara lebih luas, yaitu sebagai 'representasi dari masa lalu dan membuatnya masuk ke dalam pengetahuan kebudayaan yang *dishare* oleh generasi berturut-turut dalam '*vehicles of memory*' seperti buku, film, museum, peringatan, dan yang lainnya.' Samuel Hynes menyatakan bahwa :

'Memory is the mental faculty by which we preserve or recover our pasts, and also the events recovered. Without that link - now reaching back to then - you have an image of the past in your mind, but it isn't memory but something else, a social construction, history' (Green, 2004:37)

Jika Conway merujuk pada terlepasnya peran individu dalam terbangunnya memori pada lingkup kolektif, maka Halbwach seorang sosiolog menawarkan pemikiran berbeda yang mana memori individual diuji dalam *setting* dialog dengan individu-individu lain dalam sebuah kelompok. Dalam kelompok ini Halbwachs menduga, memori yang paling awet ditujukan dengan banyaknya orang yang memegangnya. Akhirnya, dia menerima bahwa tidak semua individu di dalam sebuah kelompok akan mengingat kejadian yang sama atau dengan intensitas yang sama, dia mengusulkan bahwa

perlunya sebuah *'affective community'*/ kecenderungan komunitas untuk memastikan bahwa ingatan individu semata-mata memori tersebut selaras dengan yang lainnya. Jadi, memori individu berhubungan dan termasuk dalam memori kelompok atau kolektif (Green:2004).

Argumen Halbwachs tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Mihesuah (1996), yaitu anggota yang berbeda bisa memiliki interpretasi berbeda terhadap cerita yang sama, dan tidak semua orang dapat mengingat/*recall* secara akurat menyajikan cerita yang mereka perdengarkan di tempat pertama.

Mengacu pada permasalahan yang disajikan, yaitu pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda telah memicu banyak ketidaknyamanan bagi warga petani di Bantarawi. Pada akhirnya respon yang tercermin dalam pergerakan praktik-praktik/ tindakan warga Bantarawi dan bermuara pada aksi protes merupakan konsekuensi logis dari penderitaan yang ada. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa gerakan adalah sebuah reaksi terhadap suatu perubahan.²⁰ Menurut Landsberger dan Alexandrov ada lima sebab umum munculnya gerakan petani. Pertama adalah inkonsistensi status, kedua kemerosotan relatif, ketiga kemerosotan status masa lalu yang diharapkan sekarang dan ancaman masa depan, keempat kesadaran bersama tentang nasib yang dialami, kelima reaksi kolektif terhadap kedudukan yang rendah (Landsberger dan Alexandrov:1987 dalam Suhendar & Winarni,1997: 34). Penggusuran komunitas dan hak-hak petani oleh pemodal yang cenderung mementingkan pusat-pusat komersial atau kawasan industri, dan pecahnya struktur politik-ekonomi negara, merupakan perubahan-perubahan sosial yang menghasilkan gerakan petani akibat ketidakpuasan tersebut.²¹

Sementara itu, Scott melihat bahwa dorongan moral (*moral propulsion*) merupakan alasan utama munculnya gerakan petani sehingga reaksi tersebut memiliki kekuatan moral yang besar.²² Reaksi tersebut berupa

²⁰ Suhendar, Endang & Yohana Budi Winarni.1997.*Petani dan Konflik Agraria*.Bandung:Yayasan Anatiga, hlm.34

²¹ Ibid, hlm.34

²² Ibid, hlm.34

gerakan yang bersifat defensif dan bertujuan agar aturan-aturan tradisional yang menjamin keamanan ekonomi petani segera dikembalikan karena secara moral, hak tersebut menjamin kebutuhan-kebutuhan fisik manusia atas kelangsungan hidupnya. Prinsip moral tersebut adalah pola-pola dan aturan sosial yang pada dasarnya merupakan kebutuhan vital di dalam perekonomian petani dan sudah menjadi norma, sehingga ketika hak-hak masyarakat tersebut tidak terpenuhi, muncul kemarahan moral yang merupakan bagian integral dari pemberontakan petani. Sejalan dengan pendapat Scott tersebut, Wolf (1955:190) melihat bahwa gerakan-gerakan dan aksi protes yang dilakukan petani biasanya sederhana dan seringkali berpusat pada mitos tentang suatu tatanan sosial yang adil dan sama rata. Secara umum, gerakan atau reaksi muncul karena kondisi krisis akibat sistem nilai tidak sesuai lagi dengan realitas yang sebenarnya.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang saya gunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi partisipatif dan pengumpulan *life history* dari beberapa warga petani dusun Bantarawi. Teknik observasi partisipatif dilakukan untuk mendapatkan informasi, diantaranya mengenai struktur yang ada di masyarakat, pola-pola kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat (Malinovski dalam Kurnianto:2010). Dalam penelitian ini saya mencoba fokus mencari keterangan mengenai pengetahuan lokal, pengalaman hidup, serta praktik-praktik yang masyarakat miliki sebagai respon mereka terhadap pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda.

Saya mulai peka dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dusun Bantarawi sejak tahun 2009. Tepatnya pada bulan Agustus 2009 saat saya mengunjungi Bapak R dalam rangka silaturahmi hari raya Idul Fitri. Selama perjalanan saya tersebut, saya mulai menyadari banyak hal yang sudah berubah di dusun ini. Perubahan yang paling mencolok dan lekat dalam

ingatan saya adalah keberadaan bangunan-bangunan kosong yang warga sebut 'rumah hantu' yang sudah semakin menjamur.

Penelitian lapangan secara intens berlangsung dari bulan Januari – September 2011 di dusun Bantarawi desa Padajaya kecamatan Wado kabupaten Sumedang Jawa Barat. Lokasi ini khusus saya pilih bukan hanya karena merupakan desa dari mana saya berasal. Lebih dari itu jika dibandingkan dengan desa lainnya pun khususnya desa-desa di kecamatan Wado, desa Padajaya merupakan desa yang paling memprihatinkan. Jalan sebagai akses utama yang rusak dan semakin parah, jembatan yang semakin tidak layak dan membahayakan pengendara, dan kehidupan pertanian yang sebenarnya potensial menjadi semakin tidak pasti merupakan eksekusi yang kasat mata di desa ini. Kendati penelitian lapangan intens telah selesai, tapi saya tidak 'meninggalkan' lapangan. Saya masih menjalin komunikasi yang baik dengan menelpon kerabat di sana untuk mengetahui perkembangan isu yang ada.

Mengingat adanya perbedaan pengaruh yang signifikan pada tiap desa dari adanya pembangunan bendungan Jatigede ini, misalnya di desa Wado kecamatan Wado dengan sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang perniagaan tentunya akan berbeda dengan dusun Bantarawi dimana masyarakatnya bekerja sebagai petani. Mengapa kemudian dusun Bantarawi ini saya pilih sebagai fokus penelitian, karena memang yang saya sajikan dalam penelitian ini adalah praktik respon yang berkembang dari pengetahuan dan pengalaman hidup warga petani di dusun Bantarawi terhadap tertundanya pelaksanaan pembangunan bendungan Jatigede ini.

Dalam penelitian lapangan dengan ini, teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) dengan informan 5 keluarga petani khususnya generasi atas yang memiliki memori kronologis dari keberadaan proyek pembangunan bendungan Jatigede. Informan-informan ini saya temukan seiring penelusuran saya mengenai fenomena-fenomena yang timbul sebagai poin penting dari tertunda-tundanya proyek pembangunan bendungan Jatigede ini. Selain itu, peran-peran aktor lainnya

yang mendukung cerita mereka juga turut saya sajikan. Pada akhirnya penelitian ini tidak hanya fokus pada kegiatan pertanian sebagai satu-satunya aspek yang dipengaruhi oleh pembangunan, tapi saya menggambarkan respon mereka secara lebih luas (*holistik*) merujuk pada konteks-konteks berupa kejadian tertentu yang timbul sebagai pengaruh yang mereka rasakan dari adanya pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda ini.

...the ethnographic believe that an isolated observation cannot be understood unless you understand its relationship to other aspects of the situation in which it occurred, is called a holistic perspective. (Agar,1980:75)

Penelitian lapangan etnografis ialah kajian mengenai kelompok dan masyarakat sebagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Menurut Emerson (1995), ada dua pembedaan aktifitas di dalam metode ini yaitu, yang pertama etnografer masuk ke dalam sebuah *setting* sosial dan mengenal orang-orang yang terlibat di dalamnya; biasanya *setting* ini tidak diketahui secara mendalam sebelumnya. Etnografer berpartisipasi dalam rutinitas sehari-hari di *setting/* tempat penelitian ini, mengembangkan secara terus menerus relasi dengan masyarakat di dalamnya, dan mengamati semua yang terjadi. Istilah ‘observasi partisipan’ sering digunakan untuk mengkarakteristikan dasar pendekatan penelitian ini. Yang kedua, etnografer menulis secara rutin, secara sistemik apa yang diobservasi dan dipelajarinya sewaktu berpartisipasi dalam rentetan kehidupan sehari-hari dari *the others*. Jadi, peneliti menciptakan sebuah pengakumulasian rekaman tulisan dari observasi dan pengalaman-pengalaman ini. Dua aktifitas yang saling terhubung yang merupakan inti dari penelitian etnografi ini: pertama, partisipasi dalam beberapa dunia sosial yang tidak dikenal pada awalnya dan memproduksi tulisan laporan tentang dunia itu.

- ***Imersi***

Etnografer melakukan pendekatan pada aktifitas-aktifitas dan pengalaman sehari-hari dari *the others*, yaitu kelompok masyarakat yang ditelitinya. “Pendekatan” minimalnya memerlukan pendekatan secara fisik dan sosial pada rentetan aktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat, maka

saya berada di tengah-tengah masyarakat Bantarawi dan berusaha mengikuti setiap adegan kunci dari kehidupan mereka untuk mengobservasi dan memahami mereka. Tapi untuk melakukan pendekatan, ada komponen yang jauh lebih signifikan yaitu etnografer melihat dengan lebih dalam dengan cara imersi/ membaur di dunia *the others* untuk memahami pengalaman apa yang berarti dan penting di hidup mereka. Saya mengikuti aktifitas mereka sehari-hari dan mengamati apa saja yang mereka lakukan. Saya juga mengambil peran dalam beberapa acara seperti upacara keagamaan dan persiapan pernikahan. Dengan demikian, saya dapat melihat dari dalam bagaimana warga petani dusun Bantarawi menjalani hidupnya dan bagaimana mereka melaksanakan rentetan aktifitas mereka sehari-hari. Dengan demikian saya mendapatkan akses untuk mencair secara mudah dalam kehidupan warga masyarakat dusun Bantarawi dan mempertinggi sensitivitas untuk berinteraksi bersama mereka sebagai sebuah proses.

The ethnographer is interested in understanding and describing a social and cultural scene from the emic, or insider's perspective. The ethnographer is both storyteller and scientist; the closer the reader of an ethnography comes to understanding the native's point of view, the better the story and the better the science. (Fetterman,1989:12)

Imersi dalam penelitian etnografi, melibatkan dua hal dimana kita berada dengan masyarakat untuk melihat bagaimana mereka merespon kejadian yang mereka hadapi dan mengalami sendiri kejadian dan keadaan yang memberikan perkembangan bagi mereka.

In particular insist that field research involves "subjecting yourself, your body, and your own personality, and your own social situation, to the set of contingencies that play upon a set of individuals so that you can physically and ecologically penetrate their circle of response to their social situation, or their work situation, or their ethnic situation". (Goffman:1989 dalam Emerson,1995:2)

Lebih dari berpartisipasi, yang tak bisa diacuhkan adalah perlunya beberapa tingkatan dari ‘resosialisasi’.

Sharing everyday life with a group of people, the field researcher comes to enter into the matrix of meanings of the researched, to participate in their system of organized system of organized activities, and to feel subject to their code of moral regulation (Wax 1980 dalam Emerson, 1995:2).

Meskipun saya termasuk bagian dari mereka karena secara natural karena saya lahir di dusun tersebut. Akan tetapi sebelumnya saya tidak mengenal secara dekat keluarga-keluarga yang saya jadikan narasumber penelitian ini. Perkenalan saya sangat terbantu dengan status saya sebagai cucu Bapak R, *Lebé* di dusun ini. Bapak R membantu saya untuk dapat masuk ke lingkungan keluarga-keluarga ini. Meskipun pada awalnya mereka merasa canggung pada saya, tapi sedikit demi sedikit saya berusaha membaaur, diantaranya dengan cara mengobrol dengan bahasa yang saya dominasikan bahasa Sunda halus meskipun agak terbata dan masih dicampur-campur dengan bahasa Indonesia. Mereka pun kelihatannya dapat memaklumi hal tersebut. Saya berusaha mengeluarkan *basa-basi* seperti menyapa mereka saat saya lewat di depan rumahnya, pada saat mereka berkunjung ke rumah Bapak R, bertemu di jalan, warung, ataupun sawah. Saya juga memberikan perhatian khusus pada hal-hal pribadi yang mereka hadapi, seperti keluhan atau gosip/ *curhatan* tertentu yang mereka ungkapkan.

Sebagai bagian dari mereka yang sudah lama tinggal di Jakarta, saya merasa kembali ke dalam tengah-tengah mereka sebagai orang asing/ luar yang sama sekali tidak pernah bergabung dengan mereka dalam jarak yang sangat dekat sebelumnya. Walau tidak ekstrim, pada awalnya saya merasakan ada batas antara saya dan mereka. Maka dari itu, saya mencoba mengembangkan peranan saya selama melakukan penelitian ini dan meresosialisasikan diri saya agar mendapatkan tempat yang strategis di tengah-tengah mereka hingga akhirnya mereka menerima saya dan mampu berbagi secara terbuka kepada saya. Melalui partisipasi, saya melihat

secara dekat bagaimana masyarakat berjuang menghadapi ketidakpastian dan kebingungan akibat tertunda-tundanya proyek pembangunan Bendungan Jatigede ini.

- **Inskripsi**

Setelah beberapa lama tinggal di dusun Bantarawi untuk mengamati dan mengalami rutinitas warga Bantarawi terkait dengan respon mereka terhadap tertunda-tundanya proyek pembangunan bendungan Jatigede, saya menjauhkan diri dari *setting*/lapangan penelitian dan mulai menuliskan apa yang saya amati dan saya alami selama penelitian. Tulisan tersebut dituangkan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (*fieldnotes*).

As a result "the participation that the fieldworker gives is neither as committed nor as constrained as the native's" (Karp & Kendall 1982 dalam Emerson,1995:4).

Catatan lapangan adalah catatan/laporan ini menggambarkan pengalaman dan pengamatan saya sewaktu berpartisipasi secara intens dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. *Fieldnotes* ini berupa deskripsi yang melibatkan isu-isu berupa persepsi dan interpretasi. Sehingga perbedaan deskripsi tentang situasi dan kejadian yang sama adalah mungkin.

Menulis deskripsi catatan lapangan, tidak lebih dari menyalin 'fakta' tentang 'apa yang terjadi'. Menulis dengan melibatkan proses interpretasi dan pemikiran yang aktif ; mencatat dan menulis beberapa hal 'signifikan', mencatat tapi mengacuhkan yang lainnya yang 'tidak signifikan', dan melewati hal-hal lain yang mungkin signifikan. Hasilnya, kejadian yang sama dapat digambarkan untuk tujuan yang berbeda, dengan sensitifitas dan penekanan yang berbeda.

Dalam hal ini, penting untuk mengakui bahwa catatan lapangan adalah inskripsi tentang kehidupan dan wacana sosial. Geertz (1973) mengarakteristikan proses etnografi yang utama adalah menuliskan

wacana sosial, berupa kejadian-kejadian yang dialami dan momennya sendiri terhadap kejadian tersebut, ke dalam sebuah catatan, yang mana berada dalam inskripsi dan dapat dipertanyakan kembali.²³

Seperti halnya inskripsi, catatan lapangan adalah proses memproduksi dan merefleksikan dengan merubah/ mentransformasikan kejadian, orang, dan tempat yang disaksikan ke dalam kata-kata. Perubahan ini mencakup proses seleksi; etnografer menulis tentang hal-hal tertentu yang penting dan 'meninggalkan' yang lain. Penyajian ini merefleksikan dan menggabungkan sensitifitas, makna, dan pemahaman peneliti yang dikumpulkan dari pendekatan dan partisipasi dalam menggambarkan kejadiannya.

Ethnography as Van Maanen (1988:xi) insist, is "the peculiar practice of representing the social reality of others through the analysis of one's own experience in the world of these others". (Emerson,1995:10)

Catatan lapangan sebuah metode menangkap dan menyimpan pengetahuan dan pemahaman secara khusus distimulasi oleh kedekatan dan pengalaman jangka panjang. Sehingga catatan lapangan kadang menuliskan pemahaman dan pengetahuan yang belum lengkap, dengan memusatkan diri untuk imersi ke dunia lain. Tentu saja, diperlukan imersi yang mendalam – dan perasaan terhadap tempat mengasumsikan kekuatan imersi – yang memungkinkan etnografer menuliskan secara detail, konteks yang sensitif, dan informasi lokal dalam catatan lapangan yang Geertz (1973) sebut sebagai '*thick description*'.

Di atas adalah uraian bagaimana saya mengumpulkan data primer, sedangkan untuk data sekunder sendiri saya dapatkan dari kantor kecamatan Wado. Mengingat mantan Kuwu desa Padajaya sedang terjerat kasus hukum, maka perangkat desa tidak memberikan ruang bagi saya mendapatkan data-data penunjang. Bukan hanya bungkam, akan tetapi juga sulit ditemui. Kantor desa kerap kosong meskipun sedang hari dan

²³ Emerson, Robert.1995.*Writing Ethnographic Fieldnotes*.Chicago, hlm.8

jam kerja. Baik Bapak Kuwu dan pengurus desa lainnya lebih mudah ditemui di rumahnya masing-masing. Hal ini merupakan salah satu hambatan yang saya rasakan dalam penelitian ini. Hambatan lain yang saya temui adalah kurang maksimalnya fasilitas penerangan mengingat dusun ini cukup terpencil dan jalan utama yang kondisinya sudah rusak parah menyulitkan mobilisasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam empat bab, yaitu :

Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 berisi deskripsi tentang keadaan lingkungan kecamatan Wado dan desa Padajaya secara umum. Kemudian, gambaran lingkungan ini mengerucut secara rinci mengenai dusun Bantarawi yang menjadi fokus lokasi penelitian ini. Kondisi dusun dijelaskan dengan mencakup banyak unsur, yaitu komposisi kependudukan/ masyarakat, lingkungan fisik/ alam dan pola pemukimannya, bahasa, teknologi, mata pencaharian, pendidikan/ pengetahuan, religi, kesenian, dan organisasi sosialnya.

Bab 3 berisi narasi tentang cerita dan pengalaman kehidupan dari 5 warga petani yang secara khusus dipilih sebagai representasi keadaan warga dusun Bantarawi secara umum. Pengalaman yang diceritakan dan terlihat dalam tindakan mereka sehari-hari adalah refleksifitas dari apa yang dinamakan respon, dalam konteks menghadapi proyek pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda.

Bab 4 bagian yang mengulas refleksi teoritik. Apa yang diperoleh dari temuan lapangan, yaitu tentang bagaimana tindakan tercipta dari warga petani Bantarawi sebagai respon mereka terhadap tertundanya pelaksanaan bendungan, yang didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan warga petani asli dusun Bantarawi.

Bab 5 berisi kesimpulan dari penelitian ini.

BAB 2

DUSUN BANTARAWI : Satu Dusun di Pelosok Sumedang

2.1 Sekilas Desa Padajaya

Dusun Bantarawi merupakan salah satu dusun yang ada di desa Padajaya kecamatan Wado kabupaten Sumedang. Desa Padajaya merupakan salah satu desa yang kondisinya memperlihatkan akibat terkena dampak pembangunan bendungan Jatigede. Sejak adanya rencana proyek ini pada tahun 1960-an dan pelaksanaannya tertunda hingga saat ini, desa ini nyaris tidak lagi tersentuh pembangunan ataupun perbaikan secara fisik. Sehingga jelas kehidupan masyarakat di dalamnya pun ikut terombang-ambing karena tidak ada infrastruktur yang menunjang aktifitas kehidupan mereka. Jika dibandingkan dengan desa lain, khususnya desa-desa di kecamatan Wado, desa Padajaya merupakan desa yang paling tertinggal. Ketertinggalan desa Padajaya dapat terlihat dari kondisi jalan sebagai akses utama yang rusak dan semakin parah, jembatan yang semakin tidak layak dan membahayakan pengendara, dan kehidupan pertanian menjadi semakin tidak pasti.

Untuk menuju ke desa Padajaya kecamatan Wado ini saya naik bis Medial Sekarwangi dari terminal Kampung Rambutan. Bis merah yang biasa disebut MS ini ada beberapa yang rutenya Jakarta-Sumedang dan hanya ada 2 unit bis yang tersedia khusus rute Jakarta-Wado. Bis rute Jakarta-Wado ini hanya berangkat pada jam 12.00 WIB dan 14.00 WIB. Selain MS ada bis CBU yang hanya melayani rute Jakarta-Sumedang. Bis CBU yang berwarna hijau muda ini termasuk armada baru dibandingkan MS, kira-kira baru keluar dari 7 tahun yang lalu. Bis MS identik dengan bis yang sudah jompo, sering mogok di tengah jalan, kurang bersih, AC nya bocor, bannya pecah, dan lain-lain. Berbeda dengan CBU yang akhirnya menjadi alternatif yang sangat diminati karena tampilan dan fiturnya lebih baru dan bagus. Seiring dengan kebutuhan para penumpang MS pun ada banyak perbaikan dan peningkatan, bahkan ada penggantian armada baru. Sehingga saat ini baik CBU ataupun MS saat ini adalah bis yang sama nyaman dan selalu dipadati penumpang pada momen mudik.

Perjalanan saya tempuh sekitar 5-6 jam, Jakarta-Sumedang via Tol Cipularang ± 2 jam dan dari Sumedang ke Wado ± 3 jam. Keluar tol Cileunyi perjalanan berbelok ke kanan ke arah Sumedang-Wado. Saya melewati kampus IPDN, UNPAD, dan beberapa *icon* penting kota Sumedang di areal pusat kota, seperti Taman Endog (taman telur). Biaya naik bis yang langsung ke Wado Rp 40.000,- sedangkan yang ke Sumedang Rp 35.000,-.

Saya turun di tugu Wado dan naik ojek sekitar 20 menit menuju dusun Bantarawi. Jika tiba masih siang hari biasanya ongkos ojek hanya Rp 5.000,- , tapi jika sudah malam bisa Rp 10.000,- sampai Rp 15.000,-. Sekitar 4 tahun yang lalu masih ada mobil *omprengan* sebagai alternatif transportasi, namun semenjak kondisi jalan semakin rusak mobil *omprengan* tidak beroperasi lagi. Hanya ada mobil *omprengan* khusus anak-anak sekolah yang berangkat pukul 6 pagi. Meskipun diantara mereka ada yang masuk sekolah pada jam siang, mereka tetap berangkat pagi. Jika mereka terlambat sedikit saja, maka mereka akan tertinggal. *Omprengan* pagi ini sangat diminati, karena perbandingan ongkos yang lebih murah daripada ojek. Anak-anak hanya cukup merogoh kocek Rp 500,-, sedangkan ojek Rp 1.000,- untuk SD dan Rp 2.000,- untuk SMP dan SMA. Apalagi jarak dari dusun ini ke sekolah SDN Bojongsalam di dusun Gunung Penuh ada sekitar ± 1 km, sedangkan untuk SMP terhitung lumayan jauh karena terletak di desa Wado dan SMA di kecamatan Darmaraja.

Keadaan Wilayah Kecamatan Wado terletak disebelah Timur Ibu Kota Kabupaten Sumedang ± 32 Km. Luas Wilayah tercatat sekitar 73,34 km², dengan ketinggian dari permukaan laut 290 – 1.000 m. Batas – batas wilayah kecamatan Wado adalah sebagai berikut ;

Sebelah Utara	: Kecamatan Jatigede dan Darmaraja
Sebelah Selatan	: Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut
Sebelah Barat	: Kecamatan Darmaraja dan Cibugel
Sebelah Timur	: Kecamatan Jatinunggal dan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka.

Terdapat 11 desa yang berada di dalam wilayah administratif kecamatan Wado, yaitu : Cikareo Selatan, Cikareo Utara, Cilengkrang, Cimungkal, Cisurat, Ganjaresik, Mulyajaya, Padajaya, Sukajadi, Sukapura, dan Wado.

Wado menjadi pusat interaksi masyarakat desa dan 'kota'. Di tempat inilah kegiatan perniagaan berlangsung karena Wado merupakan pusat pasar bagi desa-desa di sekitarnya. Selain itu Wado juga menjadi akses vital yang menghubungkan mobilisasi desa ke kota dengan didukung oleh fasilitas terminal disertai dengan fungsinya sebagai jalur alternatif menuju Jawa Tengah via Tasikmalaya. Dengan adanya kantor kecamatan disertai adanya simbol khusus yaitu Tugu Wado, Wado juga menjadi pusat kegiatan politik. Tidak heran jika Wado memiliki magnet tersendiri, baik secara ekonomis ataupun politis bagi masyarakat disekitarnya.

Desa Padajaya terletak di selatan/kaler Tugu Wado yang berbatasan di dusun Buah Ngariung. Terdapat 2.463 jiwa dari 668 KK di dalam desa seluas 3,10 km² yang didominasi oleh areal persawahan ½ teknis seluas 136 Ha ini.²⁴ Desa Padajaya yang mencakup 4 dusun yaitu Sundulan, Pasir Leutik, Bojongsalam, dan Bantarawi ini dipimpin oleh seorang Kuwu (Kepala desa). Pada awalnya Ibu CU yang menjabat sebagai Kuwu di desa ini. Akan tetapi, dalam masa kepemimpinannya Ibu CU kerap ditimpa skandal, berupa masalah korupsi – termasuk disinyalir melakukan korupsi dalam pengukuran proyek Jatigede - hingga kasus asusila berupa perselingkuhan. Kendati demikian, Ibu CU masih mendapatkan tempat yang layak di hati para pendukungnya. Ibu CU sempat ditahan selama 18 bulan, dan saat ini desa Padajaya dipimpin oleh Pejabat Sementara (PJS) yang berasal dari dusun Sundulan, orang-orang menyebutnya Kuwu Carli. Yang saya amati, Kuwu Carli tidak selincah Ibu CU dalam memimpin masyarakat. Beberapa warga juga menyatakan Kuwu Carli terkesan *cuek* dan kurang tegas dalam memberikan arahan. Terkait penyelesaian masalah akibat proyek bendungan Jatigede, masyarakat merasa Ibu CU lebih sigap menanganinya dibandingkan Kuwu Carli yang seakan hanya berdiam diri tidak melakukan upaya apapun.

²⁴ Dokumen Profil Kecamatan Wado Semester 1 Tahun 2010

Dalam tugasnya Kuwu Carli dibantu oleh seorang Juru Tulis (Sekretaris Desa)/ Ulis Bapak Rustandi asal dusun Sundulan. Ulis berdampingan dengan *Jugul* yaitu kurir yang bertugas mengantar surat-surat/ dokumen dari desa ke kecamatan. Bapak Cecep sebagai BPD (Badan Pembantu Desa) yang bertugas mengurus masalah kebijakan. Untuk tanggung jawab masalah keamanan desa dipegang oleh Kulisi, yaitu Bapak D yang juga aktif mengikuti rapat *minggon* (rapat mingguan) di kecamatan. Selain itu, ada KaurKesra (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat)/ *Lebe'* yang menangani masalah pernikahan, perceraian, dan upacara kematian. Sedangkan untuk masalah pertanian, khususnya bagian distribusi pengairan merupakan tugas seorang KaurEkbang (Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan)/ *Ulu-ulu* yang dibantu oleh Waker (Wakil Kerja). Dalam menghadapi kasus pembangunan bendungan Jatigede ini ada Bapak Yono sebagai Kuasa Masyarakat dari divisi LPM (Lembaga Pelindung Masyarakat). PKK sebagai wadah pengembangan potensi dan kreatifitas warga, dikelola oleh ibu-ibu dan remaja putri. Sebagian besar pejabat desa ini berasal dari dusun Sundulan. Selanjutnya ada struktur *kapunduhan*²⁵ di bawahnya yang akan dijelaskan kemudian di bagian organisasi sosial dusun Bantarawi.

Dengan kondisi yang dari waktu ke waktu semakin memperhatikan ini, bisa dikatakan potensi desa Padajaya semakin menipis terlihat dari sedikitnya bahkan hampir tidak ada *input*/ sumbangsih secara material yang signifikan ke kecamatan jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Dari semua desa di kecamatan Wado hanya desa Padajaya yang kewajiban PBB-nya ditiadakan.²⁶

2.2 Dusun Bantarawi

Ada kisah khusus di balik nama dusun ini. Pada zaman penjajahan Belanda, para penjajah hendak menghancurkan dusun ini. Akan tetapi, usaha mereka untuk mem-bom dusun ini malah meleset ke dusun tetangga, yaitu Cidadap. Hal itu dikarenakan dusun ini tertutup oleh banyaknya pohon bamboo/*awi*, sehingga tidak terlihat sama sekali adanya kampung. Semenjak itu, dusun ini

²⁵ Dusun atau perkampungan

²⁶ Dokumen Profil Kecamatan Wado Semester 1 Tahun 2010

Kawentar Awi yang artinya tersohor/ terkenal oleh *awi*/ bambu, jadi disebut dusun Bantarawi.

2.2.1 Karakteristik Lingkungan

- Lingkungan Geografis

Dusun Bantarawi yang menjadi fokus penelitian saya ini terletak di desa Padajaya. Posisinya berbatasan dengan dusun Bojongsalam di sebelah utara/*kidul* dan dusun Cacaban (sudah masuk desa Sukakersa) di sebelah selatan/*kaler*. Dusun Bantarawi berada di dataran yang cukup tinggi dibandingkan dengan Bojongsalam. Arealnya merupakan kombinasi antara wilayah pemukiman, hutan, dan sawah.

Ada dua sungai yang menghimpit dusun ini, yaitu Sungai Cicaban di sebelah timur/ *wetan* dan Sungai Cimanuk di sebelah barat/ *kulon*. Kedua sungai ini merupakan sumber air yang sangat diandalkan oleh masyarakat untuk cuci (piring dan baju), mandi, memandikan ternak, pengairan sawah dan ladang, dan juga buang air. Ada juga yang mengangkut air untuk kebutuhan rumah dari sungai ini, karena hanya beberapa warga yang memiliki sumur atau pompa sendiri di rumah. Jika tidak kuat mengangkutnya sendiri, bisa memburuhkannya ke orang lain. Kendati bukan merupakan sumber air yang bersih dan sehat, tapi bagi mereka hal tersebut sudah merupakan kebutuhan, kebiasaan, dan ketergantungan. Pada musim penghujan mereka akan berbondong-bondong ke sungai Cicaban karena alirannya lebih kecil dan tidak curam, berbeda dengan sungai Cimanuk yang akan pasang cukup tinggi, mereka menyebutnya *ca-ah*. Maka dari itu, sungai Cimanuk hanya didatangi pada saat musim kemarau saja, alirannya jauh lebih tenang. Dapat terlihat bahwa Cimanuk merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat dusun Bantarawi.

Pada musim penghujan tanaman padi terhampar hijau. Namun, bukan berarti air cukup untuk pengairan. Para petani tetap harus menyedot air dari sungai dengan menggunakan mesin, untuk mengejar hasil panen yang optimal.

Masa *nyawah* berakhir di musim kemarau, maka sawah-sawah akan berganti menjadi ladang sayur mayur, seperti kacang tanah, terung, kangkung, oyong, timun suri, bawang, jagung (ditanam hanya di sela-sela kebun kacang), ubi jalar, dan tembakau. Selebihnya, masyarakat juga memiliki pohon buah-buahan seperti, mangga, jeruk, nangka, sirsak, jambu ketulok, jambu air, pepaya, pisang, *duwet*,²⁷ dan kelapa.

Selain sawah, wilayah dusun Bantarawi juga dominan ditumbuhi tanaman keras seperti jati, mahoni, dan bambu. Tapi semenjak masyarakat marak berlomba-lomba membangun 'rumah hantu' keberadaan pepohonan ini mulai berkurang. Lahannya berubah menjadi komplek 'rumah hantu' yang dibangun dengan menggunakan material kayu dari pohon-pohon ini. Dulu, ketika pulang sekolah terkadang saya melewati jalan pintas berupa pematang sawah dan hutan-hutan kecil ini. Meskipun agak seram tapi perjalanan pulang terasa lebih cepat dan kami tidak kepanasan. Tapi sekarang saya lihat banyak rumah-rumah kosong yang dibangun di semak-semak yang dulu sering saya lewati itu.

Warga masyarakat menyebutnya 'rumah hantu' alias rumah harapan tunai. Bangunan ini dibangun dalam banyak tipe. Bukan saja dalam bentuk rumah permanen ataupun semi permanen, tapi juga banyak yang membangun saung sekedarnya di tengah-tengah sawah mereka, kandang kambing atau ayam kendati tidak ada ternak yang mereka pelihara di dalamnya. Tidak sedikit bangunan yang dibangun di atas tanah yang kurang lazim seperti di areal pemakaman Gunung Penuh.

Pola pemukiman di dusun Bantarawi ini tidak ada penggolongan khusus. Ada yang istri ikut tinggal di keluarga suami dan ada juga suami ikut tinggal bersama keluarga si istri. Meskipun tidak serumah, biasanya mereka membangun rumah baru di dekat orang tua. Fenomena pembangunan bendungan Jatigede ini menambah marak pembangunan rumah-rumah baru, untuk mengincar penggantian ganti rugi. Jadi para keluarga baru yang menempati bangunan baru (di atas tahun 1986) ini, tidak jarang memiliki

²⁷ Semacam buah berry

orientasi lain yaitu untuk mendapatkan ganti rugi karena mengaku rumahnya dibangun di atas tanah orang tua yang terlewat.

- **Fasilitas**

Fasilitas yang ada di dusun Bantarawi antara lain sebuah *heleran*²⁸ yang saya temui pada saat memasuki dusun Bantarawi setelah melewati deretan sawah di kanan kiri jalan dusun Bojongsalam. Yang saya tahu dulu di dusun Bantarawi ini ada dua *heleran*. Selain yang ada di perbatasan dusun Bantarawi dan Bojongsalam di sebelah utara tadi, *heleran* juga ada di wilayah RT 02, tepat di turunan menuju Bantarawi Landeuh. Sewaktu saya bersekolah dulu²⁹, saya seringkali berjalan kaki melewati jalan pintas ke hutan kecil dari belakang *heleran* ini. Namun, saat ini *heleran* Bantarawi Landeuh ini sudah tidak ada dan digantikan oleh ‘rumah hantu’ yang sudah hampir rusak, karena dibangun non-permanen dengan kayu dan bambu. Sehingga sudah banyak bagian-bagian yang lumpuh karena dimakan rayap.

Selanjutnya ada SDN Bojong Salam yang masih terletak di wilayah RT 01. Mayoritas anak-anak yang bersekolah di sini berasal dari desa Padajaya. Akan tetapi ada juga sebagian yang berasal dari dusun Cacaban³⁰ yang sudah masuk wilayah desa Sukakersa. Ini satu-satunya sekolah yang ada setelah SDN yang saya lihat di desa Buah Ngariung dan desa Sukakersa. Untuk berangkat ke sekolah, murid-murid masih banyak yang berjalan kaki, ada juga sebagian yang lebih memilih naik angkutan umum khusus anak sekolah yang hanya berangkat jam 6 pagi dengan ongkos Rp 500,-, atau jika terpaksa mereka naik ojek, ongkosnya Rp 1.000,- untuk anak SD. Memang sejak kondisi jalan yang semakin rusak dan tidak layak dilewati kendaraan beroda empat karena terbengkalai dengan adanya proyek bendungan ini, angkot tidak lagi beroperasi. Sehingga ojek-ojek pun merajalela. Hanya

²⁸ Tempat penggilingan padi

²⁹ Saya sempat bersekolah di dusun Bantarawi selama 2 tahun, yaitu kelas 2 sampai dengan kelas 4 di SDN Bojongsalam. Sehingga saya masih punya gambaran perbandingan kondisi paling tidak pada saat saya sekolah dulu (tahun 1998-2000) dengan keadaan saat ini.

³⁰ Dusun Cacaban sudah masuk ke wilayah desa Sukakersa, tapi letaknya berbatasan dengan dusun Bantarawi bagian selatan. Kedua dusun ini dibatasi oleh aliran sungai Cicaban yang menjadi pusat aktifitas MCK warga dari kedua dusun tersebut.

angkutan khusus pasar yang biasanya menjemput Bi Entin pukul 4 pagi dan anak sekolah pukul 6 pagi. Untuk SMP dan SMA ada di desa Buah Ngariung dan Wado. Dede Iya yang duduk di kelas 1 SMA selalu berangkat pagi untuk bisa ikut *omprengan* ini sampai ke Wado.

Melewati sekolah SDN Bojongsalam, banyak kenangan yang terlintas di dalam benak saya. Saat itu saya duduk di bangku kelas 2. Saya masih bisa mengingat betul penilaian saya pertama kali memasuki sekolah ini. Bangunan sekolah ini berbentuk leter L dengan halaman yang tidak begitu luas untuk upacara bendera sekaligus praktek olahraga dan arena bermain murid-murid pada saat jam istirahat. Di halaman itu terdapat tiang bendera dan sebuah pohon beringin besar yang guguran daun keringnya selalu memenuhi seluruh areal lapangan. Setiap jenjang kelas masing-masing hanya satu ruangan. Ruangan paling ujung di utara adalah toilet guru dan murid yang masing-masing hanya satu kamar. Dilanjut ruang kelas 1-4 yang berderet dan dipojok ada ruang guru yang sering disebut ruang dewan. Di sebelah ruang guru ada ruang kepala sekolah dan wakilnya. Dua ruangan setelah itu adalah ruangan kelas 5 dan kelas 6.

Sudah merupakan tradisi sekolah ini secara mendadak anak-anak muridnya dididik mandiri sejak dini. Bagaimana tidak, dari siswa kelas 1-6 sudah merupakan tugas rutin sebelum masuk kelas masing-masing dan memulai pelajaran untuk melaksanakan piket membersihkan kelas. Tanpa terkecuali jadwal giliran piket dibuat dari hari senin-sabtu. Saya sebagai murid baru jelas merasa *shock* dengan peraturan ini. Bersekolah di Jakarta tidak ada tuntutan membersihkan kelas dan sebagainya. Akan tetapi disini, saya bersama murid perempuan yang bertugas piket harus membawa ember kecil yang sudah berisi air dari rumah dan selembar kain lap pel yang biasanya dari baju yang sudah tidak terpakai. Cukup berat memang karena perjalanan ke sekolah sekitar 1 km, dan kami biasanya berangkat pukul setengah 6 pagi dengan berjalan kaki.

Tidak ada sumber air yang bisa diandalkan untuk mengepel dan mengisi bak di toilet, maka saya dan teman-teman harus mengambil air di

saradan, yaitu sebuah sumber mata air yang agak besar di sawah tepat di pinggir jalan pada saat memasuki perbatasan dusun Bantarawi-Bojongsalam. Berjalan kaki sejauh 500 m sambil menjinjing ember kecil, dan membawanya kembali ke sekolah dengan air yang penuh. Untuk mengisi bak di toilet bisa sampai 3-4 kali bolak-balik. Sebenarnya ada sumur warga di belakang sekolah kami, tapi sayang pemiliknya pelit.

Saya pribadi agak malas tiap kali Jumsih (Jumat Bersih) dilaksanakan karena harus membersihkan seluruh lingkungan sekolah, termasuk halaman tempat kami upacara dan bermain. Pohon beringin yang sangat rindang, selain membuat suasana sekolah teduh juga membuat kami letih untuk membersihkan daun-daun kering yang berjatuhan. Sampai saat ini, kegiatan tersebut masih dilakukan. Malah saya dengar orang tua murid yang sekarang ini mengusulkan kepada pihak sekolah untuk mencari tenaga kebersihan, sehingga anak mereka tidak perlu melakukan piket kelas yang sangat melelahkan terutama untuk kelas 1 dan 2. Para orang tua murid rela mengeluarkan biaya tambahan untuk hal tersebut. Sayangnya belum ada tanggapan yang positif dari pihak sekolah.

Banyak perubahan yang saya lihat, meskipun saya hanya melihat sekolah ini dari luar. Pohon beringin besar itu susah tidak ada lagi. Sekolah jadi terkesan gersang dan lebih panas. Bi Juarsih masih setia membuka lapak makanan yang anak-anak sebut sebagai kantin mereka. Tidak ada jajanan aneh-aneh yang dijualnya, hanya macam-macam gorengan, makanan ringan seperti chiki berhadaiah, permen, dan minuman dingin berwarna seperti sirup atau Pop Ice. Rumahnya tepat di sebelah bangunan sekolah sehingga tidak terlalu repot bagi Bi Juarsih untuk membuka tutup lapak dagangannya. Dia berjualan hingga siang hari, sampai semua siswa pulang sekolah sekitar jam 11. Setelah dzuhur Bi Juarsih berjualan di madrasah pengajian anak-anak didikan Bapak R di Bantarawi Tonggoh.

Pemakaman umum terletak agak jauh di belakang SDN Bojongsalam dan ada juga di puncak Gunung Penuh. Bahkan di puncak Gunung Penuh ini konon ada makam yang dikeramatkan dan sering diziarahi oleh para

pendatang ataupun masyarakat lokal. Saya juga sempat mendengar adanya cerita bahwa makam Gunung Penuh ini dijaga oleh sesosok macan putih. Saya pribadi masih merasa merinding jika lewat ke Gunung Penuh ini, kendati sudah banyak 'rumah hantu' yang dibangun di sekitar area pemakaman tersebut.

Di dusun Bantarawi juga terdapat balai pertemuan yang seringkali dipakai untuk kegiatan posyandu. Kegiatan posyandu, seperti penimbangan, imunisasi, dilaksanakan setiap tanggal 17 rutin tiap bulan. Dulu, balai dusun ini dijadikan TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an) untuk anak-anak mengaji. Entah mengapa jadi alih fungsi ditambah lagi kurang terawat. Kegiatan TPA dipindahkan ke mushola Ar-Rahman yang dikelola oleh Bapak R dan menantunya Bi Cich.

Balai pertemuan tersebut hanya dipakai untuk kegiatan insidental, seperti posyandu atau penyuluhan kesehatan. Seperti yang terjadi pada saat kunjungan ketiga saya. Pada saat itu sedang ada penyuluhan kesehatan gratis. Kabarnya semua penyakit bisa dikonsultasikan, tapi ada juga yang berkata hanya khusus penyakit mata. Warga pun berbondong-bondong menuju balai pertemuan. Mayoritas warga menderita sakit di bagian kaki dan para lansia juga mengeluhkan mata mereka. Seperti Nini Minah, yang mengaku mengidap katarak dan infeksi rahim. Setelah saya ikuti ternyata yang memberikan penyuluhan bukanlah seorang ahli kesehatan melainkan semacam promosi MLM produk kesehatan. Produk ini dijual kepada warga seharga Rp 130.000,- sedangkan harga di Jakarta hanya Rp 100.000,-. Untuk mengakses fasilitas pengobatan, masyarakat harus ke klinik atau puskesmas di Wado. Itu pun jika memang masyarakat merasa penyakitnya sudah serius sampai tidak bisa beraktifitas. Jika hanya pegal-pegal atau flu biasanya mereka memanggil Emak Encih untuk memijat. Sedangkan jika terluka karena benda tajam seperti sabit, pada saat menyabit rumput misalnya, mereka langsung mengobatinya sendiri dengan getah dari pepohonan.

Untuk mengakes kebutuhan pokok seperti berbelanja keperluan dapur secara lengkap harus ke pasar Wado. Sedangkan untuk kebutuhan ringan

warga bisa membelinya di warung. Ada 8 warung yang tersebar di dusun ini, yang terhitung paling besar dan cukup lengkap adalah warung Bakso Inul. Warung ini berada di seberang rumah Akung yang katanya sempat menjadi kafe remang-remang. Mang Emen begitu akrab pemilik warung ini dipanggil. Memang sudah turun temurun Mang Emen berjualan bakso, ayah dan anaknya juga berjualan bakso. Bakso yang dibukanya diberi nama Bakso Inul, karena bertepatan dengan bumungnya penyanyi dangdut Inul Daratista. Sehingga bisa mengundang ketertarikan masyarakat untuk membelinya. Selain berjualan bakso yang harganya Rp 5.000,-/ porsi, Mang Emen juga menjual perlengkapan rumah tangga seperti sabun, pasta gigi, dan sebagainya, bermacam-macam jajanan ringan, dan juga minuman keras merk lokal. Warung Inul ini juga menjadi tempat tongkrongan anak-anak muda yang *me-gojek*.

Akan tetapi untuk masalah kebutuhan dapur seperti sayuran, warga masih harus membelinya di pasar Wado dengan harga yang relatif agak tinggi. Bahkan untuk cabai dan bawang harganya masih terasa lebih murah di Jakarta. Hasil kebun mereka tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sampai pada akhirnya mereka harus membeli beberapa bahan tambahan untuk memasak di warung. Seperti Bi Entin yang membuka warung di rumahnya, dia menjual banyak makanan ringan, lauk matang, gorengan – yang bisa langsung ludes pada jam 6 pagi - , kebutuhan dapur, perlengkapan mandi, dan bakso yang khusus pada hari lebaran saja. Meskipun tidak lengkap warung ini menjadi andalan masyarakat Bantarawi khususnya RT 03 dan 04. Terutama, keluarga Bapak R karena letak rumahnya berdekatan.

2.2.2 Karakteristik Sosial

- Organisasi sosial

127 KK di Dusun Bantarawi dipimpin oleh seorang Kadus (Kepala Dusun) yang disebut *punduh* yaitu Bapak Wardi. Dalam pimpinannya ini Punduh Wardi membawahi 1 RW, RW diketuai oleh Bapak Undi dari RT 03.

RT 01 diketuai Bapak Tarya, RT 02 oleh Bapak Wahyu, RT 03 Bapak Karim, dan RT 04 oleh Emak Uwat. Selain itu, ada DKM (Dewan Keamanan Masjid) yaitu Bapak R, yang bertugas menangani masalah keagamaan dan bertindak sebagai *Lebe'* di tingkat dusun. Sesebuah yang dulu menempati posisi sebagai Kadus juga masih dihormati sebagai penasihat dan semacam *informal leader*.

Dalam prakteknya, perangkat dusun tidak berjalan sebagaimana idealnya sebuah kekuasaan/ kewenangan terstruktur. Ada *overlapping power* yang seringkali menyebabkan adanya *missed information* atau *transfer error* dalam distribusi arahan ke masyarakat. Diantaranya adalah diakibatkan penunjukkan posisi RT dan RW pada individu yang kurang tepat karena kurang berkompeten. Jika timbul kesalahan tidak jarang saling tuding terjadi antar aktor dalam perangkat ini. Selain itu, perbedaan ini juga dipicu oleh terbaginya masyarakat dusun Bantarawi ke dalam dua kubu, yaitu yang pro Ibu CU (bagian *wetan* dan *kidul*) dan yang kontra Ibu CU (bagian *kulon* dan *kaler*).

Dari segi kekerabatan, jika ditelusuri keluarga yang satu dengan keluarga yang lain masih merupakan kerabat dekat dan ada pertalian darah. Namun demikian, pernikahan endogami tidak lagi berlaku di dusun ini. Kebanyakan dari mereka memilih jodoh dari luar kerabat dekat.

- Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dusun Bantarawi adalah bahasa Sunda. Bahasa Sunda ini ada yang halus dan ada yang kasar. Bahasa Sunda yang halus biasa digunakan oleh orang yang lebih muda untuk berbicara dengan orang yang lebih tua. Tapi, tidak jarang saya menemukan seorang anak yang berbicara dengan orang tuanya dengan menggunakan bahasa standart orang tua. Seperti "*cokot/ nyokot*" yang dalam bahasa halus "*candak/ nyandak*" artinya ambil/ mengambil. Menurut penuturan ibu yang sempat saya tanya, ternyata pada saat umur si anak sudah bisa digolongkan dewasa perubahan tata bahasa yang mereka gunakan wajar saja terjadi.

Kebanyakan dari mereka juga sudah lancar berbahasa Indonesia. Hal ini pengaruh dari cukup kencangnya arus urbanisasi dari desa ini ke kota. Banyak yang merantau ke Jakarta bahkan ke luar pulau Jawa. Ditambah lagi anak-anak umur sekolah juga mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia dari sekolahnya. Seperti Opa, anak pertama dari Ibu Yayah dan Bapak Ade yang baru duduk di bangku kelas 3 SD bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan cukup fasih kepada saya.

- Pengetahuan/ pendidikan

Terkait dengan tingkat pendidikan, orang tua-orang tua yang notabene generasi pertama merupakan lulusan sekolah rakyat atau pendidikan dasar. Sedangkan di generasi kedua rata-rata adalah lulusan SMP-SMA. Di generasi ketiga, yaitu anak-anak generasi teranyar kebanyakan lulusan SMA/ SMK. Sekalipun ada yang kuliah hanya cucu sesepuh kampung, Bapak AN dan Bapak R. Ada juga yang sempat menempuh bangku kuliah seperti yang dialami pengajar-pengajar di PAUD Baiturrahman.

Penekanan terhadap pendidikan di aspek agama cukup kuat. Terbukti dengan diharuskannya anak yang mau masuk SMP, sudah memperoleh ijazah dari MDT (Madrasah Diniyah Awaliyah) yang dinaungi langsung oleh Departemen Agama. MDT di dusun Bantarawi ini dikelola oleh Bapak R dan menantunya Bi Cicih. Di pengajian ini sendiri terdapat tingkatan-tingkatan khusus. Anak yang bersekolah di bawah kelas 3 SD masuk kategori TPA, kelas 3-6 SD masuk kategori MDT. Anak-anak yang sudah lulus SD, diharapkan dapat membantu mengajar adik-adik yang masih kecil. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka malah tidak lagi datang untuk mengaji.

Keberadaan madrasah ini mulai tergeser dengan dibangunnya PAUD Baiturrohman di balai dusun, yang biasanya dipakai untuk penyuluhan kampung dan posyandu. Bagaimana tidak, untuk membayar iuran pengajian sebesar Rp 5.000,-/ bulan banyak yang membayar semampunya atau bahkan tidak bayar sama sekali dengan alasan tidak mampu. Sedangkan untuk masuk PAUD iurannya sebesar Rp 1.000,- tiap kali datang sama dengan sekitar Rp

25.000,-/ bulan jika setiap hari aktif masuk. Saat ini murid di PAUD berjumlah 12 orang. Fasilitas di PAUD ini saya lihat hanya sekedarnya, bangku-bangku kayu, tidak ada fasilitas bermain, hanya ada hiasan-hiasan origami dari kertas warna-warni yang disangkutkan pada dinding kawat. Di dinding lainnya terdapat gambar-gambar hewan yang dilengkapi dengan keterangan nama hewannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain itu juga ada poster-poster seperti huruf abjad, angka-angka dan operasi hitungan sederhana. Pengajarnya pun dicari secara mendadak, dan saat ini dipegang oleh Mang Iwan (lulusan D3) sebagai ketua PAUD, dan istrinya, Teh Susi (kuliah tapi tidak lulus) sebagai pengajar, mereka tinggal di Bantarawi Landeuh.

Program pendidikan non formal yang baru-baru ini diadakan adalah kursus menjahit yang dilaksanakan di balai desa, Bojongsalam. Dalam rangkaian kursus ini terdapat ujian yang dilangsungkan di Sumedang sehingga keterampilan para peserta dapat tersertifikasi.

Sebagian warga masyarakat dusun Bantarawi sudah mulai terbuka untuk keharusan memiliki pendidikan yang tinggi. Akan tetapi, hal tersebut tidak lantas mengurangi antusiasme para orang tua untuk menikahkan anak-anaknya dalam usia yang masih muda. Terutama untuk anak-anak perempuan. Masih banyak yang berpandangan bahwa meskipun sekolah tinggi, anak perempuan ujung-ujungnya pasti ke sumur, dapur, dan kasur. Atau yang mereka sebut dengan '*pondok langkah*'. Kesuksesan seseorang masih dipandang dalam segi material yang real, dan pendidikan masih menjadi determinan ketiga setelah harta/ kekayaan materi dan jodoh.

- Teknologi

Dalam kegiatan pertanian, masyarakat dusun Bantarawi sudah tidak sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Mereka merasa lebih terbantu dengan penggunaan mesin, seperti traktor dan mesin sedot air. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan modal agar

memiliki mesin sendiri. Untuk yang tidak memiliki modal, mereka akan menyewa mesin.

Kendati demikian, ada beberapa teknik yang masih dikerjakan dengan cara tradisional. Misalnya, *ngagasrok* yaitu membersihkan rumput di sela-sela tanaman padi pada saat padi baru-baru ditandur atau ditanam. Untuk *ngagasrok* mereka menggunakan alat *gasrokan* yang terbuat dari kayu, pegangan yang memanjang dengan diberi banyak paku-paku tajam di bagian alasnya agar rumput-rumput dapat terangkat. Jika *ngagasrok* dilakukan tepat setelah *tandur*, maka saat tanaman padi sudah mulai agak tinggi dan kebutuhan air di sawah agak berkurang rumput-rumput liar akan dibersihkan dengan cara dicabut manual oleh tangan, atau yang disebut *ngarambet*. Selain itu mereka juga menggunakan sabit untuk mencari rumput untuk hewan ternak mereka.

Sedangkan dalam konteks rumah tangga, hampir semua warga sudah menggunakan tabung gas 3 kg untuk keperluan memasak. Tabung dan kompor ini didapatkan cuma-cuma dari program pemerintah. Namun demikian, warga juga masih menggunakan *hawu* atau tungku yang terbuat dari batu. Seakan tidak bisa lepas dari cara memasak tradisional ini, selain bertani dan mencari rumput untuk ternak warga masih harus mencari kayu bakar ke hutan untuk memasak. Kompor gas biasanya hanya dipakai untuk memasak lauk atau makanan yang sifatnya praktis. Sedangkan untuk menanak nasi dan merebus air mereka menggunakan tungku.

Tidak sedikit dari masyarakat di dusun ini juga memiliki perabotan elektronik tersier seperti kulkas dan *rice cooker*. Bisa dibayangkan masyarakat dusun Bantarawi bukanlah termasuk masyarakat yang terisolasi dari perkembangan zaman. TV ada di setiap rumah, dan semua masyarakat juga memiliki telepon genggam untuk kemudahan berkomunikasi.

- Mata Pencaharian

Di generasi kedua dan seterusnya banyak yang sudah meninggalkan profesi bertani dan lebih memilih merantau ke kota-kota besar seperti ke Bandung atau Jakarta, bahkan hingga ke luar pulau Jawa. Ada yang berdagang, menjadi karyawan/ buruh pabrik, akan tetapi yang mencolok dari masyarakat dusun ini adalah kebanyakan dari perantau berwirausaha dan bekerja di bidang perkayuan. Mereka biasanya diajak oleh kerabat yang sudah terlihat enak di pekerjaannya. Bagi yang tidak merantau *ngojeg* adalah mata pencaharian yang kerap dilakukan oleh mereka. Tidak adanya mobil *omprengan* menjadikan *ngojeg* sebagai pekerjaan yang cukup menghasilkan. Tarif sekali jalan ke Wado Rp 5.000,- dan jika jarak dekat Rp 2.000,- - Rp 3.000,-. Dalam sehari mereka bisa mengantongi rata-rata Rp 10.000,- - Rp 30.000,-.

Ada juga yang berprofesi sebagai guru, seperti anak Pak AN, yang akrab disapa Pak Guru NC, merupakan lulusan SMA dan konon untuk menjadi guru ia melakukan praktek suap. Dengan titel profesinya sekarang ini, guru SMP dan termasuk PNS menyebabkan Pak Guru NC memiliki posisi khusus di mata masyarakat. Namun, secara keseluruhan masyarakat dusun Bantarawi sebagian besar adalah petani yang memiliki lahan dan beberapa diantaranya adalah buruh tani.

Selama musim penghujan petani Bantarawi menanam padi dan pada musim kemarau mereka berkebun tanaman palawija. Untuk padi, rata-rata mereka bisa panen 7 kg/14m². Sedangkan untuk tanaman palawija yang populer menjadi potensi ekonomi alternatif adalah tembakau. Mereka juga menanam berbagai macam sayur mayur seperti *terong*, oyong, cabai, jagung dan ubi jalar yang ditanam di sela-sela kebun kacang tanah, pisang, singkong, mentimun, dan timun suri. Hasil bumi ini mereka prioritaskan untuk konsumsi keluarga mereka sehari-hari. Jika pun berlebih baru mereka akan bagi ke saudara atau tetangga dekat yang biasanya akan mendatangkan resiprositas, semacam pertukaran. Sisa yang masih ada baru dijual, adapun

penjualan disini juga tidak berarti upaya yang diseriuskan, hanya jika ada yang membutuhkan maka terjadilah transaksi.

Aktivitas pertanian tidak lepas dari adanya ritual. Salah satu ritual yang rutin dilaksanakan petani Bantarawi adalah Nurunan. Ritual Nurunan dilakukan menjelang panen padi, yaitu dengan menggelar *hajat/ do'a* sederhana di rumah masing-masing – biasanya di ruangan khusus yang disebut *goah* -. Instrumen penting di dalam ritual ini adalah *rampe*.

- Religi

Masyarakat desa Padajaya termasuk dusun Bantarawi semuanya terdata beragama Islam, kecuali satu keluarga yaitu Pak Aan yang merupakan keturunan China. Fasilitas keagamaan di dusun Bantarawi, terdapat 2 mushola dan 1 masjid utama yang selalu dipakai sholat Jum'at dan sholat peryaan, Idul Adha dan Idul Fitri. Bapak R selaku DKM (Dewan Keamanan Masjid) dibantu oleh menantunya yang lulusan pesantren Bogor juga mendirikan Madrasah semacam Taman Pendidikan Al-Qur'an untuk anak-anak mengaji setiap harinya di mushola dekat rumah. Namun demikian pengaruh kepercayaan nenek moyang juga masih kental terlihat. Seperti masih adanya kepercayaan masyarakat pada simbol-simbol dan *mythe* tertentu. Contohnya pada saat kunjungan saya pada bulan Februari.

Upacara keagamaan yang sempat saya saksikan adakan peringatan Maulid Nabi di masjid yang terletak di Bantarawi Landeuh (dusun yang letaknya menurun ke bawah). Acara ini rutin diadakan tiap tahun dan akan dihadiri oleh Kuwu Carli. Acara dimulai sekitar pukul 13.00 wib, warga sudah banyak berkumpul di masjid. Ibu-ibu yang datang membawa bakul yang isinya hasil pertanian seperti padi dan air di dalam botol berukuran 1 liter yang dibuka tutupnya. Mereka bilang supaya pada saat doa dibacakan berkahnya akan masuk ke dalam air tersebut yang nantinya akan diminum oleh keluarga. Yang menarik adalah masing-masing dari mereka juga membawa garam. Menurut mereka garam ini bisa dipakai untuk tolak bala'. Jika ada angin yang sangat kencang mereka akan menebarkan garam tersebut

di halaman rumah. Garam ini juga akan sama berkahnya jika dicampurkan dalam masakan yang mereka makan. Selain itu saya juga melihat adanya sesajian yang umum diperuntukkan untuk leluhur seperti bubur merah putih, kopi hitam, dan sebagainya.

Ritual keagamaan yang tidak kalah pentingnya di dusun ini adalah penyelenggaraan Buku Tahun. Buku Tahun merupakan acara adat masyarakat dusun Bantarawi dalam mengungkapkan tanda syukur dan permohonan perlindungan bagi dusun ini kepada leluhur mereka. Ritual ini dilakukan setahun sekali biasanya sebelum bulan puasa. Peringatan Buku Tahun pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Menurut cerita yang saya dapat dari salah satu warga, Neng Teti, peringatan Buku Tahun di tiga tahun yang lalu ramai dengan diadakannya hiburan Jaipong di balai pertemuan. Sedangkan tahun ini, Dusun Bantarawi Tonggoh, Bantarawi Landeuh, dan Gunung Penuh melaksanakan acara ini secara terpisah.

Buku Tahun di dusun Bantarawi dilaksanakan di lapangan di samping rumah Emak Encih. Masyarakat berkumpul, ibu-ibu memasak nasi kuning dan bapak-bapak menyembelih seekor kambing yang dibeli dari hasil sumbangan wajib dari seluruh warga. Selain itu, daging sapi juga dibeli sebagai tambahan. Setelah disembelih kepala kambing yang masih berlumuran darah dipisahkan untuk dikubur di dekat pohon bambu di lapangan tersebut. Sementara itu, ada juga yang bertugas menyiapkan sesaji berupa kopi pahit, bubur merah putih, dan lain-lain. Sesaji itu disiapkan dalam dua tampah, satu tampah dengan porsi khusus – sesaji dan *bakakak*³¹ - dibawa ke *puncer* atau makam keramat di puncak Gunung Penuh, dan satu tampah lagi untuk ritual do'a/ hajat di tempat pelaksanaan.

Setelah menguburkan kepala kambing, Kuncen, Bapak Ust. Rahman, dan beberapa sesepuh dusun Bantarawi bergegas ke makam keramat di puncak Gunung Penuh untuk berdo'a di sana. Sesi ini tidak diperkenankan dihadiri oleh banyak orang, untuk menjaga kekhidmatan dalam berdo'a. Sementara itu, di lapangan warga bersiap-siap untuk ritual selanjutnya. Warga

³¹ Ayam yang dibakar dengan keadaan masih utuh/ tidak dipotong

membawa nasi di wadah tertentu (baskom/ *sangku*) dan piring kosong dari rumah masing-masing. Piring tersebut ditaruh di atas nasi yang di bawa dan dikumpulkan. Sepulangnya Kuncen dan sesepuh dari *puncer*, dilakukan do'a bersama. Setelah selesai berdoa piring dan nasi diabsen, dan setiap piring diberi seikat sate yang masing-masing terdiri dari 5 tusuk sate. Acara ini biasanya dihadiri oleh kepala desa, seperti yang Ibu CU lakukan semasa beliau masih menjabat. Tapi tidak untuk kali ini, Kuwu Carli tidak menghadiri acara ini.

- Kesenian

Tahun 1970-an kesenian seperti *tayub* atau jaipong masih sering dimainkan di dusun ini. Berbeda dengan sekarang, dimana tidak ada lagi kesenian adat yang terlihat masih aktif di dusun ini. Saat ini masyarakat sudah terhipnotis dengan pengaruh luar. Kesenian berupa nyanyian atau tarian, wayang dan sebagainya tidak lagi berkembang seiring gencarnya penetrasi kota akibat urbanisasi dan tayangan sinetron di televisi. Jaipong dan lagu-lagu yang kental akan bahasa dan cengkok daerah lebih sering terdengar kala ada hajatan pernikahan atau sunatan. Namun, bagi sebagian sesepuh kampung masih menggandrungi pertunjukkan wayang di televisi.

2.3 Bendungan Jatigede : Sejarah dan Progres

Pembangunan senantiasa berada dalam posisi yang dilematis. Manfaat selalu berdampingan kemungkinan resiko yang bisa timbul dari pembangunan tersebut. Setiap pihak yang berkaitan dan terkena imbas dari pembangunan ini akan memiliki cara pandang yang berbeda mengenai pelaksanaan pembangunannya dan pengaruhnya bagi hidup mereka. Pada umumnya para pelaksana proyek pembangunan lebih melihat manfaatnya dan mengentengkan risikonya, karena mereka terdesak oleh urgensi sasaran dan tekanan faktor politik.³² Media massa, LSM, dan para ilmuwan yang cenderung lebih kritis dan

³² Soemarwoto, Otto.1997.*Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*.Djambatan;Jakarta hlm. 1659-161

jeli dalam melihat resiko yang ada di balik sebuah proyek pembangunan. Yang kemudian harus diupayakan adalah bukan meniadakan pembangunan, akan tetapi bagaimana pembangunan yang dilakukan itu berwawasan lingkungan sehingga seoptimal mungkin memberikan manfaat kepada masyarakat yang hendak dibangun dan meminimalisir sekecil mungkin resiko yang ada. Berikut contoh manfaat dan resiko lingkungan bendungan dan waduk yang terbentuk oleh bendungan itu yang disajikan oleh Soemarwoto (1997) dalam bukunya Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan.

Tabel 2.1 Manfaat dan Resiko Lingkungan dari Pembangunan Bendungan

Manfaat lingkungan dan akibatnya	Resiko lingkungan dan akibatnya
<p>1. Penampungan dan peninggian muka air: pembangkitan tenaga listrik untuk penerangan dan industri, pemacuan proses modernisasi dan pendidikan, kenaikan kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan baru.</p> <p>2. Penampungan air :</p> <p>a. Pengendalian banjir: penurunan kerugian harta benda dan korban manusia</p> <p>b. Penyediaan air minum</p> <p>c. Penyediaan air pengairan: kenaikan produksi pertanian, kenaikan persediaan bahan pangan, kenaikan kegiatan perdagangan, penciptaan lapangan pekerjaan</p>	<p>1. Penggenangan:</p> <p>a. Desa: pemindahan penduduk dan kesedihan penduduk yang terkena dampak</p> <p>b. Daerah pertanian: penurunan produksi pertanian, penurunan persediaan pangan, penurunan kegiatan ekonomi, kehilangan lapangan pekerjaan, penurunan tingkat kesehatan</p> <p>c. Jalan: gangguan perhubungan, kerusakan sistem pasar, kehilangan lapangan pekerjaan, penurunan tingkat kesehatan</p>

<p>d. Penyediaan air untuk membersihkan kota: kenaikan sanitasi lingkungan, penurunan korban penyakit</p>	<p>d. Peninggalan arkeologis, misalnya candi: pemusnahan warisan budaya dan monumen sejarah</p>
<p>e. Pengembangan pariwisata: kenaikan persediaan pangan, kenaikan kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan</p>	<p>e. Hutan: kepunahan flora dan fauna, erosi sumber daya gen, kehilangan bahan pendidikan dan ilmu pengetahuan, penyempitan kesempatan untuk pembangunan</p>
<p>f. Pengembangan pariwisata: pelayanan rekreasi, kenaikan kegiatan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan</p>	<p>2. Perkembangan gulma air: penurunan daya tampung waduk dan potensi perikanan serta pariwisata</p>

Sumber: Soemarwoto, 1997

Masalah sosial yang timbul akibat tertundanya pelaksanaan proyek pembangunan bendungan Jatigede yang saya sajikan ini sudah merupakan topik lama di lingkup masyarakat Sumedang, khususnya di dusun Bantarawi kecamatan Wado. Proyek ini sudah direncanakan dari tahun 1960-an, bahkan konon, pada saat Belanda masih merong-rong negara ini, proyek bendungan Jatigede ini sudah disebut-sebut sebagai proyek peninggalan Belanda. Bapak Karmita, atau yang akrab disapa Bapak IT, salah satu informan di dalam penelitian ini sempat menceritakan kepada saya bahwa Pak Ita pernah mengikuti rapat perdana pensosialisasian pembangunan bendungan Jatigede ini di Cisurat. Rapat yang difasilitasi oleh *wadana*³³ ini menginformasikan bahwa tanah ini memang dibutuhkan oleh negara. Akan tetapi, setelah adanya rapat tersebut tidak ada tindak lanjut yang mencolok. Sampai kemudian pada tahun 1982 mulai ramai

³³ Wadana adalah sebuah jabatan struktural satu tingkat di atas Camat dan satu tingkat di bawah Bupati.

pendataan, khususnya di desa Padajaya termasuk dusun Bantarawi pada tahun 1984.

Gagasan pembangunan bendungan Jatigede diajukan pertama kali pada tahun 1963, kemudian ditindaklanjuti dengan *detail design* pada tahun 1986 oleh Konsultan SMEC, Australia. Kemudian direview kembali pada tahun 2004 oleh Konsultan PT Indra Karya-JO-PT. Wiratman dan telah mendapatkan sertifikasi desain dari Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 23 Februari 2006. Penandatanganan dilakukan Direktur Sinohydro Fan Yun Long, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung Graitto Sutadi, dan Pejabat Pembuat Komitmen Waduk Jati Gede Jaja Sumantri, Senin (30/4) di Jakarta.³⁴

Tim proyek bendungan Jatigede telah memulai pekerjaan struktur yang dilakukan secara seremonial oleh Inspektorat Jenderal Sumber Daya Air pada tanggal 23 Oktober 2008 di Sumedang Jawa Barat.³⁵ Acara tersebut ditandai dengan penekanan tombol peledakan lokasi inlet diversion Tunnel. Acara peresmian dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Bupati Kabupaten Sumedang, Bupati Indramayu, Bupati Majalengka, beberapa dinas dan instansi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang.

Proyek bendungan Jatigede dengan nilai kontrak setara Rp 2,1 Trilyun dipercayakan pelaksanaannya kepada Sinohydro dan Joint Operation. Di mana CIC adalah Konsorsium Kontraktor BUMN Indonesia yang terdiri dari PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Waskita Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Utama Karya.

Tidak sedikit warga masyarakat yang mengeluh lelah menceritakan pandangannya dan pengalamannya mengenai proyek yang masih belum jelas ini. Namun demikian, banyak juga yang merasa antusias karena merasa berbicara adalah salah satu cara meneriakkan kemelut hati mereka secara tidak langsung kepada pemerintah.

³⁴ <http://www.alpensteel.com/article/66-105-energi-sungai-plta--waduk--bendungan/2787--pembangunan-bendungan-jati-gede-di-kab-sumedang.html>,

³⁵ http://www.wika.co.id/ina/invesrel/index.php?act=detailnews&p_id=260

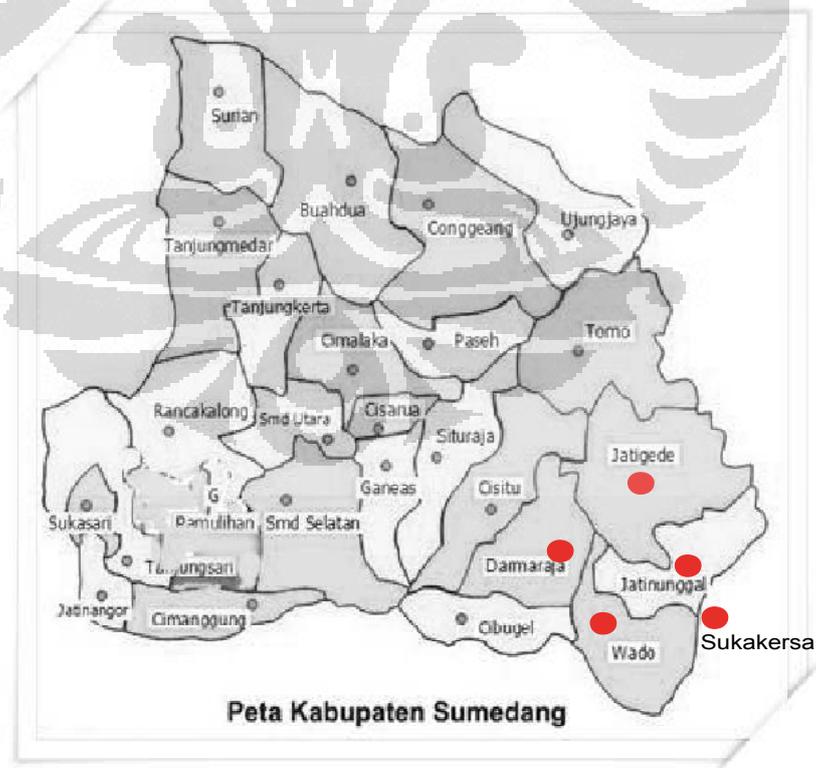
Saya menemui Bapak Kasiman yang bekerja di proyek ini dari awal proyek ini dilaksanakan dan berada di divisi pertanahan PU proyek. Bapak Kasiman menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Proyek pembangunan bendungan Jatigede ini merupakan pengembangan wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung. Wilayah Sungai (WS) Cimanuk-Cisanggarung meliputi wilayah seluas 7.711 km², terletak di Provinsi Jawa Barat : Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Kota Cirebon, serta di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes. WS Cimanuk-Cisanggarung terdiri dari beberapa daerah aliran sungai (DAS), antara lain DAS Cimanuk (3.584 km²), DAS Cisanggarung (1.325 km²), DAS Cipanas-Pangkalan (982 km²), serta DAS sungai-sungai kecil yang mengalir ke Laut Jawa sepanjang Pantura Ciayu (1.820 km²). DAS Cimanuk dengan luas wilayah 3.584 km², mempunyai curah hujan tahunan rata-rata 2.800mm dan potensi air permukaan rata-rata sebesar 7,43 milyar m³/tahun.

Guna mengembangkan potensi sumber daya air WS Cimanuk-Cisanggarung telah disusun *master plan* yang mengidentifikasi 13 potensi waduk di DAS Cimanuk, diantaranya 3 waduk serbaguna (*multipurpose*) yang diusulkan mendapatkan prioritas utama, yakni : (1) Waduk Jatigede, (2) Waduk Cipasang, dan (3) Waduk Kadumalik (Cilutung). Namun, sampai saat ini baru satu waduk yang sedang dibangun, yaitu Waduk Jatigede. Adapun infrastruktur sumber daya air yang telah dibangun di Sungai Cimanuk, berupa Bendung Rentang, dengan sistem irigasinya seluas 90.000 Ha, terletak di wilayah Kabupaten Majalengka, Cirebon, Indramayu, yang sepenuhnya tergantung ketersediaan air di Sungai Cimanuk.

Fluktuasi Debit di Sungai Cimanuk yang tercatat di Bendung Rentang sangat besar : $Q_{max} = 1.004 \text{ m}^3/\text{det}$; $Q_{min} = 4 \text{ m}^3/\text{det}$. Ratio = 251. Lahan kritis DAS Cimanuk pada saat ini telah mencapai kurang lebih 110.000 Ha atau sekitar 31 % dari luas DAS Cimanuk. Potensi air Sungai Cimanuk di Rentang rata-rata sebesar 4,3 milyar m³/tahun dan hanya dapat dimanfaatkan 28 % saja, sisanya terbuang ke laut karena belum ada waduk. Dengan alasan ini maka pembangunan bendungan Jatigede dirasakan perlu direalisasikan. Terlebih untuk memenuhi

beberapa manfaat. Sistem irigasi Rentang seluas 90.000 Ha sepenuhnya mengandalkan pasokan air dari sungai Cimanuk (*river runoff*), sehingga pada musim kemarau selalu mengalami defisit air irigasi yang mengakibatkan kekeringan. Disamping itu wilayah hilir sungai Cimanuk (Pantura Ciayu) pada musim kemarau terjadi pula krisis ketersediaan air baku untuk keperluan domestik, perkotaan dan industri.

Pembangunan bendungan Jatigede ini akan menenggelamkan kehidupan sosial masyarakat lokal di 5 kecamatan dan bukti-bukti sejarah berupa situs-situs, seperti makam Angling Dharma di Curug Emas. Akan tetapi, pihak PU (Pekerjaan Umum) justru berpendapat proyek waduk Jatigede perlu segera dibangun guna mengatasi krisis air tersebut, baik untuk menjamin ketersediaan air irigasi Rentang maupun air baku untuk wilayah Pantura Ciayu. Indramayu dan Cirebon yang merupakan lumbung padi nasional akan menjadi target utama pemanfaatan bendungan Jatigede ini nantinya.



Gambar 2.3.1 Lima Titik Wilayah Calon Genangan Bendungan Jatigede, Sumedang

Realisasinya sendiri, menurut penjelasan Bapak Kasiman, pengukuran sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 1970-an, misalnya saja untuk wilayah-wilayah yang menjadi jalan lingkar pengukuran dilakukan tahun 1976. Sedangkan untuk wilayah genangan termasuk desa Padajaya mulai dilakukan pengukuran pada periode anggaran 1982-1983. Dilakukan pembayaran pada tahun 1986 dengan sistem 20% diberikan secara tunai dan sisanya melalui rekening bank. Namun, pada saat itu anggaran untuk pembayaran ganti rugi mengalami kekurangan. Hal ini salah satunya dikarenakan pengutamaan di wilayah yang pertama kali diproses pembangunan dan adanya pembangunan bendungan Kedungombo di Jawa.

Berdasarkan pendataan tahun 1982 dusun Leuwikanteh ketinggalan murni sekitar 4,5 hektar, yang berada di tengah-tengan antara desa Wado dan desa Padajaya, tepatnya dekat dusun Sundulan. Ketinggalan ini dikarenakan pada tahun 1982-1983 pengukuran masih berada dalam satu naungan desa yaitu desa Wado. Pada saat akan ada pembayaran desa Wado mengalami pemekaran, hingga terbagi dua desa Wado dan desa Padajaya. Waktu 1986 lembar dokumen dusun Leuwikanteh masuk ke dokumen Wado. Akhirnya pada tahun 1999 dilakukan pengecekan karena ada usulan untuk didata ulang. Wado dibayar tuntas tahun 2007 kemarin. Dengan demikian wilayah Leuwikanteh akan diikutsertakan dengan penuntasan desa Padajaya.

Fenomena yang paling sensasional dari adanya proyek pembangunan bendungan Jatigede ini adalah tertundaan pembangunan dijadikan kesempatan oleh masyarakat lokal ataupun luar yang memiliki modal untuk membangun 'rumah hantu' (rumah harapan tunai). 'Rumah hantu' ini dibangun dalam berbagai tipe ada yang permanen, semi permanen, gubuk, bahkan kandang ternak fiktif pun dibangun sebagai spekulasi yang mendatangkan keuntungan berkali-kali lipat pada saat pemabayaran ganti rugi. Di masyarakat dusun Bantarawi sendiri, 'rumah hantu' telah menjamur dimana-mana bahkan di areal-areal yang tidak wajar seperti pemakaman, semak-semak, sawah, dan di atas tanah *panemu*.³⁶ Mereka beralasan bangunan tersebut dibangun di atas lahan yang terlewat pengukuran dari

³⁶ Tanah yang timbul akibat surutnya air sungai

sejak dulu. Tidak hanya di dusun Bantarawi desa Padajaya, akan tetapi ide membangun 'rumah hantu' merupakan pengaruh dari desa-desa lain, contohnya Cibogo yang sudah dibayar tuntas beserta bangunan 'rumah hantu'.

Saya mempertanyakan status pembayaran 'rumah hantu' tersebut kepada Bapak Kasiman. Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 400 unit rumah tanpa penghuni ('rumah hantu') di Leuwikanteh, yang kemungkinan besar tidak akan dibayar. Bapak Kasiman menegaskan pembayaran akan tetap didasarkan pada pendataan 1986, dan hanya materi yang dikomplainkan yang akan diganti rugi. Masalah bangunan yang diperluas/ diperlebar juga sepertinya tidak akan menjadi indikator penting dalam pengukuran nantinya, semuanya akan tetap mengacu pada luas tanah yang ada. Hal ini untuk menekan resiko kesukaran dalam mengidentifikasi tipe-tipe ganti rugi. Karena pada dasarnya, luas tanah tidak akan mengalami perubahan secara signifikan tidak seperti rumah yang dapat diperluas sebagaimana maunya si pemilik. Sekalipun ada perubahan di atas tanah tersebut hanya bangunan yang bertambah dan kepemilikannya yang berpindah.

Berkaitan dengan banyaknya 'rumah hantu' yang dibangun oleh warga terkena dampak, Bapak Kasiman memberikan tanggapan pesimis. *"Kita ga berani bayar 'rumah hantu'. Soalnya 'rumah hantu' ga ada dasarnya untuk dibayar. Nanti kita bisa ditegur oleh pemerintah,"* jelas Bapak Kasiman menanggapi pertanyaan saya mengenai 'rumah hantu'. Daerah genangan sebenarnya dianggap sudah beres, jadi hanya yang protes saja yang akan dipertimbangkan. Bapak Kasiman menegaskan target dalam 2 tahun ini semuanya akan dibereskan, pendataan dan pembayaran.

Hambatan utama pembangunan ini adalah banyaknya komplain warga mengenai ganti rugi. Bapak Kasiman memperbolehkan saya melihat dokumen pembayaran ganti rugi, sayangnya dokumen pembayaran ganti rugi untuk desa Padajaya sedang dipakai jadi saya tidak sempat melihatnya hari ini. Dalam pendataan dan pembayaran area desa Padajaya dibagi ke dalam 9 tahap, dan dusun Bantarawi termasuk ke dalam tahap 8 dan 9. Warga menyatakan bahwa pembayaran tahun 1986 ini tidak adil, salah satunya yang bersuara adalah warga

dari dusun Jemah. Jadi ada kenaikan areal yang belum dibayar yang disebut sebagai elevasi.

Akhirnya Wado dibayar tuntas tahun 2007. Administrasi warga yang melakukan pengajuan ulang atas tanahnya yang terlewat terhitung komplit dan sukses. Warga memang diberikan kesempatan untuk mengusulkan tanah mereka yang terlewat. Setelah administrasi masuk, dilanjutkan dengan pengukuran ulang dari pihak lapangan proyek. Tapi tidak akan semua warga di cek, karena menurut Bapak Kasiman petugas lapangan akan dibantu dan berkoordinasi dengan pihak desa. Yang sekarang ini sedang dituntaskan adalah dusun Jemah, kec. Jatinunggal.

Pembangunan terowongan pengelak (*diversion tunnel*), telah dimulai pada tahun 2008 ditandai dengan upacara peledakan pertama pada bulan Oktober 2008. Bendungan yang konstruksinya mencapai nilai US\$144 ini, memerlukan waktu normal 65 bulan untuk pelaksanaan pembangunan fisiknya. Sehingga masih tersedia cukup waktu untuk menyelesaikan pembebasan lahan dan pemindahan penduduk dalam waktu secara bersamaan dengan pembangunan fisik bendungan. Pembangunan PLTA Jatigede dapat dilaksanakan bersamaan atau setelah bendungan Jatigede selesai dibangun.

Kegiatan pembangunan fisik yang telah/ sedang dilaksanakan sampai saat ini, yaitu : (a) Pembangunan jalan lingkungan OTD Pembangunan Jatigede di 12 lokasi, (b) Pembangunan *base camp*, (c) Pembangunan *access road* Tolengas-Jatigede, (d) Pembangunan haul *road* menuju *tunnel*, *disposal*, dan *borrow area*, (e) Galian tubuh bendungan sebelah kanan dan kiri, (f) Galian *conduit diversion tunnel*, (g) Galian *inlet diversion tunnel* (terowongan pengelak), (h) Galian *spillway*. Sejauh ini pembangunan bendungan Jatigede sudah mengalami progres yang cukup signifikan. Terowongan utama sudah tembus, tinggal menunggu air masuk. Saat ini terowongan pengelak ini sudah rampung dan akan segera dilakukan percobaan seluas 300 Ha.

Kegiatan pembangunan terowongan banyak memunculkan isu dan mitos mengerikan. Menurut informasi yang saya dapatkan, orang-orang yang menjadi pekerja disini kebanyakan berasal dari luar daerah Sumedang. Kabarnya,

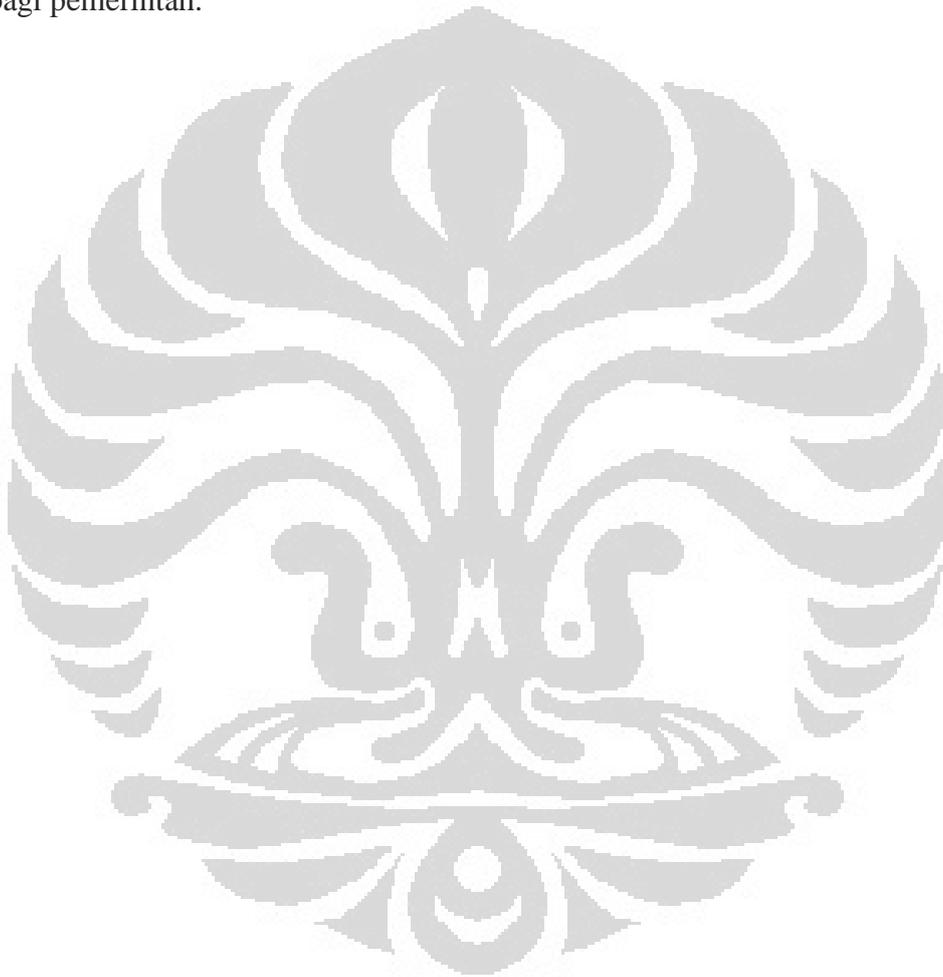
pemboman dan pengerukan terowongan ini telah menelan banyak jiwa. Ada yang tertinggal di dalam terowongan, dan ada juga yang tergilas alat berat yang konon seringkali bergerak sendiri/ digerakkan makhluk halus. Mirisnya, saya juga mendengar isu bahwa para pekerja dan keluarganya ini sebelumnya sudah menyepakati kontrak dengan pihak proyek. Dalam kontrak tersebut, keluarga si pekerja tidak boleh menuntut jika si pekerja tidak pulang atau meninggal di lokasi proyek. Namun demikian, para pekerja tetap mengambil resiko ini karena upahnya terhitung tinggi yaitu mencapai Rp 400.000,-/hari.

Bapak Kasiman mengaku kendala pembangunan bendungan ini adalah dari cara pembayaran yang sudah beberapa kali, seperti untuk daerah genangan sudah dilakukan pertama kali tahun 1984-1986 dengan cara 20% uang tunai sisanya lewat rekening bank. Pembayaran dimulai lagi tahun 1994-2001 dengan sistem tunai.

Progres yang saat ini terdengar adalah telah masuknya air melalui terowongan tersebut menuju badan bendungan percobaan seluas 300 Ha. Percobaan ini akan menjadi patokan kinerja bendungan Jatigede ini kedepannya. Apakah akan berfungsi dengan baik atau tidak? Selain itu, pemerintah dan kontraktor proyek menargetkan pembangunan bendungan Jatigede ini hingga 2013. Jika tidak tercapai, maka kabarnya proyek ini akan dihentikan dan dianggap gagal.

Pembicaraan tentang tertundanya pembangunan bendungan Jatigede tidak hanya hangat pada poin jadi atau tidaknya bendungan ini terealisasi dan pengukuran plus ganti rugi yang tidak kunjung usai. Masalah transmigrasi sebagai upaya *resettlement* dari pemerintah sejak tahun 1980-an telah menambah kontroversi pembangunan ini. Pengalaman dramatis yang dialami beberapa warga yang sempat ikut transmigrasi merupakan bukti betapa Jatigede menjadi bendungan yang kompleks. Selain itu, saat ini program relokasi sudah mulai digaungkan kembali, meskipun kelihatannya hanya sebagai cara untuk meredakan teriakan dari masyarakat yang menuntut kepastian. 3 dari 4 daerah bakal relokasi, yaitu Situraja, Pasir Padang, dan Pasir Muncang Sundulan, tidak memiliki standar lahan seperti yang diharapkan masyarakat petani terkena dampak. Tanahnya kering

dan tidak cocok untuk menanam padi. Selain itu, sumber air juga merupakan pertimbangan utama. Bagaimana pun juga, masyarakat yang dipindahkan adalah petani dan akan tetap bertani untuk hidupnya. Maka, kualitas lahan adalah hal utama yang mereka perhatikan. 1 desa di Sumedang, yaitu Conggeang adalah pilihan yang terbaik diantara yang lain menurut mereka. Sumber airnya bagus karena dekat pegunungan. Bagaimana pemindahan akan dilakukan, entah memakai sistem bedol desa atau pemindahan secara parsial masih menjadi PR bagi pemerintah.



BAB 3

*LEMBUR KAPAHUNG TAGIWUR KU JATIGEDE*³⁷

Dalam penelitian ini saya mengangkat kisah 5 keluarga petani. Pengalaman dan cerita keseharian mereka yang saya angkat di sini merepresentasikan adanya pengaruh berbeda dari tertundanya pembangunan bendungan Jatigede. Bagaimana akhirnya keluarga ini saya pilih, adalah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Diantaranya adalah adanya posisi khusus yang pernah mereka miliki, bahkan ada yang sampai saat ini masih menebarkan kharisma yang cukup kuat di mata masyarakat dusun Bantarawi. Adanya proyek pembangunan bendungan Jatigede ini telah menguatkan dan mempertinggi posisi sebagian dari mereka dan sebagiannya lagi justru mengalami kemerosotan.

Selama penelitian ini berlangsung saya tinggal bersama Bapak R dan Ibu A, yaitu kakek dan nenek saya. Aktor-aktor dalam penelitian ini yaitu, Bapak R, Bapak AN, Bapak S, Bapak IC, dan Bapak IT dipilih sebagai subjek penelitian ini adalah karena mereka memiliki keterlibatan dalam konteks tertentu dalam menghadapi pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda. Bapak AN, Bapak S, Bapak IC, dan Bapak IT memiliki *power experience* di masanya masing-masing. Bapak R merupakan ketua himpunan pertanian untuk dusun Bantarawi saat ini. Namun demikian, dalam skripsi ini saya juga mengangkat kehidupan beberapa tokoh lainnya yang – signifikansinya - ditemukan melalui penelusuran dari informan utama. Mereka adalah Akung, Mang Ihir, dan Pak Dumya yang masing-masing memiliki pengalaman kuat dalam satu konteks tertentu dalam upaya mereka merespon tertundanya pelaksanaan pembangunan bendungan Jatigede ini. Tokoh-tokoh pendukung ini saya sertakan dalam rangka menggambarkan relasi antara tokoh utama dengan pergaulan sosialnya, dan tentunya erat berkaitan dengan konteks-konteks yang dikaji.

³⁷ *Dusun Terpasung Panik Karena Jatigede*

3.1 Manipulasi Pendataan

Gagasan pembangunan bendungan Jatigede diajukan pertama kali pada tahun 1963, kemudian ditindaklanjuti dengan *detail design* pada tahun 1986 oleh Konsultan SMEC, Australia. Sebelum adanya *detail design* tersebut, pada tahun 1984 diadakan pendataan dengan mengukur lahan pemukiman, persawahan, dan perkebunan milik warga, khususnya warga dusun Bantarawi. Pendataan ini dilaksanakan sangat tiba-tiba tanpa ada sosialisasi secara langsung kepada warga terlebih dahulu. Warga menyangka proses pendataan ini dilakukan dalam rangka pendisiplinan pajak. Dengan prasangka seperti itu, maka warga memperkecil nominal kekayaan yang dimilikinya. Luas rumah, tanah, sawah, dan kebun yang mereka miliki, mereka kurang-kurangi supaya tidak menimbulkan kewajiban/pajak yang besar bagi mereka. Selain itu banyak lahan dan bangunan yang diukur tanpa disaksikan oleh pemiliknya. Akibatnya banyak dari warga masyarakat yang tanahnya terlewat tidak terukur atau bahkan tertukar nama kepemilikannya.

Salah satu yang mengalami hal tersebut adalah Bapak IC. Bapak IC yang bernama asli Bapak Suherman ini mengawali debutnya di desa sebagai *kulisi* yang bertanggungjawab terhadap keamanan desa. Sebutan Ici ia dapatkan dari jabatan kulisinya tersebut. Awalnya ia sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat, karena suka berkelana mencari 'ilmu'. Akan tetapi karena setiap kali ada keributan para pemuda yang berkelahi, ia yang memisahkannya, maka ia diangkat sebagai kulisi. Dengan ilmu yang dimilikinya hasil dari berkelana dari Cirebon sampai ke Banten, posisinya semakin berpengaruh dan membuat semua orang takut kepadanya. Orang-orang yang bermasalah dengan Bapak IC, misalnya yang akan menagih hutang, sampai membawa golok dari rumahnya karena emosi, setelah berhadapan langsung dengan Bapak IC langsung tunduk dan segan. Tidak hanya itu, konon Bapak IC juga mempunyai ilmu kebal.

Dengan ilmu yang dimilikinya tersebut, Bapak IC menjadi tempat persembunyi orang-orang yang memiliki masalah agar masalahnya dapat ditutupi. Bisa dikatakan Bapak IC malah menyalahgunakan ilmunya. Pada masa jabatan Ibu Kuwu CU, Ibu CU dan antek-anteknya banyak menikmati uang subsidi rakyat

tanpa bisa diketahui dengan cara ditutupi oleh Bapak IC. Orang-orang bilang ini adalah ilmu pembungkam, masyarakat dan pemerintah dibungkam agar tidak mengetahui kenyataannya. Percaya tidak percaya memang. Contohnya, kasus dana untuk musholla dari pemerintah, disampaikannya kepada Bapak R pengajuan dana tersebut tidak disetujui padahal sudah turun dan ia nikmati sendiri. Selain itu juga ada kasus *parabon*³⁸ yaitu sawah jatah untuk Kepala Desa/ Kuwu sebagai imbalan atas jasanya mengurus desa. Kepemilikan sawah ini bergilir seiring dengan pergantian Kuwu. Parabon ini mendapatkan dana ganti rugi dari adanya proyek bendungan Jatigede. Seharusnya dana ganti rugi parabon tersebut disimpan untuk digunakan kemudian mengganti lahan parabon di tempat relokasi, malah 'dimakan' bersama-sama oleh perangkat desa. Dengan ilmunya tersebut, kendati sering melakukan kesalahan Bapak IC tetap dipakai perannya di desa.

Banyak kasus korupsi lainnya di desa Padajaya yang akhirnya terungkap oleh pemerintah daerah. Setelah terbongkar, Ibu CU ditahan dan Bapak IC keluar dari aktivitas struktural desa. Lagipula menurut penilaian masyarakat ilmu Bapak IC mulai menurun kekuatannya. Sebagian besar masyarakat dusun Bantarawi memang masih mempergunakan ilmu-ilmu halus untuk meraih keinginan mereka. Misalnya, ingin menjadi punduh atau ketua RT, mereka menyemat masyarakat agar memilih mereka. Jika tidak terpilih, maka sang kandidat yang kalah tidak akan segan-segan menyantet yang menang.

Bapak IC tinggal di Bantarawi sejak tahun 1973, sebelumnya Bapak IC berasal dari dusun Cidadap desa Sukakersa.³⁹ Saat ini Bapak IC dan istrinya, Ibu Warsih, tinggal dengan anak bungsunya Iya Nurlela Sari yang masih bersekolah di tingkat SMA. Ketiga anaknya yang lain sudah berkeluarga. Anak pertamanya, Iwan berwirausaha di Tolengas, anak keduanya Wiwa dan anak ketiganya Srimulyati bekerja di Jakarta. Sehari-harinya Bapak IC mengolah sawah

³⁸ Sistem *parabon* tergantung kebijakan masing-masing desa. Dilihat dari persediaan tanah yang bisa diolah. Di desa-desa tertentu ada yang hanya memberikan hak *parabon* kepada aparatur utama desa. Tapi untuk desa Padajaya, pembagian *parabon* didapatkan oleh seluruh aparatur desa dan dusun sampai RT juga dapat. Hanya saja berbeda luasnya saja. Hal ini didukung oleh surutnya volume air sungai Cimanuk sehingga ada tanah *panemu* yang bisa dijadikan tanah darat untuk bertani. Kepemilikannya pun bersifat bergilir sesuai masa jabatan.

³⁹ Desa Sukakersa juga merupakan daerah genangan untuk bendungan Jatigede

peninggalan orang tuanya kurang lebih sekitar 70 bata⁴⁰ dan mengurus 50 bata kebun (berisi pohon jati, buah-buahan, dan petai).

Rumah yang ditempati oleh Bapak IC dan keluarga dibangun di atas tanah orang tuanya seluas 10 bata yang sudah terbayar lunas pada tahun 1986. Rumah ini juga sudah dibayar, tapi masih ada yang terlewat. Bapak IC tidak tahu pasti terlewat berapa bata karena pada saat pengukuran pertama kali Bapak IC sedang bekerja di Garut. Sepulangnya Bapak IC dari Garut pada tahun 1986, bersamaan dengan pembayaran ganti rugi. Pembayaran ganti rugi ini berlangsung di BNI 46 Sumedang, dan diambil langsung oleh Bapak IC bersama-sama dengan KK yang lain. Saat itu Bapak IC hanya menerima Rp 900.000,-. Memang sewaktu pengukuran tahun 1982 tersebut, kondisi rumah Bapak IC belum seperti sekarang. Dulu ukurannya tidak genap sampai 7 bata seperti sekarang ini. Belum ada WC dan sumur, tidak ada teras tembok, dan kondisi dapur pun belum di *plur*. Pada tahun 1996 Bapak IC membangun sumur, WC, menembok terasnya, dan mem*plur* dapurnya. Dengan tambahan WC, sumur, dan teras maka total luas rumah Bapak IC genap 6 bata atau sama dengan 84m². Bapak IC melaporkan perubahan bangunan rumahnya ini ke pihak desa untuk kemudian mendapatkan pengesahan desa pada saat pendataan ulang.

Bapak IC merasa kecewa, karena bukan hanya pengukuran yang tidak transparan tapi pembayaran juga tidak transparan yaitu tidak disertai perinciannya seperti apa. Setelah menerima uang pembayaran ganti rugi tersebut, Bapak IC tidak menerima instruksi untuk mengosongkan desa dari pihak pemerintah ataupun proyek. Bahkan ada petugas dari Satker proyek bendungan Jatigede yang secara langsung dan terang-terangan menyerukan agar masyarakat baru pindah jika air sudah benar-benar masuk saja. Dengan demikian masyarakat masih leluasa untuk tinggal dan mengolah lahannya. Pemerintah juga tidak memberikan larangan kepada warga masyarakat untuk mengakses lahan sawah, hutan atau kebun yang sudah dibayar.

⁴⁰ Hitungan yang pada umumnya warga pakai untuk mengukur luas adalah istilah bata, 1 bata = 14 m². Perbedaan istilah dalam perhitungan ini juga menjadi masalah dan kendala tersendiri dalam pendataan.

Bapak R dan keluarga mengalami hal yang serupa dengan Bapak IC. Bapak R tinggal di dusun Bantarawi sejak tahun 1967, yaitu semenjak beliau menikah dengan Ibu A yang memang warga asli dusun ini. Bapak R sendiri berasal dari desa seberang, yaitu desa Cibogo yang juga sama menjadi area genangan bendungan Jatigede. Rumah yang saat ini mereka tinggali merupakan rumah warisan dari orang tua Ibu A, dan kondisinya sudah banyak bagian yang rusak karena lama sekali tidak direnovasi. Ada beberapa bagian atap yang bocor saat hujan dan di sebagian dinding sudah mulai retak. Bagian dapur belakang dan kamar mandi juga sudah tidak terurus dan harus segera diperbaiki.

Selain rumah ini yang luasnya sekitar 10 bata dengan luas tanah 30 bata, Bapak R juga memiliki 3 sawah yang terletak di daerah *kulon* (barat) seluas 30 bata, di *kaler* (selatan) 15 bata, dan di *wetan* (timur) tepatnya di dusun Cidapad seluas 15 bata. Bapak R juga diberi lahan inventaris sebagai DKM atas tugasnya mengurus orang yang meninggal, berupa sawah dan kebun seluas 100 bata. Inventaris ini merupakan hak bergilir bagi DKM, dan Bapak R sudah memegang amanat ini selama kurang lebih 15 tahun hingga saat ini. Bapak R juga memelihara tiga ekor kambing dalam sebuah kandang berukuran 3x5 m².

Pada saat pendataan pertama tahun 1982 tersebut, kondisi rumah masih rumah panggung belum permanen seperti sekarang ini. Luasnya pun pada saat itu, rumah masih 40 m² sedangkan tanah dan halaman 300 m². Pendataan pertama ini menurut Bapak R tidak transparan. Saat itu petugas pengukur datang tiba-tiba tanpa ada konfirmasi pengukuran ini dilakukan untuk apa.

Setelah ada pendataan tahun 1982 tersebut, tahun 1986 Bapak R dan KK yang lainnya dipanggil untuk transaksi pembayaran ganti rugi. Petugas memberikan bukti pembayaran berupa lembaran-lembaran surat yang harus ditandatangani. Bapak R pun langsung menandatangani tanpa membacanya dengan detail terlebih dahulu. Pada saat pendataan 1982 tersebut pasir, batu bata, dan bahan-bahan untuk merenovasi rumah sudah ada di halaman rumah. Pelaksanaan renovasi rumah Bapak R yang semula rumah panggung menjadi rumah permanen berlangsung pada tahun 1983. Tapi karena petugas pengukur

tidak memberikan informasi apa-apa, terlebih kalau nantinya akan dibayar maka Bapak R hanya menerima ganti rugi sesuai rumah panggung yang awal.

Setelah uang ganti rugi secara tunai diterima, Bapak R mendapat instruksi dari pemerintah untuk pindah ke mana saja yang penting keluar dari desa Padajaya. Namun, ada juga pihak yang justru mengatakan lebih baik masyarakat tinggal saja dulu di dusun selama air belum ada. Karena pada rencanya dusun ini akan dibendung, jadi sebelum benar-benar air datang dan dibendung *mendingan* tetap tinggal.

Masyarakat dibolehkan untuk mengajukan tanah yang terlewat untuk mendapatkan pembayaran susulan. Pada tahun 1994 akhirnya dilakukan pendataan ulang. Petugas langsung mendatangi tanah-tanah yang diajukan sebagai tanah yang terlewat. Setelah ada pendataan tahun 1994, sempat ada pendataan lagi pada tahun 1999 dan 2009. Namun, hingga saat ini tetap tidak ada tindak lanjut yang konkrit dari pemerintah dan pihak proyek. Demi meraup keuntungan dalam pembayaran ganti rugi kali ini, pada saat pendataan tahun 1999, warga saling meminjam pagar dan kandang kambing. Jadi pagar dan kandang kambing tersebut dipindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Bahkan ada juga yang membangun makam palsu.

Selang pendataan pertama hingga pendataan kedua ini, menurut Bapak R tidak ada kejadian yang mencolok. Semuanya berjalan seperti biasa, warga tetap bertani dan beraktifitas seperti biasanya. Hanya saja setelah pendataan kedua ini sosialisasi migrasi lebih gencar dari sebelumnya, meskipun tidak pernah ada paksaan dari pemerintah kepada masyarakat untuk keluar dari dusun dan ikut migrasi. Migrasi masih dijadikan pilihan, bagi yang berminat bisa ikut dan bagi yang tidak berminat bisa tetap tinggal.

Menurut penuturan Bapak IC dan Bapak R aktor yang sangat penting yang harus saya temui adalah Bapak AN. Selain Bapak AN terlibat langsung pada saat pendataan awal karena saat itu dia menjabat sebagai Punduh (Kepala Dusun), sampai saat ini Bapak AN juga dianggap sebagai sosok yang paling dekat dengan

birokrasi pemerintahan yang lebih tinggi dan paling mengerti perkembangan masalah proyek bendungan Jatigede.

Bapak AN (70) tinggal berdua dengan istrinya Emak Enen (60). Keempat anaknya sudah menikah semua. Anak pertamanya bekerja sebagai guru di SMPN Wado, Bapak Ence. Anak keduanya Bapak Ade Mulyana punya usaha di bidang perkayuan/ material di Jakarta. Anak ketiganya Bapak Usep, dan anak keempatnya bernama Tete Entin yang juga sudah menikah dan tinggal di Jakarta.

Bapak AN yang berasal dari dusun Sundulan ini tinggal di dusun Bantarawi sejak menikah dengan Emak Enen pada tahun 1965. Keluarga Bapak AN merupakan keluarga yang terkenal sebagai keluarga yang kaya raya di desa Padajaya, terutama di dusun Bantarawi. Bapak AN berasal dari keluarga yang kaya dan secara turun temurun berada di area yang memiliki *power*⁴¹. Bapak AN menikah dengan Emak Enen yang merupakan anak dari Almh.Emak Iya yang juga memiliki kekayaan materi yang lebih banyak dibandingkan warga yang lain. Posisi *prestise* Bapak AN juga ditunjang oleh profesi anak pertamanya yang menjadi guru⁴² dan anak-anaknya yang lain sukses memiliki usaha di Jakarta. Oleh karena itu tidak heran jika Bapak AN adalah satu-satunya orang yang memiliki 'rumah hantu' paling banyak di dusun Bantarawi. Kedudukannya sebagai Punduh pada tahun 1980-an, juga masih menyisakan aura kepemimpinan tersendiri. Sehingga masyarakat masih menghormatinya sebagai sesepuh kampung, apalagi Bapak AN dipandang dekat dengan para birokrat di PEMDA dan paling *update* masalah perkembangan proyek Jatigede.

Rumahnya yang berukuran 20 bata terletak berdekatan dengan rumah mertuanya, Almh.Emak Iya, hanya terpisah oleh *balong* atau kolam ikan kecil. Di belakang rumah ada kandang kambing berukuran 6m², selain itu ada gudang pupuk dengan ukuran 20m², dan gudang padi 24m² yang letaknya masih satu atap dengan rumah Almh.Emak Iya. Rumah ini dibangun di atas tanah seluas 30 bata.

⁴¹ Menurut info yang saya dapatkan dari beberapa warga, keberadaan Bapak AN dan beberapa kerabatnya yang berkecimpung di dunia politik meskipun dalam kasta kecil merupakan aspek keturunan.

⁴² Guru merupakan profesi yang sangat dibanggakan dan dinilai tinggi oleh warga masyarakat dusun Bantarawi. Hal tersebut disebabkan oleh gaji dan tunjangan yang diperolehnya terhitung cukup besar bagi ukuran pendapatan rata-rata warga pedesaan.

Sehari-hari Bapak AN mengolah sawah seluas 300 bata miliknya, yang tentu diburuhkan kepada petani lain yang tidak memiliki sawah sendiri atau petani yang memiliki lahan kecil dan mencari tambahan penghasilan. Saya pribadi sangat jarang melihat Bapak AN turun ke sawah. Hanya saja sempat saya melihat Bapak AN ataupun Emak Enen mencari rumput untuk makan kambing-kambingnya. Selain itu Bapak AN juga memiliki aset berupa hutan jati 150 bata di dusun Bantarawi dan 300 bata di dusun Sundulan.

Pada awalnya, Bapak AN dan keluarga tinggal di Bantarawi Landeuh. Rumah di Bantarawi Landeuh sudah sempat didata pada tahun 1982 dan dibayar pada tahun 1986. Kemudian Bapak AN menjual rumahnya sekitar tahun 1990 kepada adik iparnya dan Bapak AN membeli rumah adik iparnya yang terletak di Bantarawi Tonggoh yang sekarang ini ditempatinya (barter). Sejak pembayaran periode pertama tahun 1984-1986, yang mana khusus untuk dusun Bantarawi dilaksanakan pada tahun 1986, hanya ada sedikit tambahan dalam rumah Bapak AN yaitu ruang dapur yang dibangun pada tahun 1990-an, terhitung sejak dia pindah ke rumah tersebut. Rumah dan tanah Bapak AN ini terlewat pendataan sejumlah 10 bata, termasuk dapur, sumur dan WC yang belum dibayar sama sekali karena terhitung bangunan baru. Aset lain milik Bapak AN yang terlewat pendataan yaitu sawah kurang lebih seluas 150 bata dan tanah darat di Sundulan yang semula 300 bata hingga saat ini baru terbayar 35 bata. Hutan jati miliknya juga terlewat, tapi Bapak AN tidak mengetahui pasti hutan jati yang dimilikinya tersebut sudah terukur seberapa jauh. Karena pada saat pembayaran atas kebun jati tersebut Bapak AN hanya menerima uang Rp 150.000,- tanpa ada perincian yang jelas. Selain di dusun Bantarawi ini Bapak AN juga memiliki tanah di desa Cidadap yang sudah diajukan tapi belum mendapat surat merah⁴³.

Cerita semakin menarik saat Bapak AN sudah mulai antusias memperlihatkan kepada saya bagaimana ia merasa perannya sangat berpengaruh bagi nasib warga masyarakat dusun Bantarawi khususnya akibat tertunda-tundanya pembangunan bendungan Jatigede. Pengalaman Bapak AN sebagai Punduh 21 tahun silam tidak membenamkan ingatannya. Bapak AN ingat betul

⁴³ Semacam surat bukti pendataan. Jika masyarakat sudah menerima pembayaran surat merah ini akan ditukar dengan surat putih.

jumlah KK di dusun Bantarawi pada tahun 1980 ada 127 KK, dan khusus RT 04 yaitu wilayah Bantarawi Tonggoh ini ada 30 KK. Bapak AN mengaku masih menyimpan data-datanya, tapi saya tidak diperbolehkan untuk melihatnya. Disamping data-data KK tahun 1980-an Bapak AN juga mengaku masih menyimpan semua dokumen yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sampai pembayaran ganti rugi 1986 dan pengukuran per-periodenya. Sayang sekali, setelah berulang kali saya bujuk pun Bapak AN tetap tidak ingin memperlihatkan dokumen-dokumen tersebut.

Sebelum diangkat menjadi Punduh, Bapak AN memegang posisi sebagai LMD⁴⁴ di desa. Pada saat periode pembayaran tahun 1986 Bapak AN kembali ke jabatan LMD. Setelah jabatan ini digantikan oleh Bapak Ojo, Bapak AN berhenti berkecimpung secara struktural di desa. Keterlibatannya di desa membuat Bapak AN mengenal baik para pihak dari Satker proyek bendungan Jatigede, seperti Ir.Kasiman dan Ir.Rizal⁴⁵. Bapak AN menyarankan saya untuk bertemu dengan kedua orang ini jika saya hendak berkunjung dan menggali berita dari pihak proyek bendungan Jatigede. Hingga saat ini, Ir.Kasiman dan Ir.Rizal adalah pihak satker proyek yang selalu memberi informasi seputar perkembangan pembangunan bendungan Jatigede kepadanya. Sejauh ini informasi yang didapatkan Bapak AN dari kedua orang ini adalah bahwa target rampungnya bendungan pada tahun 2012 juga masih belum pasti. Di sisi lain menurut informasi dari saudara Emak Enen yang konon adalah seorang jaksa, proyek Jatigede tidak ada harapan untuk bisa selesai dalam waktu dekat ini, apalagi tahun 2011 akan sangat tidak mungkin. Dengan kondisi yang seperti ini Bapak AN merasa bingung untuk merenovasi beberapa kerusakan yang ada di rumahnya, karena diantaranya sudah banyak bagian yang bocor.

Bapak AN sangat mengetahui kisruhnya kondisi pendataan dan pembayaran pada tahun 1984-1986. Bapak AN mengakui dulu ia merasa takut untuk membicarakan masalah pengukuran dan pembayaran. Begitu juga dengan

⁴⁴ Sekarang BPD (Badan Pembantu Desa) yang bertugas mewakili masyarakat dalam merumuskan kebijakan dengan pemerintah di tingkat atas.

⁴⁵ Orang dari pihak Satker proyek pembangunan Bendungan Jatigede yang bertanggungjawab untuk masalah pertanahan dan menjabat hingga saat ini

sekarang ini, meskipun sudah jelas masanya demokrasi, bebas untuk bersuara, tapi ia masih takut dianggap penghambat negara jika banyak berkomentar yang ada kaitannya dengan proyek bendungan Jatigede.

“..jadi mendingan ulah dibahas..” sarannya kepada saya untuk lebih baik tidak membahas permasalahan yang justru sedang saya cari realitanya. Terlihat dari setiap penjelasannya Bapak AN masih memilah-milah mana yang bisa disampaikan dan yang tidak kepada saya. Bapak AN seringkali mewanti-wanti saya untuk tidak menuliskan beberapa hal yang menurutnya kontroversial.

“...kade! Nu ieu mah ulah ditulis nya.. sekedar si eneng tau aja”

(Awat! Yang ini jangan ditulis yah.. sekedar untuk pengetahuan *si eneng* saja).

Saya merasa memasuki sebuah mesin lorong waktu yang menyajikan sebuah adegan masa silam, saat Bapak AN bersedia berbagi cerita kronologis yang dialaminya sejak adanya isu pembangunan bendungan Jatigede ini.

Saat pendataan pertama berlangsung pada tahun 1984 tidak ada pemberitahuan untuk apa pengukuran ini dilakukan, petugas hanya menjawab, *“saya hanya sekedar kuli pengukuran saja”*. Sampai pada akhirnya, pembayaran ganti rugi tahun 1986 berlangsung di kantor desa dengan kehadiran seluruh KK. Bapak AN diberikan semacam surat pernyataan yang harus ditandatangani sebagai tanda terima, tapi ternyata setelah dibaca isinya tentang pembebasan lahan. Kendati ingin memprotes kebohongan ini, Bapak AN dan warga lainnya tidak bisa menolak karena nanti dianggap pembangkang. Tidak transparannya tindakan pemerintah ini, menimbulkan banyak kekacauan. Diantaranya bangunan rumah yang sudah bersertifikat harganya disamakan dengan yang tidak bersertifikat. Ketidakcocokan harga juga tidak bisa diprotes oleh masyarakat, karena takut dibawa ke KODIM diberi bonus siksaan. Kurangnya kepedulian masyarakat pada saat pengukuran berlangsung juga dikarenakan ketakutan warga terhadap isu pendataan ini berkaitan dengan nominal pajak yang nantinya harus mereka bayar.

“Lamun dipasihlan terang mah yen pendataan teh kanggo pembayaran ganti rugi, meureun warga bakal nunjukeun kakayaannana sabaraha loba”

(Jika saja diberitahukan bahwa akan ada pembayaran ganti rugi, maka warga akan menunjukkan seberapa banyak kekayaan mereka yang sebenarnya).

Setelah pembayaran tahun 1986 tersebut tidak ada instruksi yang keras dari pemerintah. Warga diperbolehkan menuliskan apa yang tidak mereka mengerti mengenai pembayaran ini dan kemudian diajukan. Akhirnya, Bapak AN mengajukan tentang pembayaran tanahnya yang terlewat dan harga yang tidak sesuai. Saat pendaftaran tanah terlewat tahun 1987 tersebut, Bapak AN masih tinggal di rumahnya di Bantarawi Landeuh. Pengajuan ini diterima dengan solusi diadakan pendataan ulang. Akhirnya, tahun 1990 diadakan pendataan ulang dan rumah yang ditempatinya sekarang ini masih atas nama adik iparnya. Pendataan ulang ini juga berlangsung kacau.

Pendataan ulang kembali dilakukan pada tahun 1999. Kali itu Bapak AN menyerahkan rumahnya yang sekarang ini kepada adik iparnya. Namun, adik iparnya malah menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak AN karena suaminya meninggal. Tahun 2010 juga diadakan pengukuran tapi hanya sampai di dusun Bojongsalam belum sempat sampai ke Bantarawi karena ada kasus penangkapan Ibu Kuwu CU. Pendataan tersebut hanya sampai di tahap 5, sedangkan dusun Bantarawi berada di tahap 9. Pembagian tahapan ini sesuai dengan rentang sungai Cicaban di sebelah timur dan sungai Cimanuk di sebelah barat. Pendataan dilakukan oleh tim Satker (Satuan Kerja) dari perwakilan desa, proyek dan pemerintah.

Terkait dengan tidak transparannya masalah pengukuran dan kompensasi ganti rugi pada tahun 1986, banyak yang ditangkap karena berani angkat bicara. Emak Enen juga hampir dibawa ke Sumedang karena meminta tambahan bayaran ganti rugi yang sewaktu itu dibayar dengan harga yang tidak sesuai. Hansip juga sempat ditangkap tapi dibebaskan karena termasuk perangkat desa. Tidak hanya ditangkap, banyak dari mereka yang disiksa di KODIM bahkan ada juga yang sampai meninggal. Warga yang menjadi korban tersebut tidak ada yang berasal dari dusun Bantarawi, warga dusun Bantarawi hanya sampai pada tahap diinterogasi. Pandangan warga dusun jika seseorang dibawa ke tempat pemerintahan, seperti KODIM mereka berpikinya orang tersebut ditangkap. Hal

ini lekat kaitannya dengan masa pemerintahan Orde Baru yang didominasi oleh sistem militer. Sayangnya, semua korban penyiksaan tersebut sudah meninggal, yang terakhir adalah warga Cisurat dan baru saja meninggal tahun lalu. Sekalipun saya sempat bertemu dengan para korban ini, Bapak AN merasa sangat yakin kalau mereka tidak akan ada yang berani bicara.

“Cuma saya yang masih hidup yang tau masalah ini”, tegasnya

Bukan hanya Bapak AN dan keluarga yang belum terbayar lunas, menurut Emak Enen ada beberapa warga yang justru belum sama sekali menerima pembayaran ganti rugi sejak pendataan pertama, salah satunya adalah Ibu Warsih⁴⁶. Akan tetapi, menurut Bapak AN walaupun ada yang tidak terbayar adalah karena kepemilikan yang tercantum bukan atas nama yang bersangkutan melainkan masih atas nama orang tuanya. Pewarisan tanah tanpa disertai surat-menyerat yang menguatkan hak milik si ahli waris juga menimbulkan masalah tersendiri. Seperti yang dialami Bapak AN yang menerima tanah warisan dari orang tuanya, dan memang belum terbayar sama sekali atas nama orang tuanya seluas 150 bata. Pada waktu itu jarang yang sudah alih nama dari orang tua ke ahli waris. Di dokumen / buku besar milik proyek masih atas nama orang tua yang dicantumkan, jadi ahli waris / anak terhitung tidak punya hak untuk menerima ganti rugi.

Disamping proses paksa bayar dan pendataan yang tidak transparan, ada kebijakan lain yang meringankan beban warga dusun Bantarawi, seperti adanya kebijakan bebas pajak sejak pembayaran pertama kali pada tahun 1986. Awalnya masyarakat dikenakan pajak yang disesuaikan dengan hasil tani. Menurut Bapak AN sekitar 15 kg padi disetorkan ke kepala desa, dan mereka akan diberikan surat bukti penyetorannya. Pajak ini mencakup bumi dan bangunan yang mereka miliki.

Selain pajak juga ada kewajiban membayar *pancen*, semacam pajak yang dialokasikan khusus untuk membantu keuangan desa. Besarnya yang harus disetorkan adalah 7 kg padi/ 100 bata. Sejak tahun 1986 sampai sekarang kewajiban pajak dihapuskan, tapi *pancen* tetap diberlakukan. *Pancen* tidak selalu

⁴⁶ Saya masih kurang jelas Ibu Warsih yang dimaksud disini, Ibu Warsih istri dari Pak Ici atau Ibu Warsih dari Pak Ita. Karena keduanya pun sama-sama belum mendapatkan pembayaran.

disetorkan dalam bentuk hasil tani seperti padi, bisa juga dalam bentuk uang tunai asalkan sesuai atau sama nilainya. Namun, belakangan ini hampir sebagian besar warga masyarakat dusun Bantarawi tidak lagi membayar *pancen*. Dengan kondisi kehidupan yang semakin tidak stabil akibat pelaksanaan pembangunan bendungan Jatigede membuat warga malas menyetorkan *pancen*. Pihak pengurus desa juga tidak memaksa warga untuk tetap melakukannya.

Aktor lainnya yang tidak kalah penting di dalam penelitian ini adalah Bapak S. Pengalamannya yang pernah menjadi Punduh Bantarawi pada tahun 1990-an, memberikannya gelar khusus yang masih melekat sebagai *Olot*⁴⁷ Sambas. Begitulah warga Bantarawi menyapanya dengan sebuah panggilan yang mengandung rasa hormat.

Saya sangat memaklumi kondisi tempat tinggal Pak Olot yang kurang terurus pada saat saya tahu bahwa Pak Olot (75) hanya tinggal sendiri. Istrinya sudah meninggal pada tahun 2001. Anaknya ada 4, ada yang tinggal di Cibunut, di Pasir Balok, di Batam dan Ceu Erum yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Sebagai anak yang paling dekat, Ceu Erum mengantarkan makanan setiap hari untuk Pak Olot dan membantu ayahnya itu setiap kali membutuhkan sesuatu.

Pak Olot menjadi Punduh selama 4 tahun, sebelumnya ia menjadi Kepala Urusan (KAUR) Ekbang/ Ulu-ulu cukup lama sejak tahun 1980-an. Lama menjadi Ulu-Ulu, Pak Olot tidak mengetahui secara jelas masalah pendataan karena konsentrasi di pengairan.

*“..nya isuk, nya beurang, neupikeun ka peuting teh ngomena cai wae..
solokan..teu cicing di pakantoran da Bapak mah..”*

(pagi, siang, sampai malam main air saja..selokan.. tidak di kantor desa..)

Saat itu, Pak Olot bekerja bersama-sama dengan Bapak (Kuwu) Carli yang kala itu masih menjadi juru tulis selama 2 periode, Bapak H.Ana (Bojongsalam) – pernah menjabat sebagai Kuwu juga - dan Bapak Sumarya (yang juga pernah menjadi Kuwu). Akhirnya, pada tahun 1997 Pak Olot diangkat menjadi punduh

⁴⁷ *Olot* sepadan dengan kata *kolot* yang artinya tua. Dalam konteks cerita ini *Olot* berarti sesepuh/ tetua kampung/ dusun

dan memimpin warga dusun Bantarawi yang saat itu jumlahnya 150 KK. Berbeda dengan sekarang ini, yang menurutnya sudah banyak KK luar. Misalnya, ada yang punya keluarga di Jakarta dan membuat KK di sini juga dengan maksud agar mendapat tunjangan gusuran dengan adanya proyek bendungan ini. Selain itu ada juga KK yang merangkap, si anak yang menikah dan mempunyai keluarga baru akan membuat KK baru dan datanya akan merangkap dengan KK semula dengan orang tuanya. Hal ini juga diharapkan akan memancing tunjangan gusuran ganda nantinya.

Setelah berhenti menjadi punduh, pada periode Ibu Kuwu CU Pak Olot dipaksa untuk kembali menjadi Ulu-ulu dan akhirnya dia menjabat selama 2 tahun (2007-2008). Namun demikian, selama 2 tahun menjabat tersebut Pak Olot baru merasakan gaji. Di periode-periode sebelumnya, Pak Olot mengaku tidak pernah mendapat gaji sebagai Kaur. Selama periode Ibu Kuwu CU ini semua Kaur digaji. Kemudian, pada tahun 2009 Pak Olot benar-benar berhenti beraktifitas di struktur kepengurusan desa.

Terkait dengan pendataan pertama kali, rumah Pak Olot sudah diukur dan dibayar. Saat pendataan tersebut rumah ini berukuran 10x5,5 m², belum ada teras yang permanen diubin seperti sekarang ini. Akan tetapi, saat ini ukuran rumah Pak Olot justru diperkecil menjadi 4,5x8 m². Untuk aset berupa sawah dan ladang, sawah yang Pak Olot olah adalah kepunyaan alm.istrinya. Pak Olot juga belum tahu pasti tanahnya yang mana saja yang terlewat.

“..kudu ningal heula pemetaan waktos pendataan kapungkur, jadi bisa terang kitu nu mana nu teu acan. Da kapungkur oge pengukuran teh ngan ukur ti pojok ka pojok, asal siga teh”

(Harus lihat pemetaan waktu pendataan yang dulu, jadi bisa tahu yang mana tanah yang terlewat. Pengukuran yang dulu hanya mengukur dari pojok ke pojok, seperti asal saja).

Pada saat pembayaran ganti rugi tahun 1986, Pak Olot menerima pembayaran tunai sebesar Rp 170.000,- untuk tanah dan rumahnya. Tentu bukan harga yang setimpal. Setelah pembayaran pertama tersebut, diadakan pendataan

ulang tapi biayanya bukan dari pusat. Instruksi dari pihak proyek bahwa pendataan ulang dipersilahkan tapi dengan catatan biaya pengukuran menjadi tanggung jawab pihak desa. Akhirnya, desa tidak mengandalkan buruh upah seperti pada pengukuran pertama kali melainkan menugaskan para Kaur, seperti Pak Olot sebagai Kaur Ulu-ulu dan Kulisi (keamanan) untuk melaksanakan pengukuran ulang. Selain Pak Olot dan Kulisi, ada juga warga dari dusun Bantarawi yang ikut kuli ukur yakni Bapak Tardi. Berdasarkan hasil data ulang tersebut, perkiraan ada sekitar Rp 1,5 milyar total ganti rugi yang harus dikeluarkan pemerintah. Laporan ini dimasukkan ke pihak desa untuk kemudian diteruskan ke pihak proyek. Namun, hingga saat ini realisasi pencairan dana ganti rugi tidak kunjung ada. Pak Olot merasa tidak jelas pada keadaan hidup yang dihadapinya sekarang ini. Jika dibandingkan pada saat Pak Olot menjabat sebagai punduh keadaannya masih terasa stabil, karena kasus ini sedang mendingin.

Pada kesempatan berikutnya saya menemui seorang warga yang memiliki pengalaman tidak kalah menarik. Bapak IT, merupakan salah satu warga yang kediamannya menjadi *basecamp* para petugas pendataan tahun 1984. Saya pun banyak mendengar cerita darinya. Saat ini Bapak IT tinggal dengan istrinya, Ibu Warsih, yang sudah lama terkena *stroke* sehingga tidak bisa bicara. Bapak IT dan istri memiliki 5 orang anak, meninggal 1 orang jadi tinggal 4 orang dan sudah berkeluarga semua. 1 orang yang tinggal di Sumedang, Bapak Aden tinggal di Bogor, dan ada dua orang yang tinggal di dusun Bantarawi ini juga, yaitu Bapak Agus dan Bapak Adin. Bapak Agus dan Bapak Adin tinggal bersama mertuanya masing-masing. Dulu, Bapak IT dikenal masyarakat dusun Bantarawi sebagai bandar padi.

Setiap kali pendataan, pada tahun 1982, 1987, dan 1999 petugas/ kuli ukur yang bertugas berbeda-beda. Pendataan pada tahun 1999 pimpinan Bapak Aziz berkumpul di *basecamp* dusun Bojongsalam. Untuk pendataan periode tahun 1984 rumah Bapak IT yang menjadi *basecamp*. Selama kegiatan pendataan dan pembayaran tahun 1984-1986 itu, sekalipun mereka tinggal dan tidur di rumah Bapak IT, tetap saja Bapak IT tidak diberikan informasi dan penjelasan untuk apakah pengukuran ini dilakukan.

“.. *teu nyarita nanaon ka Bapak IT, hanas sare didieu oge. Mun ditanya jeung naon iyeu diukar-ukur teh, jawabna saya mah cuma kuli Pak cenah..*”

(Tidak ada cerita apa-apa ke Bapak IT, meskipun mereka tidur disini. Jika Bapak IT mempertanyakan untuk apa pengukuran ini, jawabnya ‘saya cuma kuli Pak’)

Bapak Kasiman juga ada pada saat itu, tapi sama dengan kuli yang lain Bapak Kasiman tidak juga memberikan informasi dan berdalih bahwa ia pun hanya kuli. Kegiatan pendataan dan pengukuran yang tidak transparan ini menyebabkan pengukuran lahan dan bangunan tidak disaksikan dan diamati oleh para pemilik lahan. Terkait masalah transparansi, sebenarnya Bapak IT sempat mengikuti rapat pertama kali mengenai rencana proyek pembangunan bendungan Jatigede yang diadakan pada tahun 1960-an di Cisurat. Rapat yang difasilitasi oleh wadana⁴⁸ ini menginformasikan bahwa tanah ini memang dibutuhkan oleh negara.

Jumlah kuli yang pada saat itu bertugas dan tinggal di rumah Bapak IT ada 12 orang. Pada jam istirahat, sekitar jam 1 siang, para kuli pengukur beristirahat di rumah Bapak IT. Setiap harinya Bapak IT menghabiskan uang sebanyak Rp 5000,-/orang untuk makan 2 kali. Sebenarnya, uang untuk anggaran makan ini sudah disediakan pemerintah melalui kepala desa pada saat itu, yaitu Kuwu Ana (Bojong Salam). Entah mengapa tidak didistribusikan ke *basecamp*. Sehingga Bapak IT harus mengeluarkan dana pribadi.

“*urang nu ngajamu tapi duitna malah didahar ku Kuwu Ana. Imah ieu ge teu ditekén ku Kuwu Ana. Ayeuna jadi bilatung kasur pan.*”

(Saya yang menjamu tapi uang anggarannya di ‘makan’ oleh Kuwu Ana. Rumah ini juga tidak dilegalisir⁴⁹ oleh Kuwu Ana. Sekarang Kuwu Ana jadi *belatung kasur*⁵⁰)

Bapak IT dan istrinya, Ibu Warsih, merupakan orang asli dusun Bantarawi. Rumahnya seluas 25 bata tersebut dibangun di atas tanah dengan luas 50 bata pada tahun 1980 dengan kondisi yang sama sampai saat ini. Rumah Bapak IT ini

⁴⁸ Wadana adalah sebuah jabatan struktural satu tingkat di atas Camat dan satu tingkat di bawah Bupati.

⁴⁹ Tanpa legalisir dari kades, maka pengajuan tanah dan bangunan terlewat tidak dapat diproses.

⁵⁰ Bilatung kasur merupakan istilah untuk orang yang sakit keras dan tidak dapat berbuat apa-apa sehingga hanya menghabiskan usia di atas tempat tidur.

belum terbayar utuh sejak pembayaran perdana tahun 1986. Banyak warga lain yang juga terlewat pendataan secara utuh, seperti Bapak Punduh Wardi dan bahkan RT yang sedang menjabat waktu pendataan berlangsung. Kebanyakan dari kasus seperti Bapak IT ini, kemungkinan tanahnya sudah terbayar atas nama orang tua.

Tanah yang dimiliki Bapak IT sekarang ini, ia beli dari adik iparnya atas nama Bapak mertuanya Bapak Soma. Bapak IT membelinya seharga Rp 75.000,- tanpa surat-surat yang menyatakan transaksi jual beli. Data yang sudah masuk dalam pendataan adalah atas nama Soma. Bapak IT merasa agak kuatir, jika saja pembayaran ganti rugi dilakukan. Adik iparnya bisa saja kembali mengaku-aku bahwa tanah yang sudah dibelinya itu adalah masih miliknya. Lagipula sewaktu jual beli dari adik iparnya, tidak memakai surat menyurat. Hal tersebut memang kelemahan untuk Bapak IT dan keluarga karena tidak ada surat-surat yang menguatkan jika masalah seperti yang saat ini terjadi. Seharusnya masih atas nama Bapak Soma, ataupun bisa saja atas nama istri Bapak IT sebagai ahli waris yang seharusnya. Kendalanya adalah pada saat itu pembagian polahan⁵¹ warisan hanya ditunjuk-tunjuk saja, tidak ada keterangan tertulis berupa surat warisan misalnya, sekalipun saat itu masyarakat sudah mengenal adanya blanko. Berbeda dengan keluarga Bapak H.Sarya yang juga belum menerima bayaran ganti rugi sama sekali atas rumahnya, tapi mereka memperjuangkan surat-surat sebagai dokumen yang akhirnya disahkan sampai ke tingkat provinsi dan langsung bisa diproses penyelesaiannya hingga saat ini.

Pada saat pendataan tahun 1984 Bapak IT sedang menjabat sebagai hansip. Maka dari itu, Bapak IT ditunjuk oleh desa untuk ikut *kuli* di pendataan. Bapak IT terjun langsung dalam kegiatan pengukuran, memanggul radarnya dan menempatkannya pada titik-titik pos pengukuran. Satu regu pendataan terdiri dari 2 orang. Titik pertemuan antara tahap 1 – 9 ada di tahap 6. Ada dua klasifikasi tanah waktu itu, yaitu sawah dengan harga Rp 9.200,- dan tanah darat Rp 6.200,-.

Dari tahun 1979 warga masyarakat dusun Bantarawi dikenakan pajak, termasuk Bapak IT. Yang bertugas mengambil uang pajak pada saat itu adalah

⁵¹ Polahan adalah tanah untuk diolah

Bapak Wirya (Alm.), biasanya Bapak IT membayar Rp 40.000,-/tahun. Dengan demikian, sepengetahuan Bapak IT dan warga lainnya, pengukuran ini ditujukan untuk pengecekan nominal pajak. Ditambah lagi ada informasi tentang pendisiplinan pajak yang tersiar sekitar tahun 1981. Maka dari itu luas tanah dan bangunan yang dimasukkan ke dalam pendataan tidak sesuai dengan luas sebenarnya. Begitupun dengan aset lainnya seperti kebun, tanamannya tidak ikut dihitung. Dengan alasan warga tidak mau membayar pajak besar, maka lahan yang besar pun diperkecil. Pada saat diketahui pengukuran ini untuk diberikan ganti rugi, permasalahan banyak bermunculan. Pendataan yang tidak sesuai luasnya dan banyak yang terlewat, mulai dipermasalahkan oleh warga.

Selain itu, masalah lain yang timbul adalah salah penamaan hak areal. Misalnya, sawah Bapak IT ini sebagian atas nama ibunya (Ibu Emeh) dan sebagian atas nama Bapaknya (Bapak Parta), pada saat pendataan karena tidak disaksikan malah dicantumkan atas nama Bapak Kasia. Jadi, yang dipanggil untuk penerimaan ganti rugi adalah Bapak Kasia dari dusun Bojongsalam. Begitupun dengan saung Bapak IT yang dibangun di atas tanah yang keliru hak miliknya, namun berhasil dia masukkan ke pendaftaran untuk pendataan ulang.

Belum lama ini Bapak IT mengikuti rapat di desa Padajaya untuk mengadakan pendataan. Pendataan ini ibarat benang kusut. Pemerintah berjanji tidak akan merusak dan merugikan rakyat, nyatanya yang diurus justru masalah elevasi. Masyarakat di dalam daerah calon genangan tidak diutamakan untuk dituntaskan, padahal dampak sosial yang ada di dalam masyarakat ini adalah masalah yang sangat penting. Rapat ini difasilitasi Bapak Tatang, orang yang dikenal warga sebagai 'aktifis' Jatigede.

“Pendataan teh minangka benang pakojot, rek diluruskeun caritana ku pemerintah tapi kunaon malah nguruskeun masalah elevasi”

(Pendataan itu layaknya benang kusut, pemerintah hendak meluruskannya tapi mengapa malah mendahulukan masalah elevasi)

Ada petugas yang menyarankan Bapak IT untuk mengajukan tanah mana saja yang dimiliki dan terlewat pengukuran, dan Bapak IT mengajukan tanah

bagian istrinya. Pendataan ulang pun berlangsung pada tahun 1987 dengan tindak lanjut yang nihil dan disusul pendataan kembali pada tahun 1999 tanpa ada realisasi pembayaran hingga saat ini.

Selain mengusulkan keluarganya sendiri, Bapak IT juga membantu keluarga yang lain yang senasib dengannya untuk mengajukan tanah-tanah yang terlewat. Dua keluarga yang dibantunya lolos dalam daftar pendataan dan calon penerima pembayaran, tapi nama keluarga Bapak IT belum juga tercantum. Bapak IT mengkonfirmasi masalah ini ke Kuwu, Kuwu menyuruh Bapak IT bertanya ke Bapak Tahya bagian PU pada saat itu. Dari PU Bapak IT disuruh ke Bapak Surojo perwakilan langsung dari pihak proyek. Bapak IT segera mendatanginya dan mempertanyakan nasibnya yang tidak kunjung keluar dalam daftar nama calon penerima pembayaran pendataan ulang. Bapak Surojo menjawab bahwa proyek sebenarnya siap bayar asalkan ada rekomendasi dan legalisir dari Kuwu Ana. Bermula dari situ kepercayaan Bapak IT terhadap Kuwu Ana jadi hilang, karena menurut Bapak IT Kuwu Ana sudah banyak mengambil kesempatan yang merugikan masyarakat dalam masa jabatannya.

Akhirnya, Bapak IT dengan didampingi tetangganya kembali menghadap Kuwu Ana dan mengganyangnya pada saat pembayaran, tapi dileraikan oleh intel dan disarankan untuk pulang ke rumah. Di bagian ini, terlihat betapa Bapak IT sangat kecewa dan benci pada Kuwu Ana. Yang sangat membuatnya kecewa adalah Bapak IT yang menjamu para petugas kuli ukur, bahkan pada saat mereka meminta sendiri menu makanan untuk makan siang pun disediakan oleh Bapak IT. Akan tetapi, hal tersebut tidak juga membukakan pintu keadilan untuk Bapak IT.

“Digilidid, didaluluh, diheesan nepi ka teu dibayar kitu”

Akhirnya, Bapak IT dipertemukan sang intel dengan kepala Agararia yang akhirnya menyarankan Bapak IT untuk berwirausaha supaya tidak terlalu memusingkan masalah ganti rugi.⁵²

⁵² Akan tetapi saya justru melihat saran ini lebih kepada sebuah trik untuk menjauhkan orang-orang yang vokal dalam menyuarakan suaranya dan berani protes pada saat itu. Karena, tidak sedikit juga yang berani bersuara ditarik secara paksa dan disiksa di KODIM, bahkan ada yang

“Bisi dicomot, ulah ngahalangan mendingan ka Bogor. Mun aya nu nolak, langsung dipanggil. Sayangna geus maraot”.

(Daripada disangka membangkang dan ditarik, lebih baik jangan menghalangi dan pergi saja ke Bogor untuk usaha. Memang ada yang menolak dan mereka langsung dipanggil. Sayangnya mereka sudah meninggal semua).

Bapak IT mengikuti saran ini dan membuka usaha di bidang perkayuan pada tahun 1997 di Seseapan, Bogor. Usahanya pun berjalan lancar hingga mencapai kesuksesan dan banyak kerabat juga warga lainnya yang mengikuti jejaknya membuka usaha kayu/*kusen*. Ada 3 pangkalan yang sempat dibukanya di Bogor. Tahun 2005 Bapak IT mengalami bangkrut. Kebangkrutannya ini bukan semata-mata karena kondisi usaha yang sedang menurun. Tetapi karena pengaruh maraknya isu harta karun dan UB (Uang Brazil)⁵³ pada masa krisis moneter 1998. Istrinya juga sangat berambisi sekali untuk mencari harta karun itu. Mereka pun mengejar keberadaan harta karun fiktif tersebut sampai harta mereka terkuras. Sekarang tinggal ada 1 pangkalan di Bogor dan dikelola anaknya, Bapak Ade.

Realisasi pendataan pertama kali dilaksanakan pada tahun 1982-1984. Disusul pembayaran ganti rugi pada tahun 1986, tapi semua itu dilakukan secara tidak transparan kepada masyarakatnya. Selain itu, cerita tindakan represif dari pemerintah terhadap warga masyarakat juga terjadi. Pendataan susulan untuk tanah dan bangunan yang terlewat pun terus dilakukan dengan dipenuhi banyak manipulasi dari warga masyarakat yang diprovokasi oleh oknum dari pemerintah

sampai meninggal. Yang membangkang pada saat itu, konon dianggap PKI dan ditindak oleh PEMDA.

⁵³ Pada masa krisis 1998-1999 banyak yang tertarik dan termakan isu memburu Uang Brazil (UB). Banyak orang yang bermimpi – lewat bisnis Uang Brazil bisa cepat kaya. Cerita seputar Cruzados memang begitu menggiurkan. Ratusan juta dan bahkan milyaran rupiah bagi para pencari UB, seperti sudah di tangan. Bisnis UB ini boleh dibilang bisnis misterius. Sulit untuk mendapatkan fakta kebenarannya, umumnya orang-orang yang terlibat dalam pencarian dan memburu UB, hanya didasarkan kepada kabar-kabar isapan jempol belaka. Kabar yang diperoleh biasanya hanya dari mulut ke mulut. Satu orang bilang, yang penting asal ada uang rupiahnya, UB sudah ada yang menyiapkan berapa pun banyaknya yang dibutuhkan. Anehnya, antara si pembawa berita yang konon ada orang memiliki UB dengan yang memiliki uang rupiah, belum pernah bertemu. Rumor yang beredar seputar bisnis UB ini bervariasi. Sekelompok pemburu menyebutkan pembelian uang tersebut tidak bisa dalam bentuk pecahan melainkan harus utuh dalam sebuah peti dengan nilai sekitar Rp 1 milyar. Kelompok lain justru dengan nada meyakinkan, asal benar-benar UBnya ada, berapa juta pun bisa ditukar rupiah. (Cakrawala Tandang Edisi No.5 Tahun I,1999:16)

sendiri. Hingga saat ini pendataan-pendataan ulang tersebut tidak juga menghasilkan pembayaran ganti rugi yang tuntas.

3.2 Migrasi yang Menyedihkan

Warga yang terkena proyek bendungan Jatigede banyak yang ikut program pemindahan dari pemerintah. Pemda memang memberikan beberapa pilihan bagi warga. Boleh pindah ke tempat pilihan sendiri, transmigrasi atau pindah ke tanah bekas perkebunan di beberapa kabupaten di Jawa Barat. Data yang didapat dari Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH, pada tahun 1994-1999 yang tercatat 4.962 jiwa, atau 1.475 keluarga. Paling banyak bertransmigrasi ke propinsi Riau, ada 2.128 jiwa yang berasal dari seluruh desa calon terkena genangan.(lihat tabel)

Tabel 3.2.1 Data Transmigrasi

Tahun	Keluarga	Jiwa	Daerah Tujuan
1994/1995	357	1.237	Riau, Jambi
1995/1996	437	1.477	Sumbar, Sulsel
1996/1997	308	1.008	Bengkulu, Kalbar
1997/1998	348	1.157	Kalteng, Kalsel
1998/1999	25	83	dan Irian Jaya

Sumber: Cakrawala Tandang, 1999

Karena pelaksanaan proyek selalu ditunda-tunda dan belum ada kepastian, banyak transmigran dan migran yang kembali lagi ke kampung halamannya semula. Apalagi beberapa tahun yang lalu, pemerintah membolehkan penduduk yang sudah mendapatkan ganti rugi sekalipun, untuk menggarap tanah/sawahnya.

Adapun yang ikut migrasi ke tanah bekas perkebunan di Arinen Kec.Pakenjeng Kab.Garut, tercatat 407 jiwa. Mereka berangkat tahun 1996 tercatat 32 jiwa (10 KK) dan tahun 1998 375 jiwa (85 KK)⁵⁴. Selain ke Arinen,

⁵⁴ Cakrawala Tandang Edisi No. 06 Tahun I 10-16 Februari 1999, hlm.5

pemerintah menyediakan juga lokasi migrasi di daerah Cianjur, salah satunya ke wilayah Koleberes, Cianjur tercatat 85 jiwa (Cakrawala Tandang,1999:5). Selain itu ada lokasi di beberapa kabupaten lain di Jawa Barat, meski fasilitasnya belum memadai saat itu karena memang bendungan Jatigedeynya sendiri belum ada kepastian.

Tidak lama setelah pembayaran pada tahun 1986, ada sosialisasi transmigrasi pertama kali ke Bengkulu karena proyek pembangunan bendungan Jatigede. Sosialisasi ini dilakukan melalui penayangan film layar tancap yang isinya adalah dokumentasi tentang lahan transmigrasi yang sedang dibuka. Warga menolak program transmigrasi tersebut dan marah sampai hampir merusak tiang layar tancapnya. Menurut mereka film itu hanya *ngabibita*.⁵⁵

Salah satu warga Bantarawi yang ikut transmigrasi ke Bengkulu adalah Mang Ihir. Mang Ihir ikut berangkat ke Lubuk Linggau, Bengkulu pada tahun 1986. Ini merupakan transmigrasi pertama kali akibat proyek bendungan Jatigede. Dari desa dibawa ke Bandung ditampung dibarakan selama satu bulan tanpa ada pelatihan, diteruskan ke Jakarta menunggu selama 2 minggu. Sesampainya di Bengkulu diajak *muter-muter* dulu biar para transmigran tidak hafal jalan. Menurut informasi yang didapatkannya saat akan berangkat, rumah sudah disediakan. Mang Ihir hanya tinggal buka kunci dan cari nomer rumah. Setibanya di lokasi, sebagian dari mereka malah dikumpulkan di masjid dan sebagian lagi di rumah sakit. Yang bersama Mang Ihir ada sekitar 8 KK dan yang dari Desa Padajaya digabung sama orang-orang DKI Jakarta. Orang-orang DKI Jakarta ini tidak membawa apa-apa, sedangkan Mang Ihir dan yang lain membawa segala macam, seperti bibit, kasur, dan peralatan rumah tangga. Mungkin saja mereka emosi, karena mereka saja belum mendapatkan kepastian bagian lahan, sekarang sudah datang lagi transmigran baru. Akhirnya keributan pun terjadi. Cerita Mang Ihir, Pak Pardi sampai sembunyi di dalam kasur. Tetapi, mereka tidak berani masuk hanya memukul-mukul dinding luar yang terbuat dari triplek dan kaca. Keesokan harinya mereka bersikap seolah tidak ada masalah apa-apa. Yang dikerjakan para migran di sana hanya *ngalaliwet/* masak-masak bersama-sama

⁵⁵ *Ngabibita* artinya membuat angan-angan untuk mengingini sesuatu

yang lain di samping balai tempat berkumpul. Mang Ihir akhirnya juga ikut sebagai kuli borongan dan bergotong royong membangun rumah bagi masing-masing mereka, para transmigran. 1 rumah alakadarnya bisa dituntaskan dalam waktu 1 hari. Mang Ihir pun sempat menempati rumah yang dibuat itu.

Mang Ihir tinggal setahun disana dari tahun 1986-1987. Disana selama 4 bulan ikut membangun rumah, lalu mengantar istri pulang, balik lagi ke Bengkulu dan kembali lagi ke kampung karena sakit dijemput oleh bapaknya. Pada saat berangkat ke Bengkulu, rumah di sini sudah dibayar. Mang Ihir memutuskan untuk ikut bertransmigrasi karena seluruh keluarga ikut. Karakteristik lahan di Bengkulu kering dan kiri-kanan jurang/ tebing.

“Kaditu lebak kadieu lebak,” (ke sana jurang ke sini jurang)

Lahan tersebut hanya cocok untuk menanam singkong, pisang, dan padi gogo. Sehingga Mang Ihir tidak bisa bertani di sana. Tapi, yang terpenting adalah Mang Ihir merasa tidak aman dan fasilitas seperti pasar jaraknya jauh. Disini meskipun keadaannya tidak jelas menjamin, tapi Mang Ihir merasa betah.

Sosialisasi lewat layar tancap dirasakan kurang berhasil, kemudian muncul survey yang mengatasnamakan LSM. Para surveyor *door to door* mendatangi warga, membawa formulir dan menanyakan daerah relokasi mana yang mereka minati atau mereka kehendaki. Apakah mereka tertarik untuk dipindahkan ke luar Jawa atau justru hanya mau di daerah Sumedang. Hasilnya dilakukan survey lokasi langsung ke desa Cilopang di kecamatan Situraja dan desa Conggeang yang keduanya masih termasuk di kabupaten Sumedang. Namun, setelah survey tersebut tidak ada tindak lanjut lagi. Sama halnya dengan pembayaran, pemerintah selalu berusaha memberi angin segar dengan mengiming-imingi kepastian pada masyarakat.

Pengalaman migrasi yang nyata dirasakan oleh Bapak D. Bapak D adalah salah satu warga dusun Bantarawi yang ikut migrasi ke Arinen, Garut. Bapak D berangkat sekeluarga ke Arinen 12 tahun yang lalu. Anakanya yang paling besar pada saat itu masih SMP dan anakanya yang paling kecil suka bermain-main, berkejar-kejaran di kandang sapi. Keikutsertaan Bapak D ke Arinen diawali oleh

ajakan kerabatnya, Bapak Pardi. Ada 45 orang migran dari desa Padajaya. Dalam serangkaian program migrasi ini ia dibekali pelatihan peternakan di Agro selama 2 hari. Pelatihan peternakan ini dilakukan karena kemungkinan akan ada hibah sapi 10 ekor.

Bapak D merasakan di lokasi migrasi itu adanya ketidakadilan dalam hal pembagian kualitas lahan. Ada yang kebagian pegunungan dan ada yang tanah pasir seperti yang Bapak D dapatkan. Bapak D mencoba untuk mengolahnya dengan melakukan beberapa eksperimen untuk tanah tersebut. Bapak D tidak mendapatkan bagian *serang* atau lahan untuk sawah jadi tidak bisa menanam padi.

“mun kabagean serang atawa tanah pegunungan siga batur, nya meureun ku bapak rek diteruskeun cicing jeung usaha diditu..”

(Andai saja kebagian serang dan tanah pegunungan seperti orang lain, kemungkinan bapak akan meneruskan untuk tinggal dan usaha disana).

Bapak D pernah melakukan percobaan menanam padi disana, hanya mendapat hasil sebakul kecil. Hasil eksperimennya itu diperlihatkannya sambil mengadukan kondisi tanah pada pengurus disana, Ibu Titi. Kondisi tanah yang Bapak D dapatkan disana strukturnya tanah merah berbatuan kerikil, yang tidak memungkinkan untuk menanam padi. Cocoknya untuk menanam jeruk, petai, singkong, dan bambu. Bapak D mengolahnya untuk kebun singkong, membangun kolam dibelakang kandang sapi.

Selain itu, juga ada investor yang mau memberikan modal berupa kambing dan sapi peras dari Sukabumi kepada Bapak D. Berhubung lahan tidak mendukung Bapak D malah kuatir dan takut untuk mengambil peluang tersebut, jadi tawaran tersebut ditolak. Kalau disini, di dusun Bantarawi Bapak D merasa tidak terlalu sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya rumah dan tanah di Arinem digadaikan, tadinya ada yang mau membeli 10juta tapi Bapak D tidak tertarik. Jadi, walaupun ada kepastian pengosongan di Padajaya, sertifikat tanah di Arinen masih atas nama Bapak D sendiri. Pada saat pemantauan sekitar 3 / 4 bulan Bapak D kembali kesana dan terkejut dengan kondisi rumahnya yang banyak rayapnya, dan sudah tumbuh rumpun bambu yang tidak sengaja

diletakkannya di sekitar kandang sapi. Padahal ia sudah mengeluarkan modal yang lumayan, untuk membangun kandang sapi, pelebaran dan penembokan dapur habis sekitar 3 juta. Bapak D juga mengutarakan di sana ia tinggal berdekatan dengan banyak keluarga yang dikenalnya dari desa yang lain, seperti dari desa Cibogo.

Di Arinen, Bapak D menjadi pengawas lingkungan dan seksi bagian pertanian dan pembenihan di KUD. Juga menjadi bagian pembukuan koperasi simpan-pinjam. Bapak D juga menceritakan bagaimana ia dekat dengan ketua dan divisi pembenihan Bapak Luqman dan Bapak Didi.

Bapak D memproyeksikan masa depan ia dan keluarganya yang tidak mungkin bertani dengan kondisi tanah merah dan berbatu, alhasil Bapak D hanya tinggal 1 tahun disana. Awalnya Bapak D memang tidak memikirkan dan tidak berpikir panjang masalah subur atau tidaknya tanah tersebut, karena pemantauan lokasi saat itu hanya 1 hari, jadi tidak diketahui subur atau tidaknya.

Bapak D merasa tidak kerasan di sana karena masalah tanah yang tidak subur untuk menanam padi. Jadi, untuk mencari celah tanaman apa yang cocok juga tidak bisa cepat-cepat, terburu-buru, intinya butuh waktu. Apalagi harus punya sumbernya/uang untuk modal (*sambil ngasih kode jari*). Menurut Bapak R yang pada saat itu juga mengobrol bersama kami, pemberian peluang pindah ini justru untuk mengolah bukan untuk memetik hasil dan bersantai.

Bapak D menegaskan kondisi disana tidak memungkinkan untuk masa depan. Yang penting andaikan punya jatah *serang* dan tanah yang bagus untuk bertani, mungkin tidak akan terlalu sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapak D menyatakan perasaannya yang tidak tega melihat putra putrinya dan istrinya setiap pagi mau makan tapi tidak ada padi/beras. Selama di sana, untuk kebutuhan sehari-hari Bapak D dipasok dari kampung, dari orang tua dan saudara-saudaranya. Tapi akan sangat tidak mungkin jika terus menunggu pasokan dari kampung.

“kumaha mun kieu terus-terusan? Jadi, mendingan di dieu. Sanajan kondisina teu jelas nu penting masih bisa nyawah...”

(Bagaimana kalau begini terus? Jadi mendingan disini meskipun kondisinya tidak jelas yang penting adalah masih bisa bertani).

Namun demikian, ada juga yang masih bertahan disana salah satunya yang dari Bandung, itu pun karena didorong modal dari Bandung.

Dalam pelaksanaan transmigrasi ini Bapak IC cukup memegang peranan penting. Menurut penuturan beberapa warga Bapak IC adalah oknum yang memalsukan data transmigran dari luar Padajaya untuk masuk ke bagian Padajaya (transmigran ilegal). Bahkan dia juga membantu perkawinan palsu dari beberapa warga yang ingin transmigrasi. Jadi tidak mengherankan jika beliau cukup memiliki pengaruh.

Tidak hanya itu, Bapak IC juga merasakan secara langsung pengalaman transmigrasi ke Riau pada tahun 1997. Bapak IC berangkat bertransmigrasi bersama keluarga, kecuali anaknya yang sekolah. Menurut Bapak IC lokasi transmigrasi di Riau bagus, tapi yang membuatnya tidak kerasan di sana adalah masih adanya kekayaan yang belum tuntas diselesaikan di Bantarawi. Ada tanah yang terlewat, ada bangunan yang terlewat, dan masih belum tahu kapan tuntasnya.

Di lokasi transmigrasi belum ada sama sekali sekolah saat itu. Padahal waktu itu Bapak IC masih mempunyai anak yang duduk di bangku SMP dan SD. Waktu datang ke sana Bapak IC merasa sulit sekali, jangankan sekolah, bangunan rumah kalau ia tidak menuntut dengan paksa maka tidak akan selesai dibangun waktu itu. Di sana Bapak IC mendapat rumah dan tanah, totalnya seluas 2 Ha kebun kelapa sawit dan setengah hektar tanah pemukiman. Yang menjadi masalah adalah fasilitas seperti sekolah, pasar, jauh dan terkait masalah keamanan juga. Pada saat itu, masih banyak orang-orang yang brutal dan banyak teror.

Bapak IC ikut mensurvey lokasi transmigrasi, ke Pulau Burung untuk pembudidayaan kelapa hibrida bersama dengan Bapak Sekda (sekretaris daerah), tapi tidak cocok. Pada saat survey Bapak IC mengeluarkan ongkos sendiri, dan biaya transport tersebut diganti oleh petugas di sana. Menurut Bapak IC tidak semua wilayah di Riau bagus untuk kelapa sawit. Bahkan ada yang bagusnya

untuk kebun karet, nanas, dan lain-lain. Hanya saja wilayah yang dipilihnya saat itu memiliki kemungkinan yang cukup baik untuk masa depan. Bapak IC juga mendapat bagian tanah yang bagus, tapi karena jauh untuk akses kesana-kesini, penerangan listrik tidak ada, jalanan masih tanah, semua hal tersebut menjadi kendala tersendiri.

Di sana Bapak IC tinggal 11 hari. Yang bertahan di sana cuma 4 keluarga dari Bojong Salam, yaitu Bapak Jono, Bapak Asep, Bapak Tedi, dan Bapak Marja. Transmigran yang berasal dari Bantarawi kembali semua. Konon, mereka yang tinggal hidup dengan sukses di sana. Bapak IC mengaku bahwa tanah dan rumahnya di sana tidak dijual, melainkan diberi ganti rugi. Sekarang, rumah dan tanahnya dipegang orang lain.⁵⁶ Kendati saat ini sedang ramai transmigrasi ke Kalimantan, tapi Bapak IC kurang berminat karena yang ikut transmigrasi menurut beliau harus yang tenaganya masih kuat. Sebab kalau tidak betul-betul mengolahnya sama saja ketinggalan seperti di sini.

Pak Olot juga sempat ikut program transmigrasi ke Riau. Ketika itu Pak Olot sedang menjadi punduh dan sebagai punduh Pak Olot bertugas menyeleksi semua peserta transmigrasi. Pak Olot ikut serta pergi ke lokasi transmigrasi hanya saja dalam rangka mengecek, biaya dan akomodasi dari Pak Olot sendiri. Petugas di Bandung menyarakannya turut mendaftar untuk ikut serta transmigrasi. Masalah dokumen dan pendaftaran akan dipermudah dan langsung diproses di Sumedang. Akhirnya, Pak Olot mengikuti saran ini.

Sebelum diberangkatkan ke Riau, Pak Olot dan peserta lainnya mendapatkan pelatihan di Bandung selama satu bulan. Pak Olot hanya tinggal satu bulan di Riau. Berhubung ia harus memperjelas status jabatannya di Bantarawi. Selama kepergiannya itu, Pak Olot melimpahkan tugas ke RT tapi RT tidak mau. Akhirnya ada pejabat yang naik menggantikannya. Sekembalinya ia dari Riau diadakan pemilihan kembali, karena warga masih percaya kepada Pak Olot, maka ia pun naik lagi menjadi Punduh. Tanah bagiannya di Riau yang

⁵⁶ Kalau menurut saya sama saja dengan dibeli orang

mencakup lahan olahan 2 Ha dan pekarangan ¼ Ha akhirnya dijual oleh Pak Olot. Pak Olot merasa menyesal karena tidak mencoba untuk bertahan di sana.

“..lamun masih Bapak pertahankeun tanah eta, meureun ayeuna hirup Bapak ges geunah..”

(Andai saja Bapak masih pertahankan tanah itu, mungkin sekarang hidup Bapak sudah enak).

Pak Olot mengakui daerah Riau yang paling enak, rumah sudah disediakan dan yang terpenting lahannya subur. Kalau ada pemberangkatan lagi ia berminat ikut transmigrasi asalkan peluangnya di bidang kelapa sawit.

“..daripada cicing di dieu, kaayaan teu jelas..”

(..daripada diam di sini (Bantarawi), keadaannya tidak jelas)

Menurutnya, di desa Leuwihideung sudah ada pemberangkatan lagi. Lain halnya dengan desa Padajaya, karena kuwunya bermasalah, diantaranya masalah korupsi kekayaan desa, jadi pelaksanaan program yang berkaitan dengan proyek Jatigede pun terhambat. Tapi menurut pemikiran Pak Olot, pada hakikatnya masalah aset desa yang habis itu karena kuwu sebelumnya.

Bapak R, Bapak AN, Bapak IT tidak pernah mengikuti program migrasi ataupun transmigrasi. Mereka tidak tergiur dengan bagian lahan yang memungkinkan mereka mendapatkan peluang baru di tempat yang baru. Alasannya, karena sudah tua jadi rasanya tidak akan seproduktif yang muda untuk menggarap lahan baru. Selain itu, mereka juga masih berat meninggalkan kampung halaman terlebih masih menggantungnya kepastian tentang nasib lahan mereka karena tertundanya pelaksanaan pembangunan bendungan Jatigede.

Migrasi sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengosongkan wilayah genangan dan memindahkan warga masyarakat dilakukan pertama kali pada tahun 1986 tepat setelah pembayaran ganti rugi. Migrasi pertama ke Bengkulu ini mengisahkan banyak keprihatinan. Warga masyarakat dijanjikan rumah dan lahan, tapi sesampainya di sana hanya ada lahan hutan yang belum sama sekali dibuka. Tidak ada rumah dan lahan siap olah seperti yang dijanjikan.

Mereka mencoba bertahan di sana dengan kondisi kelaparan dan keributan yang terjadi dengan migran yang berasal dari daerah lain. Begitu pula yang terjadi pada migrasi ke Arinen, Garut dimana warga masyarakat diberikan lahan yang tidak sesuai dan tidak menjamin kebutuhan hidup mereka. Dengan faktor-faktor yang mereka anggap resiko tersebut, tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk bertahan sampai akhirnya banyak dari mereka yang memutuskan kembali ke kampung halamannya.

3.3 Lumbung Petani

Meski dalam kondisi kehidupan yang terkatung-katung, di mana tanah pertanian dan tempat tinggal mereka terancam oleh genangan akibat pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda, masyarakat Bantarawi masih bertahan. Mereka menjalankan aktifitas seperti biasanya, menggarap sawah, mencari rumput untuk ternak mereka, berinteraksi dengan sesama warga, melakukan transaksi jual beli, dan lain-lain. Memang ada pengalihan-pengalihan khususnya dalam aspek mata pencaharian, terutama pada generasi muda. Mereka tidak lagi terlibat secara ketat di dalam aktifitas pertanian. Mereka mencoba mencari keberuntungan lain dengan merantau ke kota. Rata-rata mereka ikut saudara yang sudah bekerja di sana dan kebanyakan di bidang perkayuan/*kusen*. Bagi yang tidak minat mengadu nasib di kota mereka memilih menjadi tukang *ojek*. Cukup menjanjikan memang, terlebih saat kendaraan umum mobil omprengan tidak lagi beroperasi karena kondisi jalan yang semakin rusak. *Ojek* bukan lagi transportasi alternatif saat ini, tapi sudah merupakan transportasi utama. Bahkan bagi keluarga yang tidak bisa mengantar anaknya ke sekolah berani mengambil resiko untuk memanggil *ojek* langganan yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 180.000,-, karena merasa iba melihat anaknya harus berjalan kaki sejauh 1 km di tengah terik matahari.

Bagi mereka yang merantau di kota memang dipandang lain di masyarakat. Biasanya mereka lebih dianggap berusaha dibandingkan yang hanya tinggal di desa. Setiap bulan mereka mengirim uang untuk orang tua mereka. Orang tua

mereka akan mengalokasikan uang itu untuk memenuhi biaya pertanian. Sawah seakan menjadi unsur penting dalam kehidupan mereka. Dari uang yang ada, keluarga petani di dusun Bantarawi akan mengutamakan kebutuhan sawah/pertanian mereka.

Untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari Bapak R mengandalkan hasil tani dari sawahnya sendiri dan ditambah dengan dana tunjangan dari DKM. Panen padi kemarin menurut Bapak R hasilnya sedang-sedang saja, “*rugi henteu, untung oge henteu, yaahh lumayanlah...*”. Selain menanam padi, Bapak R juga menanam sayur mayur di musim *paceklik*. Semua hasil taninya diprioritaskan untuk konsumsi keluarga sampai waktu panen berikutnya tiba.

Setelah panen padi, mereka akan menyimpannya dan memastikan bahwa hasil yang mereka dapatkan di panen kali ini akan cukup untuk makan mereka sampai waktu panen berikutnya tiba. Hampir tidak ada dari mereka yang saya temukan dengan sengaja menjual padinya, atau dengan kata lain mengkomersilkan hasil panennya. Mereka baru akan menjual sebagian kecil dari simpanan mereka jika mereka merasa terdesak kebutuhan. Kebutuhan disini pun merupakan kebutuhan pokok mereka. Pada umumnya uang yang mereka dapatkan dari menjual sebagian kecil padinya juga digunakan untuk modal bertani mereka.

Di musim *paceklik*, yaitu saat aktifitas menanam padi rehat sejenak, warga dusun Bantarawi menanam tanah mereka dengan sayur mayur. Hasilnya seperti terung, cabai, kacang panjang, kacang tanah, ubi, pisang, oyong, bawang merah, jagung, dan singkong. Selain diutamakan untuk konsumsi keluarga, hasil perkebunan ini juga dibagi ke tetangga dekat yang masih merupakan kerabat, seperti yang dilakukan Ibu A. Jika masih berlebih juga baru dijual, salah satunya kepada Bapak Uman yang masih warga dusun ini. Sayuran tersebut nantinya akan dijual kembali oleh Bapak Uman, dengan menjajakannya keliling dusun bahkan sampai ke desa lain.

Awalnya memang hanya 1-2 orang yang menjual hasil pertanian, berkeliling ke dusun-dusun tetangga, Cidadap, Cicaban, dan Cadas Ngampar/Sukakersa. Sekarang jadi banyak yang ikut dan ketagihan diantaranya adalah Ceu

Erum dan Bi Acih. Mereka biasa mengambil sayuran dari Ibu A. 4-5 hari Ibu A memanen terung hijau di kebun dan hasilnya bisa sampai 1 karung. Kadang Ibu A bingung akan diapakan terung ini, karena tidak terlalu niat dijual hanya menunggu ada orang yang butuh dan beli ke rumah. Dengan adanya beberapa orang yang berminat untuk berjualan ini, mereka mengambil terung dengan harga Rp 1.000,-/3 buah, kangkung Rp 800,-/ikatan besar dan mereka akan menjualnya kembali dengan harga yang telah mereka *mark up* sebagai profitnya. Sistemnya juga ringan, mereka cukup menyetorkan uang senilai harga jual dari Ibu A sesuai dengan jumlah item yang terjual. Jika ada yang tidak laku akan dikembalikan.

Yang paling potensial adalah menanam tembakau. Menanam tembakau di musim paceklik, ternyata memang sudah tradisi sejak dahulu kala. Bapak R bercerita bahwa sebelum pada masa Orde Lama tahun 1950-an menanam padi hanya mengalami 1 kali masa panen. Meskipun saat itu persediaan air lebih banyak dibandingkan sekarang. Pada saat Orde Baru, panen bisa sampai 2-3 kali, dan tidak ada yang menanam tembakau. Selingan menanam tembakau di musim paceklik adalah program dari pemerintah yang kemudian warga masyarakat dibentuk ke dalam kelompok-kelompok tani. Di dusun Bantarawi ada kelompok tani harapan I dan diketuai oleh Bapak R sendiri. Tapi tidak semua warga di dusun Bantarawi menanam tembakau, hanya yang mau saja.

Bibit tembakau didapatkan para petani dari pemerintah dan dari hasil panen yang disirkulasikan untuk masa tanam berikutnya. Ada bibit tembakau yang terbaru yang disebut bibit Manohara seharga Rp 15.000,-/sendok. Entah mengapa dinamakan demikian. Bibit Manohara ini juga disebut sebagai tembakau Seratus Daun, konon karena pucuknya tidak ikut serta dipetik. Harga jualnya pun cukup tinggi, Rp 5.000,-/ batang. Petani dusun Bantarawi belum ada yang menanam tembakau Manohara, warga desa Wado yang baru menanamnya.

Penanaman tembakau ini memang dikhususkan untuk tujuan komersil. Mereka akan mengkonsumsinya jika memang ada lebih dari hasil penjualan, atau ada beberapa batang yang tidak terjual. Aktifitas penjualan tembakau ini melibatkan tiga pihak, yaitu; 1. Penanam (petani seperti Bapak R), 2. Pemelihara (yang bertindak sebagai Bandar yang mengambil hasil panen petani, lokasinya di

Tanjungsari, Sumedang), dan 3. Pengusaha (pihak terbesar yang menguasai pasar makro, mendapatkan pasokan tembakau dari Bandar).

Sistem penjualan tembakau ini dipukul rata dalam hitungan per-areal ladang atau jumlah tanamannya. Misalnya, Bapak R kemarin menjual tembakau sejumlah 1.600 batang pohon. Pada saat waktu panen tiba, Bandar akan datang dengan sendirinya. Bapak R mengajukan harga 5 juta untuk tembakaunya itu, tapi ditawar 2,5 juta oleh Bandar dan sampailah mereka pada kesepakatan di angka 3,2 juta. Setelah *deal* Bandar akan memetik/ memanennya sendiri, tanpa diawasi oleh petani pun tidak masalah karena sudah dibayar di muka untuk masa panen tembakau tersebut. Bandar akan datang setiap 10 hari selama 3 kali masa panen tembakau. Untuk pohon yang sudah tidak bisa dipetik atau kondisinya sudah mengering maka akan dicabut. Daunnya bisa dipakai sebagai pupuk untuk padi. Untuk menjadi pupuk tidak diperlukan proses yang panjang, karena daun tembakau ini akan langsung membusuk jadi hanya cukup dicincang saja. Sedangkan batangnya, setelah dicabut akan dibakar atau dibuang.

Hasil dari penjualan tembakau ini mereka gunakan untuk modal bertani selanjutnya. Di dusun Bantarawi hanya ada 4 orang yang menanam tembakau di musim paceklik, yaitu Bapak R, Uwa Ade, Pak Olot, dan Mang Kana. Yang lainnya lebih memilih menganggur sambil menunggu masa *nyawah* datang kembali. Seperti Bapak IC dan Bapak Ana, mereka tidak tertarik menanam tembakau dengan alasan resiko untuk menyiramnya. Mereka akan mengeluarkan dana untuk sewa mesin sedot air. Berbeda dengan Bapak R yang sudah memiliki mesin sedot air sendiri. Saya sendiri melihat tembakau ini merupakan alternatif tanaman yang sangat potensial bagi selingan penghasilan warga dusun Bantarawi. Warga tidak susah payah menawarkan tembakaunya, justru Bandar/tengkulaknya yang langsung mencari dan membeli ke petani.

Menjual hasil kebun seperti sayuran memang terhitung cukup menguntungkan dalam kondisi pertanian pasca *nyawah* untuk warga di dusun Bantarawi. Paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk sehari-hari. Tidak ada keluarga yang memang secara khusus berkebun untuk dijual hasilnya,

mereka menjualnya jika ada hasil lebih. Lain halnya dengan tembakau yang pada akhirnya menjadi alternatif potensial perekonomian mereka.

Terkait dengan masalah pertanian Bapak R tidak merasakan adanya perbedaan ketika sebelum dan sesudah adanya proyek bendungan Jatigede. Menurut beliau proyek bendungan ini tidak berpengaruh dengan aktifitas pertanian. Hanya saja pengairan memang bermasalah. Akan tetapi justru musim kemarau kualitasnya lebih bagus, dengan dibantu alat-alat mesin pertanian seperti mesin air karena dekat dengan sungai Cimanuk sehingga tidak terlalu menjadi masalah. Sekarang karena hujan menanam terong pun malah *mareyongkod*.⁵⁷

Adapun bantuan untuk pertanian yang diberikan pemerintah adalah berupa obat semprot organik, pupuk dan benih yang disalurkan melalui kelompok tani yang dibentuk per dusun atau per kapunduhan. Bapak R merupakan ketua kelompok di dusun Bantarawi. Pupuk ini diambil dari PERTANI Sumedang dan dibagikan ke setiap cabang KCD/ kecamatan, baru disalurkan ke setiap kelompok tani di dusun. Masalah pengairan yang menjadi masalah utama pertanian di dusun Bantarawi disebabkan oleh saluran air irigasi yang kadang-kadang tidak berjalan, alias beku. Oleh karena itu, seringkali padi mengalami kekeringan. Ini berkaitan dengan kinerja Ulu-Ulu.⁵⁸ Namun, Bapak R tidak banyak bercerita mengenai kelemahan kinerja Ulu-Ulu ini.

Pak Olot merasakan adanya bantuan pertanian kecil-kecilan dalam kelompok tani. Penurunan yang Pak Olot lihat hanya di bidang pengairan saja. Potensi panen yang seharusnya 3 kali setahun, jadi hanya 2 kali karena pengairan yang tidak rapi. Sehingga kebutuhan masyarakat sendiri tidak tercukupi, akibatnya menuntut daya beli yang lebih besar. Pasalnya pengairan sangat penting, meskipun musim hujan tetap harus menyedot air dari sungai. Alhasil produksi pertanian berkurang.

“..ayeuna mah cuma kabagean 2 kali, mun bareto mah keur baBapak jadi Ulu-ulu bisa muter nepi ka 3 kali..”

⁵⁷ *Mareyongkod* berarti tidak tumbuh.

⁵⁸ Ulu-Ulu merupakan istilah perangkat desa yang bertanggung jawab khusus mengurus bagian pengairan pertanian.

(Sekarang cuma kebagian (pengairan) 2 kali, kalau dulu waktu Bapak jadi Ulu-ulu bisa bergilir sampai 3 kali).

Di bulan November kegiatan pertanian sudah dimulai. Sudah ada yang *macul* atau mencangkul pinggiran lahan mereka dan lahan untuk menanam padinya dibajak menggunakan traktor. Tidak semua petani memiliki traktor, jadi mereka harus menyewa. Harganya di musim yang lalu masih sekitar Rp 1.700,-/10 bata. Untuk luas sawah yang dimiliki Bapak R bisa merogoh kocek sekitar Rp 300.000,-

Sebagian dari masyarakat bahkan ada yang sudah tandur. Akan tetapi, kebutuhan terhadap pengairan dengan bantuan mesin sedot air tetap dibutuhkan. Sekalipun hujan turun setiap malam, akan tetapi pada saat aktifitas pertanian dilakukan siang hari kondisi tanah tetap kering. Untuk masalah bibit sendiri biasanya masyarakat menggunakan sirkulasi dari panen sebelumnya. Ada juga sebagian yang membelinya di toko khusus bibit dan pupuk di pasar Wado. Harganya Rp 7.000,-/ kg, 1 kantong berisi 5 kg, jadi total pembelian bibit Rp 35.000,- bisa dipakai untuk menanam seluas 100 bata. Bapak R sempat mengkonfirmasi perihal bantuan bibit yang biasanya diberikan oleh PPL. Namun, sudah di stop sejak tahun lalu. Menurut pihak PPL tahun 2012 baru akan diadakan kembali bantuan semacam itu.

Sistem penanaman padi di dusun Bantarawi menggunakan sistem padi *buhun* yang konon teknik-tekniknya didapatkan secara turun temurun dari zaman nenek moyang. Bukan dari lembaga pertanian seperti sistem padi SRI yang memiliki teknik khusus. Lagipula teknik SRI tidak bisa dilakukan di dusun Bantarawi karena terhambat oleh pengairan.

Jika Bapak R kerepotan dalam mengolah sawahnya, dia biasanya meminta tolong kepada *Uwa Ade* ataupun *Uwa Adeng*. Mereka berdua memang bekerja sebagai buruh di petani lain. Penghasilan mereka rata-rata Rp 20.000- Rp 30.000/hari sudah bersih, makan dan roko diberikan juga. Jika tidak diberi makan biasanya diberi tambahan Rp 5.000,- , tapi rokok, kopi, dan kue-kue wajib disajikan untuk mereka. Tidak hanya Bapak R, Bapak AN dan Bapak IC juga kerap membayar tenaga mereka untuk membantu pekerjaan di sawah. Apalagi

ketiga keluarga ini tidak memiliki anak yang tinggal bersama mereka untuk diandalkan turun ke sawah. Berbeda dengan Pak Olot, yang mana bisa mengandalkan menantunya, Bapak Dia (suami Ceu Erum) untuk membantunya di sawah.

Warga masyarakat masih tinggal di dusun Bantarawi dan menjalani kehidupan mereka meskipun aktifitas pertanian agak tersendat akibat proyek pembangunan bendungan Jatigede ini. Namun demikian, tembakau hadir sebagai alternatif palawija yang bisa membantu mereka mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dan melengkapi kebutuhan untuk sawah mereka. Sawah tetap menjadi prioritas bagi mereka, karena tembakau ini tidak dijadikan komoditi yang komersial.

3.4 'Rumah hantu'

'Rumah hantu' alias Rumah Harapan Tunai merupakan ekses paling fenomenal dari tertundanya pelaksanaan pembangunan bendungan Jatigede ini. Saat ini desa-desa yang akan menjadi areal genangan dan tersentuh pembangunan bendungan Jatigede ramai dengan tampilan bangunan-bangunan kosong yang mengandung unsur spekulasi masyarakat yang juga terbentuk oleh pengaruh dari oknum pemerintah sendiri, tidak terkecuali dusun Bantarawi.



Gambar 3.4.1 'Rumah hantu'

(Sumber: Wulan, 2011)

Pada saat saya singgung masalah 'rumah hantu', Bapak AN menanggapi dengan tawa yang ringan. Modal yang dimilikinya cukup besar,

tidak mengherankan jika Bapak AN membangun ‘rumah hantu’ dalam jumlah yang lumayan banyak. Bahkan bisa dibilang paling banyak, sampai-sampai warga menyebutnya “..nyieun lembur sorangan..”⁵⁹.

Sebelum *blak-blakan* tentang investasinya itu, Bapak AN menjelaskan bahwa ada oknum-oknum yang sengaja menyarankan membangun ‘rumah hantu’. Oknum ini berasal dari petugas pendataan, baik yang melarang ataupun menyuruh pembangunan ‘rumah hantu’ tersebut. Melihat bangunan-bangunan ‘rumah hantu’ di desa Cibogo dibayar tuntas oleh pemerintah, maka Bapak AN berinisiatif untuk membangun ‘rumah hantu’, dan menjadi *pioneer* di dusun Bantarawi khususnya. Hal ini mungkin sekali terjadi karena Bapak AN didukung dengan modal pribadi yang kuat.

“Warga nu sejen mah ngan ngingiluan urang..”

(kalau warga yang lain ikut-ikutan saya saja)

Ada tiga kriteria kepemilikan bangunan saat ini khususnya di desa Padajaya. Yang pertama adalah orang asli Padajaya yang punya tanah dan bangunan sendiri. Kedua, orang luar yang memang punya rumah di sini (merantau ke Jakarta misalnya), dan yang ketiga orang luar desa yang sewa membuat bangunan di atas tanah orang asli desa Padajaya.

Hampir setiap periode ada kabar akan diadakan pendataan, Bapak AN membangun ‘rumah hantu’. Mulai pada tahun 1990-an, tahun 1999, dan terakhir tahun 2010. Sekarang sudah banyak yang hampir roboh. Anak pertama Bapak AN, Bapak Ence, yang membeli tanah seluas 14 bata seharga Rp 5.600.000 di desa Buah Ngariung akhirnya membangun rumah permanen, pada saat ada kabar bahwa 3 minggu lagi Wado akan dilakukan pendataan ulang tahun 1990. Dulu ada dua dusun di desa Wado, yaitu Buah Ngariung dan Maleber. Dusun Buah Ngariung minta cepat dibayar, sedangkan dusun Maleber tidak mau jika tidak dibayar 4 juta rupiah per batanya. Akhirnya kedua dusun ini pecah, dusun Buah Ngariung jadi dibayar rumah/ bangunan Rp 600.000,-/bata, untuk sawah Rp 500.000,-/bata, dan Rp 200.000,- untuk per bata tegalan. Dengan total modal Rp

⁵⁹ Membuat kampung sendiri

6.300.000,- Bapak Ence mendapat ganti rugi sebesar 15 juta rupiah. Beberapa lama kemudian ada kabar giliran Padajaya yang akan dibayar, lantas Bapak Ence menjual lagi mobilnya dan uang 15 juta rupiah dari hasil ganti rugi di Buah Ngariung dihabiskan juga untuk membangun 'rumah hantu' di desa Padajaya.

Bapak AN membangun 2 unit berukuran 5x8m² dan 5x7m² bentuknya permanen lokasinya dekat rumah Akung di *kidul*. Selain itu ada 6 saung, ini sebutan untuk bangunan yang tidak permanen. Yang paling besar berukuran 4x10 m² dan yang paling kecil 3x5 m². Ada juga yang diinvestasikan kepada orang luar, dengan menggunakan sistem sewa. Investor tersebut adalah orang yang berasal dari Darmaraja dan tinggal di Bandung. Harga sewa disesuaikan dengan tipe bangunan. Jika saung berukuran sekitar 4x5 m² biaya sewanya Rp 1,5 juta, saung berukuran 4x10 m² biaya sewanya Rp 2 juta, rumah permanen Rp 5 juta, dan semi permanen sekitar Rp 2-4 juta. Status sewanya sampai dibayar sama proyek Jatigede. Diantara 'rumah hantu' yang dimiliki Bapak AN yang disewakan berada di *kidul* di wilayah RT 02, setelah dihitung-hitung Bapak AN bisa mendapatkan sekitar Rp 60 juta dari hasil penyewaan ini, dengan catatan memang benar dibayar oleh pemerintah.

Ketertundaan proyek pembangunan bendungan Jatigede ini tidak lantas membuat Akung kehilangan kesempatan untuk berspekulasi sebagaimana yang dicontohkan pamannya, Bapak AN. Akung juga membangun 'rumah hantu' sebanyak 2 unit. Sebenarnya rumah yang ditempatinya saat ini pun terhitung rumah ilegal menurut saya. Akan tetapi, tanpa sungkan Akung memaparkan motifasinya membangun 'rumah hantu' ini adalah karena aji mumpung dan merasa cemburu pada orang yang sudah menerima ganti ruginya, dan hasilnya benar-benar lumayan. Lagipula menurut Akung tidak ada larangan khusus untuk masalah ini.

“Emang sempet aya SK gubernur tahun 2004 tentang larangan membangun di atas tanah nagara. Tapi urang tolak, jeung deui kata saya mah itu SK ‘bancai’. Lamun emang geus dibebaskeun sadayana, mungkin saya oge teu bakal nuntut, tapi karena acan dibebaskeun jadi masih hak milik urang. Jadi inti namah kudu dibayar.”

(Memang sempat ada SK gubernur tahun 2004 tentang pelarangan membangun di atas tanah negara. Tapi kami tolak dan menurut saya SK tersebut adalah SK ‘banci’. Jika memang tanah yang kami gunakan untuk membangun ini sudah dibebaskan semua, mungkin saya juga tidak akan menuntut, tapi karena belum dibebaskan semua itu berarti masih hak milik kami (adat). Jadi intinya pemerintah harus bayar).

Pernyataannya ini selalu ia dasarkan pada UUD Pasal 33 ayat 3 dimana negara hanya menguasai segala kekayaan, tetapi masyarakat yang memiliki. Akhirnya SK pelarangan tersebut dicabut. Yang muncul sekarang adalah surat himbuan untuk tidak mengadakan perubahan pada bangunan yang sudah ada dan tidak menambah bangunan karena daerah tersebut sudah diperuntukkan untuk genangan.

Selama kehidupan berjalan sekalipun di daerah terancam genangan seperti di dusun ini akan selalu ada kebutuhan sosial. Kebutuhan itulah yang akhirnya menuntut Akung untuk membangun rumah rumah tangga dan tinggal berpisah dari orang tua.

“Daripada meuli tanah, naon salahna ngabangun di tanah urang sorangan.”

(Daripada beli tanah, apa salahnya membangun di atas tanah kita sendiri.)

Akung menekankan penuntasan yang secepatnya untuk masalah ganti rugi khususnya di dusun Bantarawi desa Padajaya ini. Jika memang sudah beres, Akung pribadi merasa sadar diri untuk angkat kaki dari dusun ini. Mengapa kemudian pemerintah juga tidak berani mengusir masyarakat menurut Akung hal itu dikarenakan karena pemerintah juga sadar masalah sosial budaya belum mereka selesaikan. Akung menilai pemerintah sudah terlambat mengambil ketegasan. Jika pada awalnya pemerintah melakukan pembayaran dan dibunyikan perintah masyarakat harus mengosongkan desa dalam jangka waktu 6 bulan setelah pembayaran, entah dengan program pemindahan, relokasi, ataupun pindah secara pribadi, maka permasalahannya mungkin tidak akan serumit ini. Keterlambatan dari pemerintah yang sudah terhitung 20 tahun lebih ini membuat masyarakat betah dan keanakan, dan hal ini memicu masalah menjadi semakin berkembang dan dilematis.

Fenomena ‘rumah hantu’ yang gencar khususnya di dusun Bantarawi ini pun tidak lepas dari peran Akung. Menurut Bapak IT, Akung ikut terlibat sebagai pemborong dalam banyaknya pembangunan ‘rumah hantu’ ini. Yang menambah kisruh masalah ini adalah para petugas pun membangun ‘rumah hantu’ dengan saling menumpang ke yang lain (sewa).

Bapak IC juga ikut membangun ‘rumah hantu’ berupa saung, tapi tidak di desa Padajaya. Bapak IC membangun saung di Sukakersa pada tahun 2007, di atas tanah yang sudah di cek dan ternyata terlewat pembayaran dari sekian kali pendataan ulang.⁶⁰ Bapak IC menyimpan bukti semacam surat dari orang Pertanahan mengenai tanah yang belum terbayar ini. Ada 3 unit saung yang dibangun Bapak IC dengan luas masing-masing 10x4 m², dan untuk membangunnya Bapak IC mengeluarkan modal pribadi sebesar Rp 15 juta.

Bapak IC mengaku kepada saya bahwa motifasi utama membangun saung ini adalah semata-mata hanya untuk keperluan bertani. Saung ini digunakannya untuk menyimpan alat-alat pertanian dan hasil tani di Sukakersa. Tidak ada oknum yang menyarankannya membangun saung ini. Meskipun Bapak IC menyatakan bahwa saung ini adalah ide pribadinya, namun sama dengan Padajaya, Sukakersa juga merupakan desa yang dijamuri oleh ‘rumah hantu’. Namun demikian, Bapak IC memiliki estimasi dan harapan bahwa saungnya ini juga akan dibayar sebagaimana pernyataan petugas *“kalau tanah belum terbayar maka akan dibayar dan dilunasi beserta tegakkannya”*.

‘Rumah hantu’ ini menjamur di semua desa yang terkena dampak proyek bendungan Jatigede. Seharusnya pemerintah juga tegas terhadap pembangunan ‘rumah hantu’ tersebut. Di desa Cibogo dibayar dan dituntaskan, begitupun yang diinginkan oleh masyarakat di desa yang lain. Informasi ini dari petugas juga, masyarakat tidak mungkin tahu kalau tidak dikasih tahu oleh orang-orang yang punya akses ke atas. Masyarakat punya keyakinan masih memiliki tanah yang belum dibayar. Di sisi lain menurut aturan pemerintah, kalau ada tanah yang belum dibayar harus dibayar beserta isi yang ada di dalam di tanah tersebut.

⁶⁰ Pendataan terakhir di Sukakersa berlangsung pada tahun 1999. Jadi Pak Ici juga belum mendapatkan bayaran sama sekali untuk saungnya.

Makanya masyarakat berpikir daripada mengambil yang lain-lain, lebih baik membangun dan mengeluarkan modal sendiri di tanah sendiri (spekulatif). Janji pemerintah adalah apapun yang terkena oleh proyek akan diganti rugi tanah beserta bangunan, bahkan rumput sekalipun. Masalah laporan seperti ini juga turut dipicu oleh adanya permainan dari orang dalam.

Tidak seperti Bapak AN dan Bapak IC, Bapak R hanya membangun saung di atas tanah timbul karena air sungai surut persis dekat ladang di pinggir sungai Cimanuk. Luasnya 3x6 m², dibuat dari kayu, atapnya genting, tetap beralaskan tanah, dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Biasanya dipakai untuk menyimpan alat-alat pertanian, hasil panen, dan tempat beristirahat saat sedang berladang. Bapak R menghabiskan biaya dari modal pribadi sekitar 3 juta untuk membangun saung ini. Saung itu dinamakannya saung *kaduhung*, "*kaduhung mun dibayar, kaduhung mun henteu*".⁶¹ Saung ini dibangun Bapak R pada tahun 2009. Dengan harapan akan dibayar tunai, karena melihat orang-orang juga membangun 'rumah hantu', jadi Bapak R juga mencoba untuk membangun saung. Bapak R memiliki keyakinan saung tersebut akan terbayar, karena dibangun di atas tanah timbul yang bisa seakan-akan dianggap tanah yang terlewat. Karena menurut informasi, hanya tanah yang terlewat yang akan terkena bayaran. Ada petugas yang memberikan saran kepada warga untuk membangun bangunan baru siapa tahu dibayar, dan banyak yang bilang ada respon positif dari pihak pemerintah mengenai pembayaran 'rumah hantu' ini. Tapi kebenarannya tidak diketahui pasti, karena informasi ini tidak didapat secara langsung khususnya oleh Bapak R. Hanya katanya, katanya, dan katanya.

Pak Olot juga ikut membangun 'rumah hantu'. Ada 2 unit dengan tipe semi permanen. Pak Olot menyesal telah membuang-buang uang untuk membangun 'rumah hantu' yang belum tentu akan dibayar ini. Ia mengeluhkan kondisinya sekarang yang tidak memiliki uang, sedangkan 'rumah hantu'-nya juga sudah hampir rusak.

Tidak hanya mereka yang memiliki modal atau relasi pada pemodal besar yang membangun 'rumah hantu'. Fenomena investasi dengan kepastian

⁶¹ Sudah terlanjur dibangun, mau dibayar ataupun tidak

keuntungan yang masih menggantung ini juga dilihat menggiurkan bagi petani yang buruh sekalipun. Dengan kondisi rumah tangga yang masih harus dipenuhi kebutuhannya dengan bekerja lebih keras, 'rumah hantu' menjadi harapan bernilai tersendiri bagi mereka. Diantaranya adalah Bapak Dia, yaitu menantu dari Pak Olot. Bapak Dia menikah dengan anak perempuan Pak Olot, yaitu Ceu Erum.

Bapak Dia tidak memiliki lahan sendiri. Dalam kesehariannya, Bapak Dia membantu mertuanya, Pak Olot, untuk mengurus sawah dan *kuli* di sawah petani lain yang membutuhkan tenaganya. Itu dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Tidak ketinggalan, Bapak Dia juga membangun satu unit 'rumah hantu' di *kidul*. Rumah tersebut dibangunnya pada tahun 2010 dengan ukuran 5x7 m² dengan tipe semi permanen. Bapak Dia mengeluarkan modal total Rp 6 juta dari sakunya sendiri. 'Rumah hantu' tersebut ia bangun di atas tanah milik orang tua - dan masih atas nama orang tua - yang terlewat. Ada aktor-aktor yang memang memotivasinya untuk membangun 'rumah hantu', yaitu dari pihak petugas pengukuran, orang dari perangkat desa, dan ditambah dari melihat orang lain yang juga terlebih dahulu membangun. Meskipun rumahnya sendiri yang berbentuk panggung dan berukuran 10x12 m² belum dibayar sejak pengukuran tahun 1984 hingga saat ini, Bapak Dia merasa yakin 'rumah hantu'-nya ini akan juga dibayar karena tanahnya belum terbayar.

Bapak IT membangun saung dalam rangka meramaikan spekulasi 'rumah hantu'. Saungnya berukuran paling luas jika dibandingkan saung-saung yang lainnya. Warnanya juga jauh lebih *eye catching* dengan dipoles dominan warna hijau dan pagarnya warna hijau-pink. Saung itu berdiri di tengah sawah, dan berbentuk panggung. Ada lahan yang cukup besar di bawahnya yang di semen untuk menjemur *pare*⁶². Saung tersebut dibangun dengan material sederhana, bambu, kayu, dan atapnya memakai genting. Pada saat saya masuk ke dalamnya, ruangan-ruangan yang ada cukup luas. Sekitar ada dua kamar, yang masing-masing digunakan untuk menyimpan hasil pertanian dan peralatan pertanian yang seringkali Bapak IT pakai. Semuanya ditaruh disini supaya tidak kesulitan mengangkutnya bolak-balik dari rumah ke sawah, atau sebaliknya. Ada beberapa

⁶² Padi yang baru saja dipetik

kostum bertani yang dijemur di pagar saung itu. bahkan Bapak IT juga menyediakan kasur tipis dan dua buah bantal untuknya beristirahat di saung ini.

Awalnya Bapak IT tidak mengaku bahwa saung yang ia bangun ini termasuk kategori 'rumah hantu'. Menurutnya, saung ini adalah saung standar yang dipakai untuk gudang hasil taninya, tempat mengamankan peralatan taninya, dan tempatnya beristirahat di sela-sela mengolah sawah. Namun, memang dibangun di atas tanah yang keliru nama hak miliknya. Selain itu, dia juga membangun dua unit rumah untuk anaknya yang di Sumedang dan yang di Bogor.

Menjamurnya 'rumah hantu' adalah eksekusi yang paling fenomenal dari adanya proyek pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda ini. 'Rumah hantu' yang ternyata merupakan singkatan dari rumah harapan tunai. Dikatakan demikian, karena rumah-rumah ini dibangun oleh warga masyarakat dengan harapan akan dibayar tunai bersamaan dengan tanah dan bangunan yang terlewat. Maka dari itu, 'rumah hantu' ini rata-rata dibangun di atas tanah yang mereka anggap terlewat pendataan dan belum terbayar. 'Rumah hantu' ini dibangun dengan berbagai tipe dan sistem investasi yang bermacam-macam. Fenomena 'rumah hantu' ini dapat dilihat sebagai sebuah bentuk akal-akalan petani untuk mengambil keuntungan dari kondisi pelaksanaan pembangunan bendungan ini sekaligus bentuk protes terhadap program yang tidak transparan di masa lalu

3.5 Aksi Protes

Aksi protes adalah salah satu cara Orang Terkena Dampak (OTD) merespon pelaksanaan proyek pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda. Mereka adalah warga masyarakat yang berasal dari kurang lebih 34 desa dari 5 kecamatan di kabupaten Sumedang yang akan terusir dari kampung halaman dan tanah kelahiran mereka. Begitupun halnya dengan dusun Bantarawi yang mana kehidupan warga masyarakatnya terkatung-katung dalam ketidakjelasan, seiring dengan tertundanya pembangunan bendungan Jatigede yang tidak kunjung rampung hingga saat ini.

Aksi protes ini diorganisir oleh sebuah konsorsium yaitu semacam organisasi massa yang dibentuk oleh para perwakilan tiap dusun yang terkena dampak. Orang ini biasanya memiliki posisi khusus di tengah-tengah warga masyarakat, memiliki kemampuan bersuara bahkan ada sebagian dari mereka yang memang vokal berorasi. Maka dari itu mereka dipandang sebagai '*aktifis*' oleh masyarakat. Di dusun Bantarawi sendiri, kegiatan ini dikoordinasi oleh Pak AN dan Akung, keponakannya.

Protes pertama kali ke DPRD Sumedang pada tahun 2000-an. Bapak R ikut serta dalam protes tersebut. Total ada sekitar 7 mobil yang berangkat, bergabung dengan warga satu desa Padajaya. Demonstrasi yang kedua ke Bandung pada tahun 2008, diikuti oleh banyak desa calon tergenang. Protes yang terakhir ke pihak proyek langsung di Jatigede pada tahun 2009. Pada saat protes yang terakhir ini warga minta kegiatan proyek diberhentikan sementara sampai masalah ganti rugi diselesaikan. Protes ini diikuti oleh sekitar 34 desa dari 5 kecamatan yang akan tergenang oleh bendungan Jatigede, dan bersatu dalam satu gerakan bernama GERDARENCAGE (Gerakan Daerah Rencana Jatigede). Sejauh ini Bapak R mendapatkan informasi-informasi mengenai proyek bendungan Jatigede langsung dari aparat desa, dan orang-orang desa langsung dari petugas dinas Pekerjaan Umum (PU) Bendungan Jatigede.

Pengaduan terang-terangan terkait dengan proyek pembangunan bendungan Jatigede ini dilakukan sejak masa Orde Baru berakhir dan pelaksanaannya pun bertahap. Pengaduan dilakukan ke desa terlebih dahulu, jika desa tidak bisa menangani maka langsung protes ke kabupaten Sumedang. Bapak AN adalah pemimpin dan penanggung jawab aksi protes yang sering diadakan warga, khususnya warga masyarakat dusun Bantarawi. Salah satu aksi protes yang dikoordinasi oleh Bapak AN adalah saat protes ke desa, desa langsung hancur dan Kuwunya yaitu Ibu CU langsung ditahan. Aksi protes berlanjut ke tingkat kabupaten di Sumedang. Alhasil, Ibu Kuwu CU terjerat hukum dan menerima vonis penjara selama 13 bulan. Setelah itu aksi protes juga dilakukan di kantor gubernur Jawa Barat di Bandung. Di sana masyarakat diberikan kesempatan untuk berdialog, Bapak AN sebagai koordinator menunjuk orang yang lihai untuk

menjadi juru bicara pada dialog tersebut. Hasilnya warga masyarakat diarahkan untuk kembali lagi ke kabupaten karena kabupaten yang harus bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul karena pembangunan bendungan Jatigede ini.

Pada tahun 2009, diadakan aksi protes langsung menuju ke pihak proyek pembangunan bendungan di Jatigede. Semua desa yang terkena dampak pembangunan bendungan Jatigede ikut serta dalam aksi protes ini. Dari desa Padajaya dipimpin oleh Bapak AN. Pihak proyek menerima kedatangan seluruh partisipan dan memberikan pernyataan bahwa apa yang dituntut dari aksi protes ini akan dimusyawarahkan. Tidak lama setelah itu, ada realisasi di beberapa desa berupa pembayaran tanah-tanah yang terlewat meskipun tidak beserta tegakannya. Berhubung di desa Padajaya sedang ada persoalan dimana Ibu Kuwu CU tersangkut kasus hukum, maka tidak bisa langsung diproses seperti desa-desa lainnya.

“..di satu suarakeun yen Bantarawi mah embung mun pepelakan jeung bangunan teu bareng dibayar..”

(..Di satu suarakan bahwa Bantarawi tidak mau jika tanaman dan bangunan tidak ikut dibayar..)

Aktor penting di balik layar ramainya aksi protes terhadap bendungan Jatigede adalah Akung. Di rumahnya Akung membuka usaha di bidang sewa menyewa *sound system* dan orkes dangdut untuk acara *hajatan*/ hiburan. Di plang tersebut tertulis nama Orkes Dangdut yang dipimpinnya, GEHGER, lengkap dengan no *handphone*-nya. Selain itu Akung juga menjadi agen/ distributor koran lokal, Radar Sumedang.

Akung tinggal dengan istri dan ketiga anaknya yaitu Rian kelas 2 SMP, Adam kelas 3 SD, dan Taufiq yang masih berusia sekitar 1 tahun. Akung tinggal di dusun Bantarawi dari awal tahun 2008, sebelumnya Akung tinggal di dusun Sundulan. Rumah yang ditempati Akung dan keluarga saat ini terhitung baru, dibangun pada tahun 2009 dan Akung mengaku rumahnya ini dibangun di atas tanah yang terlewat. Akung dan keluarga kecilnya itu memang baru pindah ke rumah yang sekarang ini mereka tempati. Sebelumnya mereka tinggal di rumah

yang terletak di *landeuh*⁶³ dan sekarang rumah tersebut kosong. Akung bercerita bahwa pada saat ia dan keluarga tinggal di *landeuh*, rumah yang ditempatinya sekarang ini adalah sebuah warung. Namun, menurut cerita yang saya dapat dari warga bangunan ini adalah sebuah *café* yang lekat dengan perkumpulan para pemabuk dan tidak jarang wanita juga “main” di sana. Keberadaan *café* ini cukup meresahkan warga. Akan tetapi, warga tidak memiliki kekuatan untuk bisa mencegahnya.

Menurut info dari Emak Enen, Akung berniat mencalonkan diri menjadi Kuwu untuk desa Padajaya. Dalam keyakinannya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Akung mencermati bahwasanya yang penting di desa Padajaya ini adalah pimpinan desa harus sering bermusyawarah dengan rakyat untuk kemudian aspirasinya dapat disampaikan hingga ke pemimpin daerah dan pusat. Akung memang memiliki jaringan yang baik dengan beberapa pejabat. Beberapa pejabat yang hendak mencalonkan diri sebagai perwakilan daerah baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, seringkali melibatkan Akung untuk menjadi fasilitator atau lebih tepatnya kordinator tim sukses kedaerahan untuk mengkampanyekan si pejabat kepada masyarakat. Salah satu contoh terjadi pada saat bupati Sumedang Don Murdono hendak mengkampanyekan dirinya kepada masyarakat Desa Padajaya dan sekitarnya, konon beliau menyambangi Akung secara langsung untuk meminta bantuan. Begitupun dengan salah satu anggota dewan perwakilan di DPR RI, yaitu ES dari fraksi Golkar, Akung memiliki kedekatan yang cukup baik karena pola yang sama pada saat jaman kampanye. Bahkan jika saya ingin mendalami informasi dari sudut pandang pemerintah tentang bendungan Jatigede ini, Akung menyarankan saya untuk menemui ES dibandingkan TBH dari fraksi PDI-P dimana sebelumnya Akung berafiliasi.

Tidak hanya itu, kedekatan Akung dengan pejabat tertentu dan bagaimana cara dia *melobby* si pejabat juga terlihat pada saat kelahiran anak ketiganya. Akung memberi nama anak bungsunya Taufiq, diambil dari nama wakil bupati Sumedang. Menurut cerita yang saya dengar dari beberapa orang, konon, Akung meminta izin langsung kepada wakil Bupati pada saat Akung menggelar hajjat

⁶³ Dataran yang lebih rendah, di bawah

sunat anaknya tersebut. Sebagian warga masyarakat memandang hal ini merupakan pendekatan politis Akung pada pejabat-pejabat tersebut. Akung pun sempat menceritakan dengan bangga kepada saya terkait pengalamannya mengadakan acara syukuran tersebut dihadiri oleh wakil bupati dan anggota dewan daerah.

Mengenai progress aksi protes yang dilakukan para OTD - dibawah koordinasi Akung – pada tanggal 22 April 2011, Akung menjelaskan bahwasanya aksi ini dilakukan untuk menuntut tiga hal pokok. Yang pertama, menuntut penyelesaian pembayaran tahun 1984-1986 yang masih menyisakan banyak permasalahan. Salah satunya mengenai banyaknya tanah yang terlewat pendataan dan belum terbayar. Untuk hal ini juga termasuk masalah klasifikasi tanah. Pada tahun 1984-1986 hanya ada dua klasifikasi tanah, yaitu tanah sawah dan tanah darat. Bahayanya adalah harga tanah sawah dan tanah darat disamakan. Tidak berbeda seperti sekarang, yang mana tanah pemukiman memang sudah seharusnya memiliki harga jual yang lebih mahal dibandingkan lahan sawah dan kebun. Pemukiman dihargai Rp 1.900.000,-/bata, sawah Rp 1.800.000,-/bata, dan kebun Rp 1.625.000,-/bata. Harga tersebut belum termasuk tegakkannya⁶⁴. Berbeda dengan saat ini, kondisinya bisa rebut tawar. Jangankan rebut tawar harga, rebut tawar dokumen mengenai luas tanah pun bisa dilakukan. Hal ini rentan terjadi, jadi tidak heran jika ada praktek suap menyuap di dalamnya. Warga masyarakat yang berharap akan mendapatkan ganti rugi lebih besar menyuap dan meminta petugas pegukurnya memalsukan data kriteria tanah dan bangunan.

Tuntutan kedua, adalah masalah bangunan-bangunan baru termasuk di dalamnya ‘rumah hantu’. Menurut Akung membangun ‘rumah hantu’ jelas merupakan hak rakyat karena dibangun di atas tanah milik mereka sendiri yang belum dibebaskan. Jika tanah tersebut memang dibutuhkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan tentu saja akan ada penyerahan dari warga masyarakat asalkan dibayar. Ketentuan pembayaran yang diharapkan adalah tanah dibayar berikut tegakkannya, baik berupa tanaman ataupun bangunan. Tahun 2009 -2010 ketentuan ini sudah ditinggalkan. Berbeda pada tahun 2004-2008 dimana

⁶⁴ Material yang ada di atas tanah tersebut seperti bangunan dan tanaman.

bangunan baru masih dibayar apapun bentuknya. Hal tersebut salah satunya terjadi di desa Cibogo. Akung memang terlihat ambisius sekali untuk masalah kompensasi 'rumah hantu' ini.

Ketiga adalah masalah perpindahan penduduk (relokasi). Nasib OTD masih digantung oleh ketidakjelasan mengenai lokasi mana yang akan menjadi tempat hidup mereka kelak jika proyek ini telah teralisasi. Padahal pemerintah juga berkewajiban untuk memprioritaskan masalah pemindahan warga masyarakat. Akung menjelaskan bahwa sejauh ini SK (Surat Keputusan) dari bupati Sumedang untuk masalah relokasi sudah ada. Sementara ini wilayah yang masih di dalam Sumedang seperti Pasir Padang, Cilopang, dan Conggeang adalah 3 wilayah relokasi yang ditawarkan pemerintah. Tetapi dilihat dari segi hidup dan penghidupan ketiga wilayah ini menurut Akung tidak layak. Hanya Cilopang dan Conggeang yang menurut hemat Akung pantas dijadikan wilayah relokasi. Namun, jatahnya kurang luas karena per-KK hanya mendapat 400 m². Sedangkan warga masyarakat di wilayah ini mayoritas petani. Dengan hanya mendapatkan rumah dan pekarangan tanpa adanya jatah huma/ sawah maka penghidupan warga masyarakat masih belum terjamin, jadi mereka masih harus membelinya. Padahal dalam relokasi sumber hidup dan penghidupan juga hal penting yang harus dipertimbangkan secara matang.

Selain itu ada juga beberapa wilayah rekomendasi di luar Sumedang, yang MoU-nya sudah ditandatangani oleh 4 gubernur dari wilayah-wilayah terkait. Begitupun dengan permasalahan ganti rugi juga terdapat bukti berupa MoU kabupaten dan provinsi. Bupati Sumedang sendiri menurut penilaian Akung, tidak memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan.

Tuntutan-tuntutan penting yang diajukan dalam aksi protes tersebut berbanding terbalik dengan hasil yang diterima oleh Akung dan OTD lain. Bupati Sumedang Don Murdono tidak bisa hadir untuk berdialog dengan para demonstran. Hasil nihil dari Gedung Negara/ Kantor Bupati Sumedang mendorong OTD untuk bergerak ke lokasi proyek pembangunan bendungan Jatigede dengan tujuan untuk menghambat dan menghentikan aktifitas pembangunan bendungan. Kegiatan tersebut berlangsung hingga banyak dari

OTD, termasuk Akung bermalam di sana. Di lokasi tersebut OTD ditangani oleh Kepala Satker dari proyek Bapak Airlangga dan Asisten Daerah Bapak Agus Sukandar sebagai wakil dari pemerintah daerah. Kedua pihak ini menjanjikan OTD bahwa akan diadakan sebuah pertemuan untuk dialog masyarakat dengan empat unsur yang akan didatangkan yaitu bupati, sekretaris daerah, ketua DPRD, dan pimpro/ kepala Satker Bendungan Jatigede pada hari Senin, 25 April 2011 di kantor bupati Sumedang.

Sepengetahuan Akung pendataan di desa Padajaya ini baru sampai tahap lima dan itu pun baru berupa pemasangan patok wilayah genangan. Akung bersikukuh akan tetap memperjuangkan bangunan baru termasuk 'rumah hantu' dengan alasan bahwa bangunan tersebut berdiri di tanah yang terlewat.

“..bangunan-bangunan anyar tetep bakal diperjuangeun, soalna kan masih itungan tanah adat, termasuk 'rumah hantu'. Jelas bukti fisikna oge kan aya, nu penting dibangun di atas tanah nu kalewat. Itu wungkul tuntutanana, teu muluk-muluk”

(Bangunan-bangunan baru akan tetap diperjuangkan, karena masih termasuk tanah adat, termasuk 'rumah hantu'. Jelas ada bukti fisiknya, yang penting dibangun di atas tanah yang terlewat pendataan. Itu saja tuntutanannya, tidak muluk-muluk).

Khusus masalah proyek ini, Akung sendiri aktif berkontribusi di masalah Jatigede dari tahun 1997 sebagai biro / koordinator lapangan di Konsorsium⁶⁵ OTD Jatigede yang diketuai Bapak Dedy Kusmayadi asal Desa Cipaku. Karena kegiatannya ini, Akung kerap disebut 'aktifis' oleh masyarakat. Untuk aksi protes sendiri Akung menjelaskan hampir setiap tahun ada. Namun, sempat selama 3 tahun (2005-2008) tidak ada sama sekali aksi protes karena permasalahan terhitung lancar dan upaya pemerintah ataupun pihak proyek untuk meredam fluktuasi respon masyarakat terhadap penggiliran proses pelunasan ganti rugi terhitung cukup baik sehingga dapat terkendali. Ditunjang dengan kondisi atmosfer sosial di masyarakat mendukung masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami proses tersebut. Namun demikian, sejak tahun 2008-sekarang

⁶⁵ Konsorsium ini merupakan semacam organisasi massa yang memiliki misi khusus untuk membela masyarakat OTD Jatigede.

pembangunan kembali tersendat, sehingga terhitung sudah empat kali aksi protes yang dilakukan selama dua tahun terakhir ini.

Akung membeberkan poin-poin yang menjadi sumber masalah dalam pintalan benang kusut bendungan Jatigede ini. Jika ditelusuri maka masalah ini bersumber dari pendataan pada tahun 1984-1986 yang tidak transparan. Pada tahun 1986-2002 tidak ada kejelasan sama sekali apakah pembangunan ini akan lanjut atau tidak. Akung pribadi mengatasnamakan masyarakat dusun Bantarawi merasa setuju jikalau pembangunan akan tetap dilanjutkan asal diselesaikan dengan benar permasalahan-permasalahan yang ada. Namun ada juga beberapa desa yang justru menolak, disebabkan proses pembayarannya yang tidak benar. Akhirnya, masyarakat melakukan aksi protes menuntut kejelasan dan didapatkan keputusan bahwa pembangunan bendungan Jatigede akan tetap dilanjutkan. Tepat setelah keluar keputusan tersebut beberapa wilayah seperti Pawenang, Wado, Sukaratu, dan Cibogo diukur untuk pertama kalinya pada tahun 2004 dan pada tahun 2006-2008 dituntaskan pembayarannya hingga tidak ada masalah lagi. Konon, termasuk 'rumah hantu', dan inilah yang menyebabkan di daerah-daerah lain termasuk desa Padajaya, khususnya dusun Bantarawi ini masyarakatnya *ikut-ikutan* trik tersebut.

Akung memberitahu saya ada banyak KK yang belum dibayar sama sekali dari tahun 1982 hingga saat ini, salah satunya Bapak IT. Memang pada pengukuran tahun 1984-1986, bagi yang tanah dan bangunannya terlewat bisa mengajukan *complaint* pada tahun 1986. Akan tetapi pada kenyataannya *complaint* tersebut hanya sekedar ditampung tanpa ada realisasinya. Hanya diadakan pendataan ulang setiap periode, tahun 1990 dan 1999, tapi tetap saja tidak ada realisasi penuntasan yang sebenar-benarnya.

Ditengah-tengah banyaknya perselisihan mengenai pendataan, permasalahan istilah yang dipakai untuk ukuran juga menjadi persoalan. Masyarakat awam memakai istilah per bata, sedangkan pemerintah memakai istilah hitungan standar meter. Setiap negosiasi harga ditanyakan terlebih dahulu apakah mau dibayar per bata atau meter. Padahal sebenarnya hitungan harga akan tetap sama.

“..mun dititah pindah oge da pada bingung pasti, rek kamana duit oge teu aya. Mun teu difasilitasi rakyat bakal jadi korban. Saya sendiri oge teu siap jeung teu hoyong jadi korban.”

(Jika disuruh pindah masyarakat juga pasti bingung, mau kemana karena uangnya juga tidak ada. Jika tidak difasilitasi rakyat akan menjadi korban (pembangunan). Saya sendiri juga tidak siap dan tidak mau menjadi korban).

Pada kenyataannya upaya untuk menahan jalannya pembangunan bendungan Jatigede demi mendahulukan penyelesaian permasalahan sosial budaya di areal OTD sudah dilakukan dari tahun ke tahun. Diantaranya adalah pada tahun 2007 yang mana rencananya akan ada peledakan batu pertama oleh presiden, tapi dibatalkan karena ditolak masyarakat. Akhirnya, peledakan tersebut tetap jadi dengan diwakilkan oleh bupati dan Eka Santosa dari komisi 2 DPRD, disertai janji untuk membatalkan proyek sebelum masalah sosial budaya selesai. Kesepakatan ini disahkan oleh menteri PU. Akung bertutur ia dan konsorsium juga segenap masyarakat OTD akan tetap mengejar bupati untuk masalah keputusan, karena PU dan Satker lebih ke masalah teknis lapangan. Sejauh ini progres yang terdengar adalah akan diadakannya pengukuran ke wilayah bantarawi pada hari Rabu, 27 April 2011.

Untuk melihat bagaimana keaktifan Akung dalam berperan di konsorsium dan menunjukkan kemampuan politisnya saya mengikuti aksi protes yang dikoordinasi oleh Akung pada tanggal 25 April 2011. Saat itu kami berangkat demo dengan satu mobil bak sebagai perwakilan dari dusun Bantarawi, yang mengangkut pengeras suara untuk orasi dan sekitar 10 orang ikut di bak belakang, termasuk Akung. Peserta aksi protes ini hanya bapak-bapak dari dusun Bantarawi Landeuh dan Gunung Penuh, dan sebagian besar dari mereka adalah yang memang suka *nongkrong* di warung Inul. Memang tidak semua warga yang menaruh penilaian positif pada Akung. Seperti Bapak IT misalnya yang sangat meragukan Akung.

“Jelema nu kitu mah bisa dijero bisa diluar. Ngarana ge politik lah..”

(Orang seperti itu bisa di dalam bisa di luar. Namanya juga politik).

Bapak IT terlihat mendukung misi protes ini, terutama terkait dengan masalah pembayaran ganti rugi tanah dan bangunan yang terlewat pada tahun 1984-1986. Akan tetapi Bapak IT kurang *respect* kepada Akung secara pribadi karena merasa Akung masih terlalu muda tapi sudah banyak bertingkah.

Saya duduk di bangku depan bersama Mang Dede yang menjadi supir dan seorang ibu yang membawa anaknya. Kabarnya setiap kali demo para peserta dipungut biaya Rp 10.000,- oleh Akung untuk biaya transportasi. Begitu pun dengan saya, kagetnya saya diminta membayar Rp 50.000,- tapi akhirnya hanya saya bayar Rp 20.000,-. Sepanjang jalan pengeras suara memainkan musik dangdut sambil sesekali ada suara orasi untuk mengajak masyarakat ikut serta atau minimal mendukung aksi ini.

Di desa Bojongsalam ada 4 mobil dan belasan motor yang menunggu di sana. Rupanya kendaraan-kendaraan tersebut adalah para peserta dari Bojongsalam dan beberapa dari desa seberang. Kami berangkat dan sesampainya di Darmaraja ada 4 truk, belasan mobil pribadi, dan puluhan motor sudah *stand by*. Sebagaimana penuturan Akung kemarin bahwa demo ini akan diikuti oleh seluruh masyarakat dari 30 desa di 5 kecamatan yang terkena dampak bendungan Jatigede. Perjalanan sampai ke Gedung Negara kantor Bupati Sumedang sekitar 2 jam. Kami dikawal oleh puluhan polisi dari tiap pos kecamatan.

Sesampainya di depan Gedung Negara satuan polisi sudah bersiaga di balik pintu gerbang mengantisipasi aksi massa. Aparat keamanan dari satuan pengendali massa (dalmas) Polres Sumedang, dibantu Satpol PP menutup dan menjaga ketat pintu gerbang Gedung Negara Sumedang (Radar Sumedang/26 April 2011).



Gambar 3.5.1 Aksi Protes

(Sumber: Wulan, 2011)

Truk, motor, dan kendaraan pribadi di parkir di lapangan alun-alun Gedung Negara. Dua mobil komando termasuk yang saya tumpangi diparkir persis di depan pintu gerbang Gedung Negara. Pimpinan aksi, Kusnadi Chandrawiguna mengawali orasi di atas mobil komando. Ia mengatakan agenda aksi yang dilakukannya itu adalah menagih janji bertemu dengan Bupati Sumedang, untuk membicarakan penanganan dampak sosial pembangunan Jatigede.

“Sesuai dengan kesepakatan tertulis, hari ini kita tagih janji bertemu dengan Bupati Sumedang,” ujar Kusnadi dalam orasinya. (Radar Sumedang/26 April 2011)

Setelah mendata 16 orang yang masuk sebagai perwakilan dalam pertemuan dialog ini, termasuk saya di dalamnya, Asisten Pemerintahan Daerah (Asda) Agus Sukandar menerima kami dan mempersilakan kami masuk ke dalam ruang pertemuan di ruang rapat Wakil Bupati Sumedang. Tidak lama kemudian ketua DPRD Sumedang, Yaya Widarya bersama ketiga wakilnya, disusul Kepala Satker Jatigede Airlangga Marjono, memasuki ruangan dan menyalami perwakilan para pengunjung rasa. Saya mengambil duduk di kerumunan wartawan, diantaranya ada dari Metro TV, SCTV, ANtv, Radar Sumedang, dan Jawa Pos.

Saya mengamati bagaimana para perwakilan pengunjung rasa sudah tidak sabar menunggu 15 menit berlalu tapi bupati belum juga datang. Mereka langsung berteriak kepada ketua DPRD Sumedang agar segera memulai rapat dan menghadirkan bupati Sumedang. Yaya Widarya kemudian meminta jajaran birokrat untuk segera mendatangkan perwakilan eksekutif dan segera memulai rapat. Pada saat yang bersamaan, Sekda Atje Aripin Abdullah memang sedang ada agenda membuka kegiatan program Kesehatan tingkat Jawa Barat di Aula Pemkab Sumedang (Radar Sumedang/ 26 April 2011). Tidak lama kemudian Sekda masuk dan memulai rapat tersebut.

“Pada kesempatan kali ini, Bapak Bupati tidak bisa hadir karena harus mengikuti kegiatan resmi bersama Presiden di Istana Negara untuk menerima penghargaan

HAKI,” ujar Sekda. Jelas pengunjuk rasa merasa kesal. Beberapa dari mereka berteriak meminta rapat ini dibubarkan.

“Sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh Bapak Agus Sukandar dan Bapak Airlangga, mereka berjanji hari ini bisa mempertemukan kami dengan empat unsure yakni Bupati Sumedang, Sekda, Ketua DPRD, dan Kepala Satker. Sekarang Bupati ternyata tidak hadir, maka sesuai dengan pernyataan tertulis mereka, jika Bupati tidak bisa hadir hari ini kita siap menutup dan menghentikan pembangunan waduk Jatigede secara menyeluruh,” Dedi Kusmayadi selaku ketua Konsorsium OTD Jatigede memberikan penjelasan.

Perwakilan pengunjuk rasa lainnya menumpahkan kekesalan dengan menuding dan menunjuk muka Kepala Satker Jatigede sambil berteriak mengancam penghentian paksa proyek nasional tersebut. Bahkan ada yang sempat menendang kursi sehingga aparat keamanan dan satpol PP masuk ke dalam ruang rapat mengamankan situasi yang sempat memanas itu. Menanggapi ekspresi dan pernyataan pengunjuk rasa atas fakta ketidakhadiran Bupati Sumedang dalam acara itu, Sekda mengembalikannya kepada pengunjuk rasa. Sekda Atje Aripin juga menjelaskan langkah-langkah yang telah ditempuh pihak pemerintah kabupaten Sumedang terkait Jatigede.

“Jatigede ini bukan hanya tanggung jawab Pemkab Sumedang, tetapi juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Saat dilakukan rapat koordinasi di Bandung (pemprov Jawa Barat) kemarin, sudah dibuat MoU antara Pemkab, Pemprov dan lima kementerian untuk menangani dampak Jatigede”.

Pengunjuk rasa tetap menolak meneruskan rapat, keluar ruangan dan berniat langsung menuju kawasan Jatigede untuk menutup proyek. Disepakati akan diadakan pertemuan satu jam kedepan. Selama rehat ini saya menyaksikan orasi di luar. Pengunjuk rasa merasa kecewa dengan ketidakhadiran bupati dalam pertemuan tersebut.

“Telah meninggal Bupati kita yang tercinta Don Murdono. Semoga tidak diterima iman islamnya. Diterima semua dosanya. Mari kita bacakan suratul fatihah untuk Bupati kita yang tercinta,” demikian orasi sindiran yang sarat dengan emosi

penuh kecewa mewakili para pengunjuk rasa. Beberapa dari mereka menurut dan membacakan ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah, dan sebagian yang lain malah menjadikan itu guyonan.

Satu jam kemudian rapat kembali dimulai di Aula Pemkab. Asisten Pemerintahan Agus Sukandar menegaskan, dirinya berani menandatangani surat pernyataan bisa menghadirkan Bupati Sumedang Don Murdono yang dibuat oleh para pengunjuk rasa dalam aksi unjuk rasa hari Kamis (21/04) yang lalu itu, karena sudah melakukan konfirmasi langsung dengan Bupati Sumedang.

“Itu bukan inisiatif saya. Waktu itu saya menghubungi Bapak Bupati dan berbicara dengan beliau. Bapak Kasdim (Kepala Staf Kodim 0610) sebagai saksinya saya menelepon beliau. Dan sebagai bawahan saya taat saja ketika Bapak Bupati mengatakan bisa bertemu, sekali lagi saksinya Bapak Kasdim, itu bukan inisiatif saya, sebab tidak mungkin bawahan mendahului atasan,” jelasnya di hadapan Sekda, Ketua DPRD, serta para pengunjuk rasa. Pernyataan Agus tersebut dalam rangka menanggapi pernyataan beberapa pengunjuk rasa yang menuding dirinya gagal memenuhi janji yang tertulis dalam surat kesepakatan bersama yang ditandatanganinya bersama Kepala Satker Airlangga Marjono.

“Tugas saya memfasilitasi pertemuan ini. Dan semuanya hadir, kecuali Bapak Bupati. Ketidakhadiran beliau pun logis karena ada tugas kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan,” tuturnya.

Pertemuan susulan ini dimulai dengan kehadiran Sekda Atje Aripin Abdullah, Ketua DPRD Sumedang Yaya Widarya, Wakil Ketua DPRD I Edi A., Wakil Ketua DPRD II H. Sarnata, Wakil Ketua DPRD III Asep Ely Gunawan, dan Kepala Satker Proyek Jatigede Airlangga Murjono. Negosiasi ulang ini pun berjalan alot. Dalam pertemuan susulan ini pengunjuk rasa terus mendesak untuk bisa bertemu Bupati Sumedang. Mereka meminta kepastian dan jaminan jika mereka bisa bertemu dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Bupati Sumedang. Ketua DPRD Yaya Widarya mengatakan setidaknya satu minggu pihaknya baru bisa memfasilitasi dan menghadirkan Bupati Sumedang untuk bertemu dengan para pengunjuk rasa.

“DPRD tidak bisa asal ngomong. Kita harus rapat pimpinan terlebih dahulu termasuk mengundang fraksi-fraksi di DPRD. Namun kita upayakan setidaknya satu minggu untuk bisa mempertemukan Bapak Bupati dengan Bapak-Bapak. Kalau saat ini, saya tidak bisa mengatakan apa-apa, karena bertemu Bupati pun belum,” tandas Ketua DPRD.

Masing-masing pihak pun merumuskan kesepakatan yang akan dibuat pada saat itu. Final keputusan pun dibuat bahwa DPRD Sumedang akan mendorong dan memfasilitasi pertemuan koordinasi antara OTD dengan Bupati Sumedang, pemerintahan provinsi, serta pemerintah pusat, setidaknya dalam waktu satu minggu ke depan. Jika upaya koordinasi tersebut tidak dilaksanakan, maka kata Yaya, DPRD akan meminta Satker untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan fisik bendungan terbesar kedua di Asia itu (Radar Sumedang/26 April 2011).

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh seluruh pihak. Ketua DPRD langsung membacakannya di depan seluruh pengunjung rasa, di atas mobil orasi. Mendengar keputusan dari negosiasi seperti itu, seluruh pengunjung rasa terlihat menahan kecewa. Seluruh pengunjung rasa pun beriringan pulang menuju desa masing-masing.

“Kita lihat aja bagaimana jadinya seminggu ke depan. Kalau memang masih belum ada hasilnya pasti bakal lebih rame lagi dari hari ini. Makanya kalau bisa seminggu ke depan ikut aja lagi Neng,” tutur Akung.

Seminggu kemudian saya dengar tidak ada perubahan apa pun yang dihasilkan dari protes ini.

BAB 4 BERDAMAI DENGAN KETIDAKPASTIAN

4.1 Lain Dulu, Lain Sekarang

Dusun Bantarawi merupakan salah satu dusun di desa Padajaya kecamatan Wado kabupaten Sumedang Jawa Barat yang akan tergenang oleh bendungan Jatigede. Sebuah mega proyek yang sudah berpuluh-puluh tahun belum juga usai hingga saat ini. Dusun dengan potensi sosial, budaya, dan hasil pertanian yang cukup baik ini mengalami banyak perubahan baik dari segi sosial maupun lingkungan fisiknya.

Sejak bendungan ini mulai digarap telah banyak perubahan yang saya saksikan dan warga masyarakat rasakan. Diantaranya adalah akses jalan utama dari batas tugu Wado menuju dusun ini kondisinya sangat rusak, dan semakin rusak dari hari ke hari.



Gambar 4.1.1 Jalan Rusak Menuju Bantarawi

(Sumber: Wulan, 2011)

Selain itu jembatan yang dari Sundulan menuju Bojong Salam, yang berada di jalan utama saat ini tidak lagi aman untuk dilewati kendaraan. Aspalnya rusak dan bagian yang keropos ditambah oleh papan kayu yang menjadi dasar jembatan ini. Begitu juga dengan jembatan yang menghubungkan Bantarawi dan Cicaban.

LMD (Listrik Masuk Desa) di dusun ini pun tergolong tidak memadai bahkan tidak ada penerangan jalan sama sekali. Sangat menyulitkan dan cukup

berbahaya jika ingin bepergian malam hari. Tidak jarang juga dusun ini mengalami mati lampu. Selain itu fasilitas fisik lain yang diperlukan untuk mendukung aktifitas kehidupan mereka tidak lagi tersedia secara optimal. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Olot bahwasanya sejak tahun 1990-an pembangunan secara fisik secara otomatis sudah dihentikan. Sekarang tidak ada dana yang sifatnya untuk bangunan fisik, sudah di-stop. Bantuan berupa bangunan fisik sudah tidak ada sama sekali ke desa Padajaya. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat, No.181.1/SK.1267-Pem.Um/1981 tanggal 16 September 1981 tentang larangan kegiatan pembangunan fisik di areal genangan Bendungan Jatigede (Cakrawala Tandang, 1999:4). Pertimbangan pemerintah akan sia-sia saja mengadakan perbaikan di daerah calon genangan karena cepat atau lambat akan tergenang oleh bendungan. Sehingga warga masyarakat harus mengambil cara sendiri untuk menyediakan dan meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan.

Dusun Bantarawi terdiri dari 4 RT yang mencakup tiga wilayah yaitu Gunung Penuh, Bantarawi Landeuh, dan Bantarawi Tonggoh. Penyebaran administratif ini tidak lantas menceraiberaikan warga masyarakat Bantarawi secara ekstrim. Mereka masih dipimpin dalam satu kapunduhan. Memang ada hal-hal tertentu yang membuat *gap* diantara mereka yang lebih terlihat jelas dibandingkan dulu. Seperti yang terjadi saat upacara peringatan Buku Tahun pada tahun ini. Jika pada tahun-tahun sebelumnya peringatan Buku Tahun ramai dengan hiburan Jaipong di balai pertemuan. Tahun ini, dusun Bantarawi Tonggoh, Bantarawi Landeuh, dan Gunung Penuh melaksanakan acara ini secara terpisah.⁶⁶

Jumlah KK di dusun Bantarawi pada tahun 1980 ada 127 KK, dan khusus RT 04 yaitu wilayah Bantarawi Tonggoh ini ada 30 KK. Sedangkan pada tahun 1997, jumlah KK asli di dusun Bantarawi ini adalah 150 KK. Saat ini jumlah KK di dusun Bantarawi adalah 127 KK. KK ini merupakan jumlah KK aktif yang terdata di kantor desa. Tentu saja, semua KK ini tidak murni tinggal di dusun Bantarawi. Sudah banyak KK luar, misalnya ada yang punya keluarga di Jakarta membuat KK di sini juga dengan maksud agar mendapat tunjangan gusuran, jadi banyak KK yang merangkap.

⁶⁶ Fieldnote, 23 Oktober 2011

Karakter warga masyarakat yang dulu kental dengan budaya religius, saat ini kehidupan warga masyarakat dusun Bantarawi kerap melakukan penyimpangan. Seperti kasus S yang menjadi pelacur dan perselingkuan E dengan adik tiri suaminya.⁶⁷

Perubahan lainnya yang terlihat adalah dalam bidang mata pencaharian. Bagi generasi pertama dan kedua masyarakat Bantarawi, seperti Bapak R, Bapak Ana, Uwa Adeng dan Uwa Ade, bertani adalah profesi yang bukan semata-mata mencari makan. Akan tetapi sudah merupakan aktifitas yang mendarah daging hingga tidak bisa lepas dari diri mereka. Hubungan yang tercipta antara mereka dan lahannya bukan sebagai tuan yang menguras produktifitas dari sebuah alat produksi. Melainkan hubungan yang lebih intim, seperti yang dikemukakan oleh George Stuart, seperti dikutip Redfield (1985:90), salah satu pola hubungan itu adalah sikap intim dan hormat terhadap tanah yang menganggap pekerjaan pertanian sebagai pekerjaan yang baik dan kegiatan komersialisasi sebagai pekerjaan yang tidak terlalu baik. Ia menyebutnya sebagai “rasa samar-samar tentang sesuatu yang pantas dihormati di dalam tanah dan kegiatan pertanian”.⁶⁸ Tanah menjadi sumber penghidupan petani yang utama walaupun bukan berarti kepemilikan tanah kemudian menjadi sesuatu yang secara khusus menjadi tuntutan.

Pertanian yang mereka lakukan juga tidak diarahkan pada orientasi kapitalis, yaitu untuk dijadikan komoditi, dijual, dan mencari untung. Bertani adalah upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan subsistensi dan tuntutan sosial berupa biaya-biaya seremonial (Wolf:1996) yang menjadi kebutuhan bersama seluruh masyarakat. Petani Bantarawi senantiasa hidup dalam kesederhanaan dimana kebutuhan dasar mereka yang Scott sebut sebagai kebutuhan subsistensi adalah tuntutan yang utama. Mereka lebih mengutamakan apa yang dianggap aman dan dapat diandalkan daripada keuntungan yang dapat diperoleh dalam jangka panjang (Scott,1996:19).

⁶⁷ Fieldnote, September 2011

⁶⁸ Suhendar, Endang dan Yohana Budi Winarni.1997.*Petani dan Konflik Agraria*.Bandung: Yayasan Anatiga, hlm.7

Di generasi ketiga, yaitu anak-anak muda, tidak lagi terikat pada aktifitas pertanian. Terkadang mereka dituntut untuk turun ke sawah membantu orang tua mereka. Memiliki anak yang bisa diandalkan untuk membantu pertanian mereka, memang merupakan aset tersendiri. Resiko terhadap biaya untuk memburuhkannya kepada orang lain atau kerabat sekalipun akan berkurang. Namun demikian, banyak dari anak-anak muda yang beralih profesi sebagai tukang *ojek*. Penghasilannya memang lumayan, per harinya mereka bisa mengantongi uang Rp 20.000,- - Rp 30.000,-. Cukup untuk membeli kebutuhan mereka seperti rokok dan kopi, jadi tidak perlu meminta kepada orang tua.

Proyek pembangunan bendungan Jatigede juga telah membuka banyak peluang para pejabat untuk korupsi. Seperti yang terjadi pada Ibu CU yang akhirnya ditahan selama 13 bulan ditambah tuntutan untuk ganti rugi. Kemunculan 'rumah hantu' sebagai ekses paling fenomenal dalam dampak proyek ini, sama parahnya dengan tidak karuannya kinerja perangkat desa Padajaya. Sama halnya dengan yang terjadi di tingkat dusun. Dalam prakteknya, perangkat dusun tidak berjalan sebagaimana idealnya sebuah kekuasaan/ kewenangan terstruktur. Ada kekuasaan yang tumpang tindih cenderung menstimulasi adanya *missed information* atau *transfer error* dalam distribusi arahan ke masyarakat. Diantaranya adalah diakibatkan penunjukkan posisi RT dan RW pada individu yang kurang tepat karena kurang berkompeten. Jika timbul kesalahan tidak jarang saling tuding terjadi antar aktor dalam perangkat ini. Selain itu, perbedaan ini juga dipicu oleh terbaginya warga masyarakat dusun Bantarawi ke dalam dua kubu, yaitu yang pro Ibu CU (bagian *wetan* dan *kidul*) dan yang kontra Ibu CU (bagian *kulon* dan *kaler*).

Meskipun ancaman air bendungan akan mengusir mereka suatu waktu dan perubahan banyak terjadi akibat tertundanya pelaksanaan pembangunan bendungan Jatigede ini, masyarakat Bantarawi masih bertahan menjalani kehidupan mereka. Aktifitas pertanian tetap mereka jalani dan mereka bertahan demi memenuhi kebutuhan dasar atau subsistensi mereka. Tidak hanya pertanian, aspek-aspek lain seperti kegiatan pendidikan, ritual upacara keagamaan dan upacara adat pernikahan juga tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Meskipun

semua itu harus mereka langunkan dalam keterbatasan akibat proyek pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda.

Dalam aspek pendidikan, Bapak Ence yang berprofesi sebagai guru di SMPN Wado di dusun Buah Ngariung, menjelaskan bahwa keberadaan pelaksanaan bendungan Jatigede yang tertunda ini pada awalnya memang mengganggu distribusi alat-alat penunjang KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) sehingga agak tersendat, tapi saat ini sudah dirasa cukup memadai. Lagipula pemerintah sudah menyiapkan rancangan migrasi sekolah ini sebagai prioritas. Hanya saja kondisi bangunan sekolah yang sudah rusak di beberapa bagian menjadi serba tanggung untuk diperbaiki.

Bertepatan dengan peringatan hari raya lebaran atau Idul Fitri tahun ini, saya kembali berada di dusun Bantarawi untuk melihat bagaimana warga merayakan lebaran. Pada suatu sore Bapak R mempersiapkan takbiran nanti malam, meskipun belum ada kepastian tanggal perayaan Idul Fitri tersebut. Menjelang waktu berbuka puasa saya membantu Bapak R untuk menyimak berita keputusan hari raya lebaran di televisi. Sayangnya, hanya ada dua channel TV yang dapat diakses dengan jelas di sini, RCTI, MNC TV dan Global TV. Channel lainnya memang dapat diakses, tapi gambarnya tidak jelas, kecuali mau bersusah payah memutar-mutar antena luar yang dipasang memakai bambu tinggi di samping rumah. Tidak heran jika warga masyarakat di dusun Bantarawi ini sangat menggandrungi sinetron Putri Yang Ditukar yang ditayangkan setiap hari di RCTI.

Adzan magrib berkumandang dan saya berbuka puasa bersama dengan keluarga Bapak R. Berita mengenai keputusan hari lebaran belum juga kami dapatkan. Akhirnya Bapak R mengambil keputusan untuk tetap mengajak warga melaksanakan sholat tarawih berjama'ah. Sebagai antisipasi terbaik jika memang hari raya lebaran diundur pada hari Rabu, 31 Agustus 2011. Menurut informasi dari beberapa orang, di dusun Bojongsalam, Sundulan, Gunung Penuh, dan Bantarawi Landeuh sudah dikumandangkan takbir dan akan menggelar hari raya esok hari. Sekitar pukul setengah 8 malam kami semua baru mendapatkan kepastian bahwa lebaran diundur dan besok puasa masih akan dilaksanakan.

Serentak gema takbir yang berkumandang di beberapa dusun selain Bantarawi Tonggoh ini dihentikan.

Pukul 3 dini hari saya dan Bapak R sekeluarga sahur untuk menunaikan puasa terakhir tahun ini. Suasana saat sahur sangat terasa berbeda dengan yang saya rasakan di rumah saya di Jakarta. Makan sahur terasa lebih berselera dengan kehangatan suasana keluarga. Lauk santap sahur kami kali ini di dominasi daging sapi dan kambing karena kebetulan ada beberapa keluarga yang menggelar hajjat. Sebagai pemuka agama dan menjabat ketua DKM Bapak R senantiasa diundang sebagai pendo'a. Tanda terimakasih yang biasanya diterima oleh Bapak R adalah berkat berupa nasi kuning atau sepaket makanan asli *hajatan*, dan amplop yang berisi uang yang nilainya tidak terlalu besar.

Keesokan harinya lebaran pun tiba. Warga dusun Bantarawi melaksanakan sholat Idul Fitri di Bantarawi Landeuh, di lapangan tempat anak-anak muda biasa bermain bola voli, lokasinya tidak jauh dari bibir sungai Cimanuk. Lapangan itu tidak terlalu besar, sehingga jemaah hampir memenuhi lajur jalan dan banyak jemaah yang juga menggunakan teras rumah warga untuk tempat sholat. Pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini diimami oleh Bapak Dadang dan khutbah dari Bapak R. Sholat berjalan khusyu', dan pada saat khutbah diperdengarkan kebanyakan dari shaf perempuan sudah sibuk sendiri merapikan mukena dan atributnya. Sedangkan yang saya perhatikan di shaf laki-laki masih dengan khidmat mendengarkan isi khutbah mengenai keteladanan dan wejangan-wejangan Rasulullah.

Menunggu khutbah selesai para ibu-ibu, remaja putri, dan anak-anak sudah membuat barisan di sepanjang jalan untuk bersalam-salaman meminta maaf (*halal bihalal*). Bahkan ada beberapa tuan rumah yang mengeluarkan kue lebaran dan air teh, dan mengundang ibu-ibu untuk sekedar *ngariung*⁶⁹.

⁶⁹ Berkumpul, hanya untuk *ngopi* dan mengobrol



Gambar 4.1.2 Halal bi Halal

(Sumber: Wulan, 2011)

Selesai *halal bi halal* saya kembali ke rumah Bapak R dengan sesekali mampir di rumah warga di sepanjang jalan untuk bersalaman meminta maaf dan *icip-icip* kue lebaran. Sesampainya di rumah Bapak R dilakukan ‘prosesi’ sungkem, sekalipun agak terganggu dengan kunjungan beberapa orang warga yang datang meminta do’a untuk kemenyan dan air yang akan dibawa untuk *nyekar* atau ziarah ke makam keluarga. Saya melihat di dusun Bantarawi ini pengaruh budaya Hindu masih tersisa. Islam terasa sebagai keyakinan yang terhitung masih baru, sehingga masih bercampur kental dengan adat istiadat lokal. Maka, tidak heran jika ada sebagian warga yang bisa dibilang Islam KTP.

Setelah prosesi sungkeman selesai, saya ikut keluarga Bapak R *nyekar* atau ziarah ke makam nenek dan kakek buyut, begitu saya menyebutnya, yaitu ibu dan baBapak dari Ibu A. Disana juga terdapat beberapa makam kerabat. Lokasi pemakaman dusun terletak beberapa meter di belakang bangunan sekolah SDN Bojong Salam di dusun Gunung Penuh. Kami berjalan kaki menuju ke sana menyusuri jalan aspal utama yang sudah rusak parah. Saya membawa 2 botol air sumur masing-masing dalam kemasan AQUA botol 1 liter. Bapak R membawa *harupat*⁷⁰ dan buku yasiin. Anggota keluarga yang lain masing-masing membawa Al-Qur’an dan buku yasiin. Kecuali Bapak Dadang, karena beliau sudah hafal surat yasiin di luar kepala. Sampai di makam, kami membersihkan makam dari daun-daun kering yang berserakan karena kebetulan makam keluarga Ibu A

⁷⁰ *Harupat* merupakan pelengkap dalam aktifitas ritual. Terbuat dari batang pohon aren atau lidi daun pohon kelapa dihimpun tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu panjang, diikat dengan buluh bambu.

terletak tepat di bawah sekitar 3 buah pohon beringin yang mengambil posisi duduk melingkar, dan Bapak R mulai memimpin do'a. Sedikit kemenyan dibakar di atas bara *harapat* dan membuka tutup AQUA botol, sambil terus membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Air tersebut kemudian disiramkan di atas makam-makam kerabat, setelah itu kami semua mulai mengaji, membaca surat Yasiin.



Gambar 4.1.3 Ziarah Kubur/ Nyekar

(Sumber: Wulan, 2011)

Saya dengar banyak yang mengadakan hajatan. Mengingat masih dalam suasana hari raya, mengadakan hajatan seolah *aji mumpung*. Masih banyak orang kota yang menetap di sini atau paling tidak setidaknya setiap keluarga pasti dikirim uang oleh sanak familinya yang bekerja di kota. Beberapa orang mengeluhkan banyaknya hajatan yang hampir berbarengan ini. Hampir seminggu ke depan ada beberapa agenda hajatan yang seyogyanya harus diberikan *sambungan*. Ada yang mengadakan hajatan 7 bulan kehamilan atau yang disebut *babaritan*. Prosesinya seperti pengajian pada umumnya dan tidak terlalu banyak juga yang ikut serta. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca biasanya merupakan surat khusus yang merujuk pada keberkahan si bayi. Seperti surat Luqman, agar si bayi tumbuh menjadi anak yang sholeh seperti Luqman dalam kisahnya. Surat Yusuf agar si bayi setampan Nabi Yusuf dan surat Maryam agar si bayi secantik dan seholeh Siti Maryam. Tidak ada ritual lain yang mencolok, hanya saja si ibu hamil diharuskan mandi kembang setelah pengajian usai. Bisa saja mandi kembang ini dilakukannya sekalian mandi sore, karena tidak ada ketentuan waktu atau tata cara khusus dalam mandi kembang ini.

Ada juga yang menggelar hajatan sunatan, yaitu cucu dari keluarga yang konon paling kaya di dusun ini. Namun semenjak kakeknya meninggal, hajatan

tidak lagi dilakukan semeriah dulu. Dulu, biasanya saya menyaksikan hingar bingar kemeriahan kuda renggong di halaman rumahnya. Sekarang hanya sekedar pengajian dan bagi-bagi berkat⁷¹. Cucu Bapak AN juga menggelar hajatan sunatan. Para tetangga sibuk membantu, seperti Bi Acih dan rekannya membersihkan ayam di dapur belakang rumah Bapak AN.

Berbeda dengan bagian kulon, di sebelah wetan di rumah Bapak IC tengah sibuk mempersiapkan hajatan pernikahan anak keduanya, A Wiw (Wiwaha). Tahun lalu adiknya, Nyai Sri, lebih dahulu menikah. Saya berkunjung untuk menemui calon mempelai laki-laki sambil memberikan kado berupa uang yang tidak seberapa jumlahnya, hanya untuk formalitas saja. Di ruang depan tertata rapi dan ada beberapa toples kue yang isinya makanan ringan yang sudah tidak asing lagi bagi saya, malah cukup membosankan. Saya diberikan *pamulang*⁷² dalam sebuah plastik berukuran sedang, isinya ada minuman kemasan Ale-Ale 2 buah, wafer, mie goreng dan mie rebus Sedaap masing-masing 1 buah.

Saya menyempatkan diri bergabung dengan ibu-ibu di dapur, mengobrol, bersenda gurau, sambil membantu sebisa-bisanya. Kesibukan masak memasak ini dilakukan di teras belakang rumah dekat sumur dan pekarangan belakang supaya lebih leluasa. Jika dilakukan di dapur di dalam rumah tidak akan muat. Di dalam dapur hanya ada *hawu*⁷³ yang sedang memasak nasi dengan menggunakan *se-eng*⁷⁴. Bahan bakar yang digunakan adalah kayu yang diambil di hutan. Kompor gas gratis yang di dapat dari program penyuluhan pemerintah hanya digunakan untuk masak yang alakadarnya, seperti sayur atau menggoreng untuk lauk pauk sehari-hari. Untuk masakan dengan kapasitas besar, warga lebih memilih membuat tungku *dadakan* dari batu bata dengan ukuran yang lebih besar di pekarangan.

Saya tidak suka kambing dan tidak tahan mencium bau kambing. Untuk bisa berbaur dengan ibu-ibu saya pun membantu menusuk-nusuk daging kambing

⁷¹ Makanan khas hajatan. Biasanya berupa nasi kuning dan beberapa makanan ringan seperti rengginang, opak, wajik, dll.

⁷² Pemberian dari keluarga mempelai kepada orang yang memberikan kado/*sambungan*

⁷³ Tungku batu dengan, terdiri dari satu atau dua lubang

⁷⁴ Alat untuk menanak nasi (dandang) yang terbuat dari tembaga berbentuk seperti vas bunga

untuk dibuat sate. Meskipun sesekali saya harus menahan nafas karena tidak kuat dengan baunya. Ada sekitar 6 orang ibu-ibu dan 4 orang bapak-bapak. Ada juga bapak-bapak yang lainnya memilih mengobrol di teras depan dengan calon mempelai laki-laki sambil menemani Bapak IC yang kabarnya sedang istirahat karena tidak enak badan. Di dapur kami membicarakan tentang banyaknya undangan hajat beberapa waktu belakangan ini. Sambil menusuki daging yang ada di tampah di hadapan saya, saya menyimak cerita mereka.

Ibu-ibu mengeluhkan banyaknya undangan hajat sekarang-sekarang ini. Selain masalah pembagian waktu untuk membantu. Seperti apa yang Bi Acih rasakan. Rumahnya yang terletak di pertengahan antara rumah Bapak AN dan Bapak IC membuat dia agak susah membagi waktu untuk membantu. Jika tidak membantu salah satunya, Bi Acih merasa tidak enak. Pagi hingga siang Bi Acih membantu memasak di rumah Bapak AN dan sore hingga malamnya di rumah Bapak IC. Selain itu mereka juga mengeluhkan masalah kekurangan uang untuk *nyambungan*. Bisa dibayangkan jika *nyambungan* ke satu hajatan saja mengeluarkan Rp 20.000,-, jika ada 3 hajatan dalam seminggu maka Rp 60.000,- yang harus mereka keluarkan. Untuk sunatan biasanya mereka hanya *nyecép* Rp 5.000 – Rp 10.000,-.

Namun demikian, untuk masalah besar kecilnya *sambungan* atau kado yang diberikan ini baik untuk hajat pernikahan ataupun hajat lainnya mereka selalu mendatanya. Nama dan nominal ditulis dengan jelas. Jika berupa barang seperti beras, daging, mereka tulis berapa banyaknya. Pada saat si pemberi akan mengadakan hajat, idealnya minimal si penerima akan memberikan barang atau uang dalam jumlah yang sama atau bahkan dilebihkan. Namun, pada prakteknya jika memang dalam keadaan tidak mampu tidak juga dipaksakan harus seperti itu. Biasanya dimaklumi, dengan adanya sedikit basa basi pada saat memberikannya. Meskipun memang terkadang timbul omongan yang tidak enak di belakangnya.

4.2 Jatigede: Kegagalan Sosialisasi, Arena Manipulasi

Selanjutnya ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan di sini sebagai gambaran pengaruh proyek bendungan Jatigede terhadap warga masyarakat petani yang terkena dampaknya. Pengaruh ini perlu dicermati untuk menangkap respon seperti apa yang direpresentasikan oleh warga masyarakat petani untuk bertahan dalam kondisi yang tidak stabil akibat tertunda-tundanya pembangunan bendungan tersebut. Serta sebagai dasar untuk memperhitungkan pembangunan bendungan Jatigede ini sebagai bentuk pembangunan yang gagal. Seperti apa yang disampaikan oleh Syafri Sairin bahwa secara konseptual program pembangunan yang dicanangkan pemerintah seringkali tidaklah dipahami oleh masyarakat sesuai dengan maksud program itu, dan hal ini merupakan kegagalan “sosialisasi” program kepada masyarakat sasaran.⁷⁵

Kegagalan dalam proyek ini sudah tercium dari carut marutnya pendataan yang dilakukan pertama kali pada tahun 1982. Pendataan yang tidak transparan ini seolah bagai bola salju yang terus menggulung dan menimbulkan banyak masalah baru, seperti migrasi yang gagal, menjamurnya ‘rumah hantu’, dan aksi protes sebagai upaya paling keras dari OTD juga ditanggapi secara setengah-setengah.

- *Kegagalan Sosialisasi Pendataan*

Jelas merupakan akar permasalahan yang memulai benang kusut dalam proyek bendungan Jatigede ini. Meskipun pembangunan Bendungan Jatigede ini masih berlangsung hingga detik ini, tapi peliknya permasalahan yang timbul dengan adanya proyek ini sudah cukup menegaskan kegagalan proyek. Kegagalan ini berawal dari pertama kali pemerintah merealisasikan pendataan yang tidak transparan. Di mana warga masyarakat tidak mengetahui sedikit pun maksud *kuli-kuli* ukur berkeliaran di lahan dan rumah mereka. Alibi pajak menjadi kesimpulan pribadi para petani hingga tunduk pada realita yang mereka tidak tahu dan mereka tidak sadari.

⁷⁵ Koentjaraningrat.1997.*Koentjaraningrat & Antropologi di Indonesia*.Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm.9

“*saya hanya sekedar kuli pengukuran saja*”, begitulah jawab para kuli ukur jika ditanya oleh warga untuk apa pengukuran dan pendataan ini dilakukan. Bahkan Bapak IT yang jelas-jelas rumahnya dijadikan *basecamp* juga tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tindakan para petugas ini. Bapak Kasiman yang kala itu juga ada, tidak jua terbuka untuk memberikan alasan yang bisa diterima. Pendataan yang tertutup ini membuat pelaksanaannya tidak karuan. Penamaan pemilik lahan banyak yang tidak sesuai dengan aslinya, luas lahan ditulis secara asal, yang luas menjadi sempit begitupun sebaliknya. Pendataan bangunan pun tidak kalah kusut. Karena ada beberapa warga yang bahkan tidak menyaksikan pengukuran lahan mereka tersebut berlangsung. Bahkan ada yang sengaja meminta kepada petugas untuk memperkecil luas lahan yang dimilikinya agar tidak terkena pajak yang besar. Alhasil banyak lahan, baik sawah, kebun, ataupun pemukiman yang terlewat.

Pendataan berlangsung dari tahun 1982-1984, khusus dusun Bantarawi pada tahun 1984. Pembayaran dilakukan 2 tahun kemudian, 1986, seluruh kepala keluarga diundang ke kantor Bank BNI di Sumedang. Di sana mereka disodori surat berlembar-lembar yang mungkin saja tidak cukup dimengerti dengan detail. Akan tetapi, saat itulah warga baru mengerti bahwa selama ini mereka dibodohi dengan adanya pengukuran tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Ditambah lagi penetapan harga jual tanah dan bangunan yang tentunya tidak sesuai karena tidak ada kompromi. Hanya penetapan sepihak dari pemerintah. Tapi apa yang bisa dilakukan warga pada saat itu, jika berani protes mereka akan langsung diseret ke KODIM dan ditindak secara militer. Tidak sedikit yang menerima konsekuensi kekerasan fisik dan ada juga yang berujung sampai ke penyiksaan yang mematikan. Hal ini juga terkait dengan masa kepemimpinan ORBA.

Tindakan anarkis ini sama dengan yang terjadi di proyek bendungan Bargi di India yang mengisahkan adanya pengusiran paksa pihak kepolisian yang *dibacking* pemerintah terhadap warga masyarakat

terkena dampak proyek ini, yang mencakup buruh dan pekerja agrikultur (D'Souza dkk.1996).

Pengaruh masa ORBA yang mewajibkan bungkam terhadap ketentuan pemerintah masih terbawa hingga saat ini. Sekalipun saat ini bangsa Indonesia sudah sangat jelas menganut asas demokrasi yang membebaskan masyarakatnya untuk bersuara, tapi generasi-generasi pertama yang saya temui di Bantarawi masih mengisyaratkan kerisauan dan ketakutan saat saya mempertanyakan isu-isu sensitif. Seperti pernyataan Bapak AN berikut saat ia akan menceritakan kronologis penyiksaan orang-orang yang dianggap membangkang di KODIM. Memori mereka terhadap kepemimpinan masa lalu, masih menyisakan kesan yang sama terhadap pemerintah hingga saat ini.

“...kade! Nu ieu mah ulah ditulis nya.. sekedar si eneng tau aja”

(Awas! Yang ini jangan ditulis yah.. sekedar untuk pengetahuan *si eneng* saja).

Beberapa warga generasi pertama juga mengetahui mengenai penyiksaan ini. Akan tetapi tidak semua dari mereka dapat menceritakan detail, karena ingatan mereka dan interpretasi mereka yang mungkin berbeda dengan Bapak AN yang katanya mengalami dan menyaksikan sendiri bagaimana kekerasan itu dilakukan. Bapak IC dan Bapak R juga menyinggung hal ini, dan maka dari itu mereka berdua mengarahkan saya untuk bertemu dengan Bapak AN. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mihesuah (1996), yaitu anggota yang berbeda bisa memiliki interpretasi berbeda terhadap cerita yang sama, dan tidak semua orang dapat mengingat/*recall* secara akurat menyajikan cerita yang mereka perdengarkan di tempat pertama.

Menjelang masa ORBA berakhir, sekitar tahun 1990-an pengajuan untuk lahan yang terlewat diperbolehkan. Semua warga berbondong-bondong memperjuangkan lahan dan bangunan serta tanaman mereka yang terlewat. Masa-masa ini menjadi masa yang menguntungkan bagi oknum dan perangkat desa yang tidak punya niat lurus. Korupsi semakin

merajalela. Dengan *iming-iming* akan mempercepat proses dan memprioritaskan petani yang berani menyediakan uang pancingan maka ganti rugi akan segera didapatkan. Kondisi subsistensi petani yang sudah masuk dalam masa-masa sulit sejak adanya ancaman bendungan ini ditambah dengan akal-akalan oknum dari pemerintahan juga yang dengan teganya memeras petani demi keuntungannya sendiri. Akibat kasus korupsi yang akhirnya menyeruak ke level atas, Ibu Kuwu CU pun terjerat hukum.

Pada tahun 1994 dilakukan pendataan ulang, petugas langsung turun ke lapangan untuk mengukur dan mengantisipasi adanya tanah yang terlewat. Setelah ada pendataan tahun 1994, sempat ada pendataan pada tahun 1999 dan tahun 2009. Namun, hingga saat ini tetap tidak ada tindak lanjut yang konkrit. Bahkan yang menggelikan, pada saat pendataan tahun 1999, warga saling meminjam pagar dan kandang kambing untuk mendapatkan bayaran ganti rugi yang lebih banyak. Jadi, pagar dan kandang kambing tersebut dipindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Bahkan juga ada yang membangun makam palsu demi mendapatkan tambahan bayaran ganti rugi. Bisa dikatakan ini merupakan akal-akalan petani, yang tidak ingin kalah dibodohi oleh pemerintah yang telah menipu mereka sejak pendataan pertama kali. Ini juga bisa dilihat sebagai awal mula dari bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.

Namun yang terjadi hingga saat ini adalah pendataan terus berjalan tanpa ada realisasi pembayaran tidak juga dilakukan. Isu ini malah cenderung timbul tenggelam. Seolah-olah janji untuk pembayaran hanyalah cara pemerintah untuk meredam suasana jika masyarakat sudah mulai gerah dan tuntutan akan bendungan Jatigede ini kembali memanas.

- ***Kembalinya Para Migran***

Sedari awal, proyek ini memang sudah ditolak oleh masyarakat. Namun, pemerintah dengan budaya proyeknya yang berorientasi pada

target proyek memaksakan pemindahan masyarakat sebagai satu keharusan.

Data yang didapat dari Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH, pada tahun 1994-1999 yang tercatat 4.962 jiwa, atau 1.475 keluarga. Paling banyak bertransmigrasi ke propinsi Riau, ada 2.128 jiwa yang berasal dari seluruh desa calon terkena genangan (Cakrawala Tandang, 1999). Ada juga yang ikut migrasi ke tanah bekas perkebunan Arinen di Kec.Pakenjeng Kab.Garut, tercatat 407 jiwa. Mereka berangkat tahun 1996 tercatat 32 jiwa (10 KK) dan tahun 1998 375 jiwa (85 KK). Selain ke Arinen, pemerintah menyediakan juga lokasi migrasi di daerah Cianjur, salah satunya ke wilayah Koleberes, Cianjur tercatat 85 jiwa (Cakrawala Tandang,1999).

Sosialisasi transmigrasi pertama kali ke Bengkulu karena proyek pembangunan bendungan Jatigede dilakukan tepat setelah pembayaran ganti rugi pada tahun 1986. Sosialisasi ini dilakukan melalui penayangan film layar tancap yang sama sekali tidak memancing minat positif warga masyarakat Bantarawi. Mereka justru hampir merusak layar dengan asumsi penayangan video pembukaan lahan di lokasi transmigrasi hanyalah alat untuk *ngabibita* hingga akhirnya mereka mau dipindahkan dari tanah kelahiran mereka.

Masyarakat yang dipindahkan karena waduk dan bendungan adalah konsekuensi dari pembangunan (Scudder & Colson 1982; Cernea 1990 dalam Heming dkk:2001). Kategori yang ditawarkan Heming dkk (2001) yang menjelaskan beberapa karakteristik dari pemindahan karena bendungan dapat kita lihat secara nyata di warga petani Bantarawi. Pertama, masyarakat dipaksa untuk pindah melawan keinginan mereka. Heming dkk mengakui bahwa banyak migran yang tidak memiliki pilihan yang realistis untuk pindah. Pemindahan ini adalah skema dari pemerintah yang timbul akibat pembangunan bendungan Jatigede. Masyarakat yang disebut migran yang dipaksakan ini berpura-pura berasumsi bahwa pemerintah akan bertanggung jawab untuk kembali membangun

kehidupan mereka setelah dipindahkan. Atau tepatnya, masyarakat menaruh harapan yang besar bahwa pemerintah akan menjamin kehidupannya, minimal kebutuhan subsistensi akan lahan pertanian yang sama amannya dia dapatkan di tempat semula. Ada kontrak sosial (kadang eksplisit) antara banyaknya keuntungan dari bendungan ini dan beberapa yang menderita.

Kedua, masyarakat yang pindah karena bendungan tidak meninggalkan tempat asal mereka secara normal dan masuk dengan mantapnya di tempat yang baru. Masih memiliki waktu untuk menyusun relokasi mereka, meskipun pilihan tujuan mereka bergantung pada rencana pemindahan dari pemerintah yang lebih luas. Karena biaya yang berat dalam pemindahan ini, 'jarang relokasi menjadi kondisi yang jauh lebih baik secara materil dan sosial dibandingkan sebelum mereka pindah' (Parnwell, 1993:48) dan beberapa justru menderita dari sebuah situasi 'layaknya pengungsian'. Seperti yang dialami oleh Mang Ihir yang ikut transmigrasi gelombang pertama pada tahun 1986 ke Lubuk Linggau, Bengkulu. Kondisi yang sangat menyedihkan dialaminya sampai harus ribut dengan transmigran dari DKI Jakarta.

Sesampainya di Bengkulu diajak muter-muter dulu biar tidak hafal jalan. Menurut informasi yang didapatkannya rumah sudah disediakan tinggal buka kunci cari nomer rumah. Tapi pas datang malah dikumpulkan di masjid sebagian, sebagian lagi di rumah sakit ada sekitar 8 KK pada menggelar sepeti ikan, dan yang dari Desa Padajaya digabung sama orang-orang DKI Jakarta. Orang-orang DKI Jakarta ini tidak membawa apa-apa, sedangkan Mang Ihir dan yang lain membawa segala macam, seperti bibit, kasur, dan peralatan rumah tangga. Mungkin saja mereka emosi, karena mereka saja belum kebagian kepastian lahan, sekarang sudah datang lagi transmigran baru. Akhirnya keributan pun terjadi. Pak Pardi sampai sembunyi di dalam kasur. Orang-orang DKI itu tidak berani masuk hanya memukul-mukul dinding luar yang terbuat dari triplek dan kaca.⁷⁶

⁷⁶ Fieldnotes, 18 Februari 2011

Ketiga, migran tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke tempat asal mereka ketika tanah mereka benar-benar sudah tergenang.

Kisah pemindahan dan transmigrasi dari mereka yang ikut memang menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah untuk masalah tersebut. Bagaimana bisa petani ditempatkan pada lahan yang mereka sama sekali tidak bisa menanam padi di atasnya. Sekalipun diberikan latihan untuk budidaya komoditi agrobisnis lainnya, tetap saja yang didahulukan petani adalah kebutuhan perutnya, yaitu padi. Seperti apa yang dikatakan Bapak D, seorang warga yang pernah ikut pemindahan ke Arinen, Garut.

“mun kabagean serang atawa tanah pegunungan siga batur, nya meureun ku bapak rek diteruskeun cicing jeung usaha diditu..”

(Andai saja kebagian serang dan tanah pegunungan seperti orang lain, kemungkinan bapak akan meneruskan untuk tinggal dan usaha disana).

Tidak memiliki lahan sawah merupakan ancaman tersendiri bagi mereka. Mereka merasa kehidupan mereka tidak akan terjamin.

“kumaha mun kieu terus-terusan? Jadi, mendingan di dieu. Sanajan kondisina teu jelas nu penting masih bisa nyawah...”

(Bagaimana kalau begini terus? Jadi mendingan disini meskipun kondisinya tidak jelas yang penting adalah masih bisa bertani).

Pernyataan Bapak D di atas sama halnya dengan pernyataan Bapak Ana, Bapak IT dan Bapak R yang menolak transmigrasi. Mereka merasa tidak banyak yang bisa dilakukan di sana, karena usia yang sudah membatasi produktifitas mereka untuk mengolah lahan transmigrasi yang kemungkinan bukanlah padi. Mereka lebih memilih tinggal, bertahan di dusun Bantarawi dan menunggu kepastian Jatigede seperti apa nantinya.

Keputusan Bapak Rahman, Bapak AN, dan Bapak IT ini merujuk pada prinsip ‘dahulukan selamat’ yang diajukan Scott, di mana petani akan mengutamakan keberadaan dia dan lahan yang produktif untuk pemenuhan subsistensinya. Selama masih ada tanah yang ditanami padi mereka akan

merasa dijamin hidupnya. Dengan kondisi lahan yang tidak bagus di tempat yang baru tidak mengherankan jika akhirnya mereka lebih memilih untuk kembali ke Bantarawi. Kendati kondisinya masih terombang-ambing ketidakpastian. *Toh*, bendungannya belum juga jadi. Seperti contoh miris di kasus bendungan Danjiangkou di Sungai Hanjiang, 100rb orang di dua provinsi direlokasi tanpa ada rencana, rumah, ladang, untuk para pengungsi. Hanya isu instruksi semata dan masyarakatnya diberikan sekantong uang. Spontan mereka kembali ke area bendungan, karena merasa rugi (Heming, dkk. 2001).

- ***Virus ‘rumah hantu’***

‘Rumah hantu’ atau rumah harapan tunai adalah poin yang paling fenomenal dan yang membuat sejarah bendungan Jatigede ini berbeda dengan pembangunan bendungan yang lainnya. Dengan ketertundaannya yang sangat lama, hingga puluhan tahun, bendungan Jatigede telah membuka celah-celah peluang bagi warga masyarakat petani untuk berspekulasi. ‘Rumah hantu’ adalah salah satunya.

Saran untuk membangun ‘rumah hantu’ ini, konon datang dari oknum pemerintah sendiri. Oknum ini berasal dari petugas pendataan, baik yang melarang ataupun menyuruh pembangunan ‘rumah hantu’ tersebut. Melihat bangunan-bangunan ‘rumah hantu’ di desa Cibogo dibayar tuntas oleh pemerintah, maka Bapak AN berinisiatif untuk membangun ‘rumah hantu’, dan menjadi *pioneer* di dusun Bantarawi khususnya. Jelas demikian, karena Bapak AN didukung dengan modal pribadi yang kuat.

Ada tiga kriteria kepemilikan bangunan saat ini khususnya di desa Padajaya. Yang pertama adalah orang asli Padajaya yang punya tanah dan bangunan sendiri. Kedua, orang luar yang memang punya rumah di sini (merantau ke Jakarta misalnya), dan yang ketiga orang luar desa yang sewa membuat bangunan di atas tanah orang asli desa Padajaya. ‘rumah hantu’ yang didirikan pun terbagi dalam 3 spesifikasi, yaitu:

1. Bangunan permanen

Layaknya rumah, bangunan ini ditembok, diubin, atapnya dari genting, dan terbagi dalam beberapa ruangan seperti kamar dan toilet.

2. Bangunan semi permanen

Bangunan ini diubin seperti rumah permanen, dindingnya setengah tembok dan setengah ke atas terbuat dari *bilik*⁷⁷. Atapnya ada yang memakai seng ada juga yang menggunakan genting. Ruangannya tidak sevariatif bangunan rumah permanen, karena luasnya yang terbatas.

3. Bangunan tidak permanen/gubuk/*saung*

Bangunan ini tidak diubin, dibiarkan tanah saja. Dindingnya terbuat dari *bilik* dan bambu sebagai tiang fondasinya. Atapnya ada yang menggunakan seng dan ada juga yang menggunakan genting. Kebanyakan tipe *saung* ini dibangun di areal persawahan, sehingga mereka bisa menggunakan alibi *saung* ini dibangun bukan untuk mengincar ganti rugi tapi untuk keperluan aktifitas pertanian mereka. Seperti yang dibangun Bapak R dan Bapak IT.

Bapak AN adalah orang yang sempat mendapatkan banyak keuntungan dari terbayarnya ‘rumah hantu’ di daerah Buah Ngariung. Namun, keputusannya untuk menginvestasikan kembali ditambah dengan sedikit kekayaan yang dimilikinya, ia dan anaknya kembali membangun ‘rumah hantu’ di desa Padajaya. Tidak tanggung-tanggung, jumlah bangunannya hampir bisa membuat RT sendiri. Idenya ini juga diikuti oleh keponakannya yang kini kompak menuruti jejaknya menjadi ‘aktifis’, Akung.

Virus ‘rumah hantu’ ini juga menular ke kalangan buruh petani. Bagi mereka yang tidak memiliki modal yang kuat, bisa *joint* dengan kawan atau kerabat. Atau bahkan menyewakan lahan kosong yang mereka miliki dan kemungkinan terlewat pengukuran kepada investor di luar dusun atau bahkan luar kota. Seperti yang dilakukan oleh Uwa Ade yang

⁷⁷ Anyaman bambu

joint dengan Mang Ajo, dan Bapak Dia yang juga membangun 'rumah hantu' meskipun hidup dalam kondisi seadanya sebagai buruh tani.

'Rumah hantu' disini adalah bentuk respon warga masyarakat petani Bantarawi yang cukup ekstrim dalam menuntut hak mereka akan keadilan. Ide dan keberanian mereka untuk membangun 'rumah hantu' ini adalah dari tindakan pemerintah yang membayar tuntas Cibogo dan Cisurat beserta dengan bangunan-bangunan 'rumah hantu'-nya. Padahal setelah saya telusuri, Cibogo dan Cisurat menolak pembayaran ganti rugi pada tahun 1986 dengan kompak. Sehingga baru bisa dibebaskan pemerintah sekitar tahun 2004 dengan harga yang berlaku sekarang ini. Menjelang pembayaran, warga Cibogo dan Cisurat ramai membangun 'rumah hantu'. Dan terbayarlah semua. Berdasarkan hal tersebut, maka warga masyarakat di wilayah lain termasuk di desa Padajaya dan dusun Bantarawi khususnya juga melakukan hal yang sama dengan harapan pada saat penuntasan untuk masalah pendataan 1986, 'rumah hantu' ini akan turut dibayar.

Tindakan membangun 'rumah hantu' ini merupakan bentuk *coping* yang dipaparkan oleh Bennet (1996), bahwa adaptasi ketika didefinisikan sebagai peniruan (*coping*) perilaku menjadi sebuah nilai positif yang umum dalam keberadaan manusia. Adanya sebuah nilai yang tinggi yang terletak pada peniruan atau penyesuaian dalam semua masyarakat. *Coping* ini merupakan adaptasi tingkat individu, yang secara sederhana dapat dijelaskan dimana individu *deal*/setuju dengan keadaan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan/butuhkan (merubah secara aktif) atau untuk menerima situasi tersebut (merubah secara pasif).

Namun demikian, orientasi keuntungan diharapkan warga masyarakat dengan membangun 'rumah hantu' bukan berarti mereka keluar dari karakteristik mereka sebagai petani seperti yang disampaikan Scott (1996) yang mengutamakan selamat dan enggan mengambil resiko. Menghadapi kenyataan bahwa pembayaran tidak kunjung direalisasikan saja sudah merupakan resiko yang harus mereka tanggung dan kerugian

akan sangat nyata mereka terima jika memang 'rumah hantu' tidak termasuk ke dalam *item* pembayaran ganti rugi. 'Rumah hantu' ini dapat dilihat sebagai aktualisasi dari pendekatan yang ditawarkan Vayda (1983) yang mana menggambarkan bagaimana unit-unit merespon masalah lingkungan dan peluang-peluang yang bisa bergeser dari individu-individu pada bentuk-bentuk tingkatan kelompok dan individu yang bervariasi. 'Rumah hantu' merupakan bentuk respon terhadap peluang yang muncul dari ketertundaan pembangunan bendungan Jatigede, yang bermula dari ide di tingkatan individu bergeser ke tindakan kolektif/ kelompok masyarakat. Jadi, kita dapat melihat cara-cara tertentu manusia, melakukannya bersama-sama atau terpisah dan menggunakan teknologi yang tersedia, organisasi dan makna kebudayaan, merespon perubahan di lingkungan mereka (Tjitradjaja:1987).

Bisa dilihat bagaimana 'rumah hantu' bukan lagi permasalahan yang biasa. Menjamurnya 'rumah hantu' bisa sangat menghambat keberlanjutan pembangunan bendungan Jatigede. Permasalahan sosial yang dihadapi pemerintah semakin lengkap dan rumit dengan adanya tuntutan warga masyarakat akan 'rumah hantu'. Terbayangkan berapa besar yang harus pemerintah bayar jika hendak merealisasikan ganti rugi. Sekaligus 'rumah hantu' ini juga mengandung motif balas dendam, masyarakat kecewa dan merasa dibodoh-bodohi oleh tidak transparannya pemerintah di pendataan pertama kali. Kali ini saatnya warga masyarakat petani membodoh-bodohi pemerintah dengan media 'rumah hantu'. Meskipun memang ada sedikit penyesalan di hati mereka, karena telah membuang uang sia-sia untuk membangun 'rumah hantu' yang tidak jelas akan dibayar atau tidak, dan saat ini malah sudah hampir ambruk. Lebih ekstrim lagi fenomena 'rumah hantu' ini dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk gerakan petani yang disebabkan oleh perasaan akan kemerosotan status masa lalu yang diharapkan sekarang dan ancaman masa depan (Landsberger dan Alexandrov, 1987 dalam Suhendar & Winarni,1997: 34).

- ***Luapan Protes Warga***

Aksi protes merupakan bentuk luapan amarah yang paling puncak dari masyarakat yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintahannya. Penggusuran komunitas dan hak-hak petani oleh pemodal yang cenderung mementingkan pusat-pusat komersial atau kawasan industri, dan pecahnya struktur politik-ekonomi negara, merupakan perubahan-perubahan sosial yang menghasilkan gerakan petani akibat ketidakpuasan tersebut.⁷⁸ Itulah yang dirasakan oleh masyarakat petani Bantarawi, merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang menggantung-gantung nasibnya demi ambisinya terhadap megaprojek bendungan Jatigede.

Scott melihat bahwa dorongan moral (*moral propulsion*) merupakan alasan utama munculnya gerakan petani sehingga reaksi tersebut memiliki kekuatan moral yang besar.⁷⁹ Reaksi yang timbul dari aksi protes masyarakat terkena dampak tersebut berupa gerakan yang bersifat defensif dan bertujuan agar aturan-aturan tradisional yang menjamin keamanan ekonomi petani segera dikembalikan karena secara moral, hak tersebut menjamin kebutuhan-kebutuhan fisik manusia atas kelangsungan hidupnya. Jelas, dengan tertunda-tundanya pembangunan bendungan Jatigede masyarakat merasa hidupnya seperti terpasung. Sejalan dengan pendapat Scott tersebut, Wolf (1955:190) melihat bahwa gerakan-gerakan dan aksi protes yang dilakukan petani biasanya sederhana dan seringkali berpusat pada mitos tentang suatu tatanan sosial yang adil dan sama rata.

Aksi protes pertama kali ke DPRD Sumedang dilakukan sekitar tahun 2000. Bapak R ikut serta dalam aksi protes tersebut. Aksi protes yang kedua ke Bandung pada tahun 2008, diikuti oleh banyak desa calon tergenang. Aksi protes ke pihak proyek di Jatigede berlangsung pada tahun 2009. Dalam aksi protes tersebut, warga minta kegiatan proyek

⁷⁸ Ibid, hlm.34

⁷⁹ Ibid, hlm.34

diberhentikan sementara sampai masalah ganti rugi diselesaikan. Aksi protes ini diikuti oleh sekitar 34 desa dari 5 kecamatan yang akan tergenang oleh bendungan Jatigede, dan bersatu dalam satu gerakan bernama GERDARENCAGE (Gerakan Daerah Rencana Jatigede). Aksi protes terbaru pada bulan April 2011 kemarin yang dilakukan di depan Gedung Negara/ Kantor Bupati dan diikuti oleh semua desa terkena dampak pembangunan bendungan Jatigede.

Sayangnya dari serangkaian aksi protes tersebut tidak juga memperlihatkan hasil berupa keputusan yang pasti dari pemerintah. Selain bupatinya sulit ditemui, janji-janji akan penanganan yang sesegera mungkin hanya alibi untuk meredam massa. Peran Konsorsium yang diketuai oleh Dedy Kusmayadi menjadi wadah peting bagi pergerakan OTD Jatigede. Dalam beberapa kasus, toleransi terhadap kondisi tidak pernah membentuk sebuah batas yang *absolute* atau *stopping point* berupa aspirasi: cepat atau lambat pergerakan terhadap kondisi yang lebih baik atau perubahan yang akan ada, biasanya dalam bentuk pergerakan politik dan ekonomi (Bennet,1996). Begitupun halnya dengan kasus tertunda-tundanya bendungan Jatigede ini telah memicu masyarakat untuk tidak bisa begitu saja menerima keadaan yang ada, tapi mereka melakukan pergerakan untuk meraih kondisi kehidupan yang lebih pasti dan lebih baik.

4.3 Berdamai dengan Ketidakpastian

Kondisi di dusun Bantarawi semakin menurun, dengan sulitnya akses ke luar kampung karena jalan yang semakin rusak. Kehidupan pertanian yang tidak lagi semaksimal dulu. Serta masyarakat yang hidup dalam bayang-bayang air bendungan yang bisa saja mengusir mereka sewaktu-waktu. Patok-patok tanda tanah ini milik negara memang sudah hilang sejak lama. Namun demikian, negara sebagai penguasa bisa melakukan apa saja jika pemimpinya bersikeras terhadap rakyatnya.

Di balik rasa was-was dan ketidaktenangan itu warga masyarakat berusaha berdamai dengan ketidakpastian yang merong-rong kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menjalani aktifitas yang mereka bisa lakukan setiap harinya. Pergi ke sawah, memelihara ternak mereka, bergaul dengan tetangga dan kerabat, melangsungkan pernikahan, melakukan transaksi perdagangan sederhana untuk menambah uang mereka dan merantau bagi generasi mudanya.



Gambar 4.3.1 Aktifitas warga dusun Bantarawi
(Sumber: Wulan, 2011)

Setelah panen padi, mereka akan menyimpannya dan memastikan bahwa hasil yang mereka dapatkan di panen kali ini akan cukup untuk makan mereka sampai waktu panen berikutnya. Hampir tidak ada dari mereka yang saya temukan dengan sengaja menjual padinya, atau dengan kata lain mengkomersilkan hasil panennya. Mereka baru akan menjual sebagian kecil dari simpanan mereka jika mereka merasa terdesak kebutuhan. Kebutuhan disini pun merupakan kebutuhan pokok mereka. Pada umumnya uang yang mereka dapatkan dari menjual sebagian kecil padinya juga digunakan untuk modal bertani mereka.

Seperti keberadaan tembakau yang menurut hemat saya merupakan komoditi penting di musim paceklik. Warga masyarakat bisa mendapatkan pemasukan meskipun bukan itu yang utama. Yang utama bagi mereka tetaplah ketersediaan padi yang cukup sampai masa panen padi berikutnya. Terbukti dengan tidak semua petani menanam tembakau saat paceklik tiba. Hanya yang bisa mengatasi pengairannya, seperti Bapak R yang memiliki mesin sedot air sendiri sehingga tidak mengeluarkan resiko besar untuk sewa. Berbeda dengan Bapak IC dan Bapak Ana yang tidak minat menanamnya karena terbentur dengan

biaya sewa mesin sehingga mereka lebih memilih untuk bersantai selama masa paceklik.

Warga masyarakat Bantarawi berusaha berdiri di tengah tekanan akan terpasungnya dusun ini menghadapi tertunda-tundanya bendungan Jatigede. Semua kebutuhan, baik fisik maupun sosial tetap dipenuhi demi berlangsungnya sebuah kehidupan yang baik. Mereka memang tidak lagi bersikeras mempertahankan tanahnya, sebaliknya mereka mau tidak mau menyerahkan apa yang mereka miliki sejak lama dengan ketentuan yang seadil-adilnya.

Sebagaimana yang Pak Olot ungkapkan, jika pembayaran sudah beres, meskipun proyek bendungan ini belum tentu jadi Pak Olot yakin pemerintah sudah menyediakan tempat relokasi untuk program bedol desa. Dengan begitu Pak Olot dan seluruh warga tidak ada alasan untuk tidak meninggalkan desa ini. Ada sekitar 7 wilayah bakal relokasi yang bisa dipilih. Dusun Sundulan maunya ke wilayah Pengangonan karena mereka punya tanah disitu, tapi bagaimana dengan orang Bantarawi dan Bojongsalam yang tidak punya tanah darat di sana. Jadi tidak ada bayangan nantinya akan bekerja apa.

“Boro-boro mau nyawah nanam cabe ge teuing bisa teuing henteu...”

(Jangankan mau punya sawah, menanam cabe juga tidak tahu bisa atau tidak), karena tidak punya lahan.

Ia pribadi lebih tertarik untuk pindah ke Conggeang. Pasalnya di Conggeang ada 5 sumber mata air yang langsung dari gunung, sehingga potensi kesuburan untuk pertanian cukup besar. Rencananya hanya akan disediakan rumah dan pekarangan. Untuk kembali bertani dan memiliki sawah, warga harus membelinya sendiri. Menurut Pak Olot masih lebih baik kalau ikut migrasi, semuanya sudah tersedia baik rumah maupun lahan olahan. Namun demikian, Pak Olot tidak akan mau pindah kemana pun sebelum ada pembayaran ganti rugi untuk asetnya yang belum terbayar.

“..ieu lembur urang, tanah urang, kunaon pindah. Mun bendungan jadi nuhun Bapak mah, teu jadi oge nuhun. Da Bapak mah betah didieu, najan hirup pas-pasan oge..”

(Ini kampung kita, tanah kita, mengapa pindah. Kalau bendungan jadi Bapak bersyukur, tidak jadi juga bersyukur. Soalnya Bapak betah di sini, meskipun hidup pas-pasan)

Saya juga menanyakan masalah relokasi kepada Bapak IT, tapi Bapak IT belum terpikir kemana relokasi yang tepat. Bapak IT akan ikut warga masyarakat pada umumnya untuk bedol desa. Jikapun disuruh menentukan tujuan masing-masing Bapak IT belum ada gambaran. Apalagi untuk wilayah di luar pulau, karena Bapak IT tidak pernah ikut transmigrasi ataupun program migrasi. Bapak IT memberikan pandangannya mengenai satu wilayah yang sempat menjadi perbincangan warga masyarakat yaitu Pengangonan/ Pamondokan. Menurut Bapak IT wilayah ini tanahnya mengandung unsur pasir sehingga susah untuk mata pencaharian, kemungkinan warga masyarakat beralih ke jalur pantai nantinya karena berada di pesisir bendungan.

Bapak AN menginginkan ganti rugi disesuaikan dengan harga dan masalah perpindahan/ relokasi juga harus diurus oleh pemerintah. Karena pemerintah yang sudah menjaminkannya dan menjanjikannya dari awal, sekaligus fasilitas seharusnya sudah siap. Bapak AN pribadi minat pindah ke Cipondoh, karena ia punya tanah yang tidak termasuk wilayah genangan di sana. Jadi, relokasi mandiri ataupun bedol desa bagi Bapak AN tidak masalah.

Mengapa kemudian Bapak AN masih bertahan di dusun ini antara lain karena Bapak AN memegang janji Pemda dulu, yang menyatakan ;

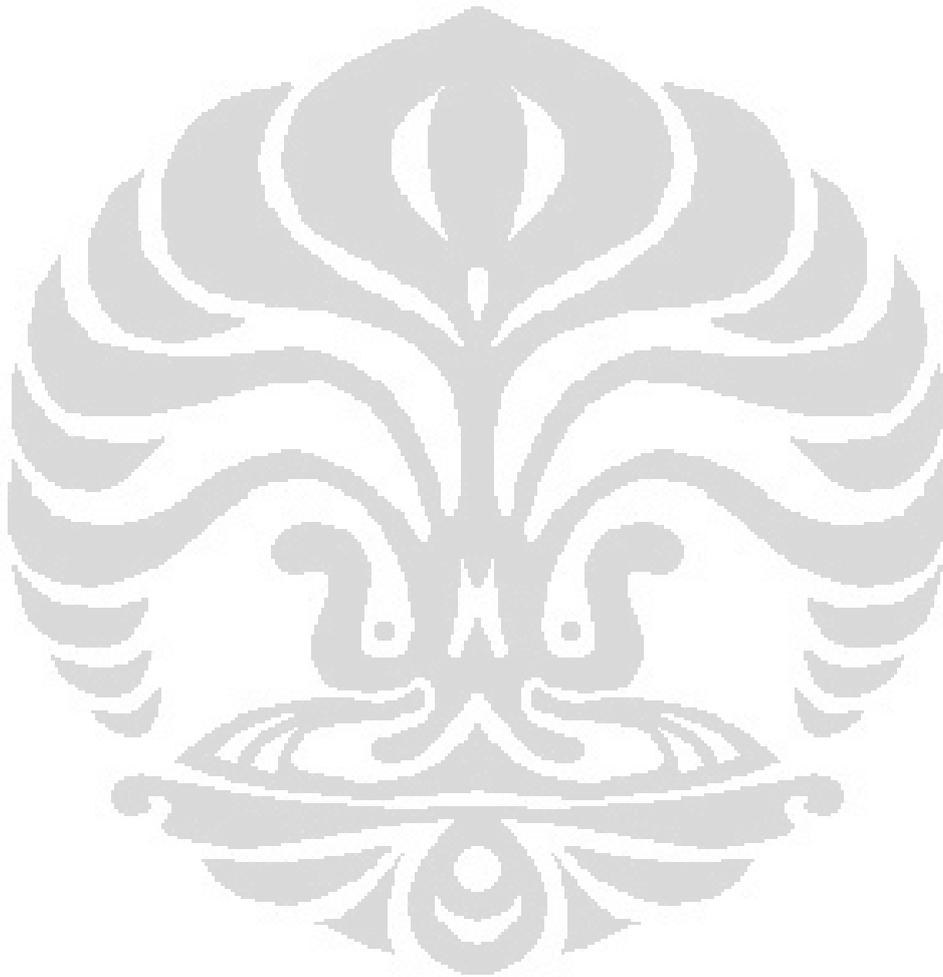
“... mun boga sawah garap wae, mun rek pindah ayeuna tanpa biaya ti pemerintah terserah”.

(Kalau punya sawah silahkan digarap saja, kalau mau pindah sekarang tanpa biaya dari pemerintah terserah).

Berdasarkan pernyataan yang konon diucapkan langsung oleh pimpinan proyek terdahulu, maka warga masyarakat masih bebas mengakses lahan dan menggarap sawah mereka hingga saat ini. Tanah juga bisa diperjualbelikan, tapi sebatas jual beli garap bukan hak milik. Karena secara hukum, kepemilikan sudah mutlak menjadi tanah negara. Akan tetapi, jual beli garap ini menurut Pemda tidak

boleh diketahui oleh pihak desa. Dikhawatirkan desa mengambil keuntungan dari warga.

Semua yang mereka lakukan adalah cara mereka untuk bertahan di lahan yang masih dirasakan milik mereka. Mereka menuntut pemenuhan hak yang adil, dan selama itu belum diselesaikan mereka akan tetap bertahan dan tidak akan mau pergi.



BAB 5

PENUTUP

Kesimpulan

Proyek pembangunan bendungan Jatigede hadir bukan hanya sebagai teknologi yang memediasi ambisi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Lebih dari itu, bendungan ini hadir sebagai arena masalah yang karena ketertundaannya selama puluhan tahun itu menciptakan kekisruhan layaknya '*benang pakojo*' atau benang kusut dan kehidupan warga petani dusun Bantarawi ikut terombang-ambing karenanya.

Dalam kekacauan, kebingungan, dan ketidakpastian ini, kapan dan bagaimana mereka akan diperlakukan, warga petani di dusun Bantarawi mencoba berdamai dengan sempitnya keadaan yang ada. Semata-mata hanya untuk menjaga apa yang menjadi hak mereka. Tidak banyak yang mereka inginkan dan mereka tuntut, sebatas keadilan untuk hidup dan penghidupannya. Studi yang disajikan ini berusaha memberikan gambaran yang lebih nyata tentang respon warga petani di dusun Bantarawi desa Padajaya kecamatan Wado kabupaten Sumedang Jawa Barat terhadap pengaruh yang dirasakan dari keberadaan dan pelaksanaan pembangunan bendungan Jatigede.

Pendataan pertama kali pada tahun 1982 dilakukan secara tidak transparan dan asal saja. Pengetahuan warga masyarakat pada saat itu menduga pendataan tersebut dilakukan dalam rangka untuk pendisiplinan nominal pengenaan pajak. Maka dari itu pendataan menjadi kisruh dan asal-asalan. Pada saat pendataan pun rata-rata pemilik lahan atau bangunan tidak menyaksikannya. Bahkan ada yang meminta data kekayaannya dipalsukan, tanah yang luas didata menjadi sempit dan tanah yang sempit didata menjadi luas. Hal ini dikarenakan warga masyarakat takut dikenakan pajak yang besar.

Saat pemanggilan pembayaran ganti rugi warga masyarakat baru mengetahui bahwa pendataan yang lalu adalah untuk proyek bendungan Jatigede. Warga merasa dibodoh-bodohi dan kecewa pada sikap pemerintah. Warga

Bantarawi tahu persis posisi mereka sebagai orang yang termarginalkan oleh pembangunan. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa, terlebih saat itu pembayaran ganti rugi untuk mega proyek ini bertepatan dengan masih menjabatnya rezim Orba. Cerita mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer terhadap orang-orang yang berani memprotes pemerintah mewarnai sejarah dari proyek Jatigede ini.

Selain itu program pemindahan baik yang digabungkan dengan program transmigrasi ataupun migrasi ke daerah yang relatif tidak jauh mencerminkan kurang perhatiannya pemerintah dalam menangani rakyatnya. Mereka diperlakukan layaknya pengungsi di tempat pengungsian. Persiapan yang tidak matang dalam masalah pemindahan adalah hal yang fatal. Mereka ‘dipaksa’ pindah ke tempat yang baru dengan jaminan sudah disediakan rumah dan lahan produktif. Nyatanya, rumah tidak ada dan lahan tidak bisa sama sekali dipakai bertani sekalipun berkebun mereka harus menunggu agak lama sambil kelaparan. Seiring dengan tertunda-tundanya pembangunan bendungan Jatigede, lengkaplah sudah tidak ada alasan para migran untuk tetap bertahan di lokasi yang baru. Ditambah lagi seseorang dari pihak proyek yang menyarankan mereka untuk bertahan di dusun sampai air benar-benar datang. Di sisi lain pemerintah juga tidak melarang mereka untuk tetap mengolah sawah dan kebun, serta mengakses hutan. Mereka pun kembali ke tanah dusunnya dan menikmati kehidupan yang serba terbatas dalam ketidakpastian. Bagi mereka, yang penting kebutuhan subsistensinya terpenuhi dan mereka masih bisa bertani.

Rasa kecewa masyarakat semakin menjadi-jadi dan mengkristal dalam bentuk respon yang kreatif dan mengandung unsur perlawanan. Dengan tertunda-tundanya pembangunan bendungan Jatigede, warga menemukan beberapa peluang untuk kembali membodoh-bodohi pemerintah dengan cara membangun ‘rumah hantu’. Entah membangunnya dengan modal sendiri, *joint* dengan kerabat atau kawan, atau bahkan menyewakannya kepada pihak luar. Ibarat investasi, ‘rumah hantu’ dilihat sebagai peluang melipatgandakan kekayaan, terbukti ada yang sempat merasakan keuntungan dari pembayaran ‘rumah hantu’ di daerah yang sudah lebih dulu dituntaskan.

Dusun Bantarawi belum juga tersentuh pendataan ulang hingga saat ini. Awalnya, harapan warga sangat besar bahwa 'rumah hantu' ini harus ikut terbayar bersama lahan yang terlewat. Semakin hari warga sudah lelah menunggu dan berharap rupanya. 'Rumah hantu' sudah keburu ambruk, sedangkan kepastian akan kapan tiba giliran mereka dituntaskan masih belum juga ada gambaran hingga saat ini. Kondisi seperti ini membuat mereka tidak lagi memiliki keberanian yang besar untuk berekspektasi lagi. Sekalipun pada orang-orang tertentu seperti Bapak AN dan Bapak IC yang memiliki aset lain seperti rumah dan tanah di desa lain masih bisa menghela nafas lega karena masih bisa menjamin arah hidupnya. Kebangkrutan karena 'rumah hantu' tidak dibayar rasanya tidak secara otomatis mengecilkan keadaan hidup mereka. Lain halnya dengan Bapak R, Bapak S, dan Bapak IT yang masih belum tahu harus kemana, meskipun kemungkinan terbesar adalah ikut anak-anak mereka.

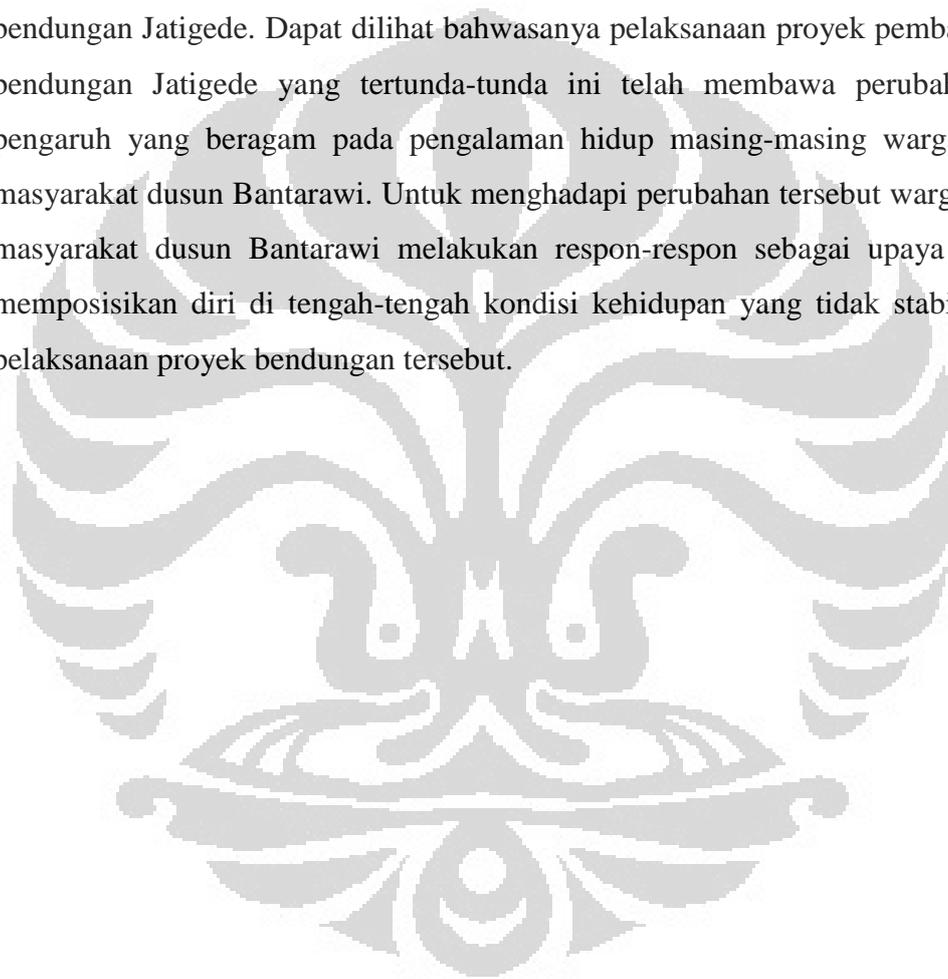
Hak akan keadilan terkait dengan pendataan dan penuntasan pembayaran, minimal yang terlewat di tahun 1982-1984, dan minta jaminan hidup saat di relokasi adalah tuntutan utama dari warga Bantarawi kepada pemerintah. Mereka akan tetap tinggal dan bertahan tidak peduli dengan kondisi yang serba terbatas dan tidak pasti sekalipun, hingga penuntasan pembayaran ganti rugi itu dilakukan. Yang bisa mereka lakukan tinggal di sana, bertani seperti biasanya, bergaul dan mengadakan upacara-upacara sebagaimana tradisi mereka, dan menunggu kapan air akan benar-benar datang untuk mengusir mereka sesegera mungkin.

Disamping meneruskan hidup dengan cara yang mereka bisa lakukan, mereka juga berupaya memperjuangkan hak mereka dengan jalan melakukan aksi protes. Aksi protes ini ditujukan untuk menuntut kepastian proyek ini dan penuntasan masalah sosial budaya sesegera mungkin. Namun, hingga saat ini tidak pernah ada tanggapan yang praktis dari pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kembalinya para migran dan maraknya pembangunan rumah hantu adalah bentuk respon warga terkena dampak pelaksanaan pembangunan bendungan Jatigede ini. Aksi Protes muncul sebagai puncak respon warga terkena dampak terhadap ketidakpastian hidup yang mereka hadapi. Hak akan keadilan terkait dengan pendataan dan penuntasan

pembayaran, minimal yang terlewat di tahun 1982-1984, dan minta jaminan hidup saat di relokasi adalah tuntutan utama dari warga Bantarawi kepada pemerintah. Mereka akan tetap tinggal dan bertahan tidak peduli dengan kondisi yang serba terbatas dan tidak pasti sekalipun, hingga penuntasan pembayaran ganti rugi itu dilakukan.

Kajian ini telah memotret realita kehidupan warga petani Bantarawi yang menghadapi kondisi hidup serba terpasung oleh tertunda-tundanya pembangunan bendungan Jatigede. Dapat dilihat bahwasanya pelaksanaan proyek pembangunan bendungan Jatigede yang tertunda-tunda ini telah membawa perubahan dan pengaruh yang beragam pada pengalaman hidup masing-masing warga masyarakat dusun Bantarawi. Untuk menghadapi perubahan tersebut warga masyarakat dusun Bantarawi melakukan respon-respon sebagai upaya mereka memposisikan diri di tengah-tengah kondisi kehidupan yang tidak stabil akibat pelaksanaan proyek bendungan tersebut.



DAFTAR REFERENSI

Agar, Michael

1980 *The Professional Stranger*. London USA : Academic Press, Inc

D'Souza, Dilip and Mahesh Gavaskar and Suresh Rajeshwar

1996 *Bargi Dam: Oustees Pay Price of Development*. Economic and Political Weekly, Vol.31, No.45/46

Dirjen Pengairan PU

1995 *Bendungan Besar di Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengairan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum. (30 September 2011, 12:57:36 diakses dari www.pustaka.pu.go.id/.../A-BendunganBesar_Indonesia.111200714644.pdf).

Emerson, Robert

1995 *Writing Ethnographic Fieldnotes*. Chicago

Fetterman, David

1989 *Ethnography: step by step*. USA: Sage Publication

Goldsmith, Edward & Nicholas Hildyard

1993 *Dampak Sosial dan Lingkungan Bendungan Raksasa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Green, Anna

2004 'Oral History Society; Individual Remembering and 'Collective Memory': Theoretical Presuppositions and

Contemporary Debates' dalam *Oral History*, Vol.32 No.2, *Memory and Society* (24 Nopember 2011, 17:16:49 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/40179797>).

Guntara, Dasril

2009 Ideologisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan di Dalam Interaksi Antar Penghuni Asrama: Studi Kasus Asrama Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Strategis (PPSDMS) Nurul Fikri Regional I Jakarta. Skripsi Sarjana tidak diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia.

Heming, Li and Paul Waley and Phil Rees

2001 *Reservoir Resettlement in China: Past Experience and the Three Gorges Dam*. *The Geographical Journal*, Vol.167, No.3 (04 Maret 2011, 17:34:28 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3060588>).

Hindom, Said

1997 Pembangunan Nasional di Jayawijaya dan Respon Orang Dani di Kecamatan Wamena Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya. Tesis Magister tidak diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia.

Issacman, Allen & Chris Sneddon

2000 *Toward a Social and Environmental History of the Building of Cahora Bassa Dam*. *Journal of Southern African Studies*, Vol.26 No.4 (11 Oktober 2011, 13:51:18 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2637563>).

Koentjaraningrat

1997 *Koentjaraningrat & Antropologi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kurnianto, Danu

- 2010 Dinamika Pengetahuan dan Praktik Konservasi Varietas Padi Gunung Pada Komunitas Petani Ladang Desa Ritan Kalimantan Timur. Skripsi Sarjana tidak diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia.

Kurtz, M. J

- 2000 'Understanding Peasant Revolution: From Concept to Theory and Case' dalam *Theory and Society*, Vol.29, No.1 (11 Oktober 2011, 13:46:24 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/3108480>).

Mihesuah, D.A

- 1996 'Voices, Interpretation, and the 'New Indian History': Comment on the "American Indian Quarterly's" Special Issue on Writing about American Indians' dalam *American Indian Quarterly*, Vol.20, No.1 (21 September 2011, 11:47:39 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/1184945>).

Mukta, Parita

- 1990 'Worshipping Inequalities: Pro-Narmada Dam Movement' dalam *Economic and Political Weekly*, Vol.25, No.41 (04 Maret 2011, 17:26:39 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4396864>).

Phadke, Anant R.S.

- 1990 'Baliraja Mini Dam: Unfinished Struggle' dalam *Economic and Political Weekly*, Vol.25, No.26 (04 Maret 2011, 15:58:38 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/4396428>).

Redfield, Robert

- 1985 *Masyarakat Petani dan Kebudayaan*. Jakarta: Rajawali.

Scott, James

1996 *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta:LP3ES.

Sinarno, Radhi dkk

2006 *Seri Sejarah Konstruksi Indonesia:Menyimak Bendungan di Indonesia (1961-2006)*.Jakarta:Bentara Adhi Cipta Indocamp, Abstraksi.

Soemarwoto,Otto

1997 *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*.Jakarta:Djambatan.

Thabane,Motlatsi

2000 'Shift from Old to New Social and Ecological Environments in the Lesotho Highlands Water, Scheme:Relocating of the Mohale Dam Area' dalam *Journal of Southern African Studies*, Vol.26, No.4 (04 Maret 2011, 17:45:52 diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2637564>)

Tjitradjaja

2006 *Contextual Explanation: A Methodological Examination*, dalam *Jurnal Antropologi Indonesia* Vol.30,No.3.

Winarto, Yunita T.,Totok Suhardiyanto, & Ezra M. Choesin

2007 *Karya Tulis Ilmiah Sosial "Menyiapkan, Menulis dan Mencermatinnya"*.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.

Wolf, Eric R.

1996 *Petani:Suatu Tinjauan Antropologis*.Jakarta:Rajawali.

Serial

Koran Harian Lokal Radar Sumedang Jawa Pos Group

Edisi Selasa, 26 April 2011:1 & 6

Tabloid Lokal Mingguan Cakrawala Tandang

Edisi No. 06 Tahun I 10-16 Februari 1999:4-6

Laporan-laporan

Tabel Data Geografis. Dokumen Profil Kecamatan Wado Semester 1 Tahun 2010

Tabel Target dan Realisasi PBB. Dokumen Profil Kecamatan Wado Semester 1 Tahun 2010

Web

<http://www.alpensteel.com/article/66-105-energi-sungai-plta--waduk--bendungan/2787--pembangunan-bendungan-jati-gede-di-kab-sumedang.html>,

diunduh 30 September 2011

http://www.wika.co.id/ina/invesrel/index.php?act=detailnews&p_id=260 ,

diunduh 24 Oktober 2008